

# KASYAF

Jurnal Populer Pemikiran Ekonomi Islam

Volume 1 Tahun 1 / 2019

## Nasib Indonesia di 100 Tahun Kedua



Radhar Panca Dahana  
Adian Husaini  
Yudi Latif  
Fachry Ali  
Didin S. Damanhuri  
Arif Budimanta  
Marwan Batubara  
Firman Jatnika &  
Erie Febrian  
Ana Nur Faizah  
Naufal Muttaqien S.  
IGG Maha S. Adi



Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Padjadjaran

# Daftar Isi

Muqaddimah .....	3
Syaiful Rahman Soenaria	
Indonesia Abad Kedua: Jawaban Budaya .....	6
Radhar Panca Dahana	
Pendidikan Jiwa Bangsa untuk Kejayaan Indonesia 2045 .....	12
Adian Husaini	
Menjadikan Pancasila Sakti .....	20
Yudi Latif	
Nasib Umat Islam di 100 Tahun Kedua .....	32
Fachry Ali	
Arah Perekonomian Indonesia 2045: Menghindari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah .....	43
Didin S Damanhuri	
Reforma Agraria .....	48
Arif Budimanta	
Mengharap Pengelolaan Sumber Daya Alam Konstitusional ....	61
Marwan Batubara	
Determinan Model Bisnis Perbankan Islam: Kajian Literatur ...	76
Firman Jatnika dan Erie Febrian	
Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Ekologis Indonesia di 2045.....	89
Naufal Muttaqien	
Indonesia di 100 Tahun Kedua: Pandangan Generasi Muda.....	95
Ana Nur Faizah	
Jejak Berliku Pemikiran Begawan Nasionalis .....	103
IGG Maha Adi	

Jurnal Kasyaf diterbitkan oleh Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, adalah media informasi dan komunikasi masalah sosial, ekonomi, dan bisnis dalam perspektif Islam, dengan konten utama tulisan pemikiran populer, ringkasan hasil penelitian, serta gagasan orisinal. Redaksi mengundang semua komponen masyarakat untuk berkontribusi tulisan. Tulisan dalam Jurnal Kasyaf tidak selalu mencerminkan pendapat PUSDI EBI FEB UNPAD. Redaksi dapat mengedit tulisan tanpa mengubah maksud dan isinya. ©Hak cipta dilindungi Undang Undang.

**Penanggung Jawab:**

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran: Syaiful Rahman Soenaria.

**Dewan Redaksi:** Ketua: Darmawan Sepriyossa. Anggota: Erie Febrian, Yunizar, Cupian, Firman Jatnika, dan Syaiful Rahman Soenaria.

**Pelaksana Redaksi:** Agustin Andriani dan Dicky Arie Sandy.

Alamat: Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung 40133, Indonesia. Telp: +62 822-8321-6196

Email: [pusdi.ebi.feb@unpad.ac.id](mailto:pusdi.ebi.feb@unpad.ac.id). Website: [www.pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id](http://www.pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id)



## MUQADDIMAH

Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Penguasa ruang dan waktu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Shalawat dan salam teruntuk Rasulullah Muhammad SAW, cahaya bagi semesta alam serta inspirasi dan teladan umat manusia dalam ikhtiar membangun masa depan.

Bersamaan waktu dengan hari pahlawan 10 November, dengan bahagia kami persembahkan ke hadapan pembaca edisi perdana Jurnal Kasyaf sebagai jurnal populer pemikiran ekonomi Islam. Di tengah minimnya ketersediaan jurnal populer pemikiran umat Islam yang ada saat ini di Indonesia, kami berharap Jurnal Kasyaf ini menjadi bacaan yang dapat diterima dan menarik untuk dibaca oleh umat Islam dan bangsa Indonesia. Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Padjadjaran selama ini telah menerbitkan secara berkala Jurnal Akademik Ekonomi dan Bisnis Islam. Namun kami menyadari bahwa gaya bertutur dan metode pembahasan jurnal akademik hanya eksklusif menjangkau pembaca di dunia akademik saja. Menyadari bahwa ilmu yang dikaji di kampus harus dapat membantu masyarakat (1) untuk lebih mengenal dan taat kepada Allah, (2) untuk lebih memiliki adab yang mulia, dan (3) untuk mampu menegakkan keadilan sosial (sifat emansipatoris dari ilmu), maka kami terbitkan Jurnal Kasyaf sebagai jurnal populer pemikiran ekonomi Islam yang kami harapkan dapat menjangkau khalayak pembaca yang lebih luas di masyarakat dalam rangka pencapaian tiga tujuan kajian ilmu tersebut diatas. Jurnal Kasyaf direncanakan terbit insya Allah setiap enam bulan.

Kami berpendapat bahwa bangsa Indonesia saat ini

memiliki tiga persoalan mendasar: (1) Ketimpangan sosial yang semakin parah (2) Ketergantungan tinggi kepada pihak asing, dan (3) Budaya korupsi yang akut. Melalui jurnal Kasyaf ini, kami ingin berkomunikasi dengan masyarakat dalam memformulasi dan mengeksekusi **visi dan strategi keadilan, kemandirian, serta strategi kebudayaan** sebagai jawaban terhadap tiga persoalan mendasar tersebut dengan **menjadikan Islam sebagai paradigma dan metodologi**.

Dalam edisi perdana ini, kami mengangkat tema tentang **Indonesia di 100 Tahun Kedua**. Kami ingin menyajikan deskripsi situasi strategis Indonesia saat ini dan dengan itu melakukan prediksi tentang apa dan bagaimana Indonesia di 100 tahun kedua sebagai konsekuensi dari situasi saat ini. Karena kita sebagai bangsa memiliki tujuan hidup bersama, maka preskripsi tentang apa yang harus dilakukan agar tujuan tersebut dapat terwujud di 100 tahun kedua juga mewarnai konten 11 tulisan yang tersaji.

Dimulai dengan tulisan **Radhar Panca Dahana** tentang pertanyaan dan

prediksi kebudayaan, karena sejatinya aktivitas berbangsa adalah membangun kebudayaan dimana ekonomi hanyalah menjadi kaki dan instrumen pendukung. Selanjutnya masalah mendasar ketimpangan sosial dan ketergantungan tinggi kepada asing disorot oleh tulisan **Didin S Damanhuri, Arif Budimanta, Marwan Batubara** dan juga **Yudi Latif**. Tiga yang pertama membahas aspek keadilan ekonomi dan cara keluar dari jebakan ketergantungan kepada asing dengan membangun kemampuan produksi, sementara Yudi Latif menyoroti tata nilai, tata kelola dan tata sejahtera bangsa melalui pembumian dan pengamalan sila-sila dalam Pancasila sebagai kontrak sosial kita. **Adian Husaini** mengingatkan kita untuk melaksanakan kata-kata dalam sistem pendidikan nasional sebagai jantung kebudayaan dimana manusia taqwa adalah tujuannya dan membangun adab adalah strategi mencapainya.

Selanjutnya **Fachry Ali** menganalisis tentang masa depan umat Islam di Indonesia dengan menitikberatkan pendidikan sebagai *leverage* posisi dan peran signifikan umat Islam di Indonesia.

**Firman Jatnika** dan **Erie Febrian** secara khusus membahas dinamika eksternal dan internal perbankan Islam melalui satu model yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi perbankan Islam dalam perekonomian nasional, mengingatkan inklusifitas lembaga keuangan menjadi salah satu cara mengatasi ketimpangan sosial, sementara porsi akumulasi dana masyarakat oleh perbankan Islam tidak bergerak melampaui 6 persen dari total dana masyarakat yang dihimpun lembaga keuangan nasional, padahal sudah lebih dari 25 tahun kehadiran perbankan Islam di Indonesia.

Edisi perdana ini juga memuat pandangan dari **Ana Nur Faizah** dan **Naufal Muttaqien Shidiq**, dua orang mahasiswa S1 dimana generasi merekalah yang akan dominan berperan di Indonesia di 100 tahun kedua. Ana membahas tentang pengembangan sumber daya insani di Indonesia sementara Muttaqien fokus kepada keadilan sosial dan keadilan ekologi

dalam pembangunan ekonomi. Sebagai rubrik penutup, **IGG Maha S. Adi** menyajikan resensi dari buku tulisan M. Dawam Rahardjo tentang pemikiran ekonomi politik Sumitro Djojohadikusumo.

Intinya, edisi perdana ini ingin menyajikan potret besar tentang Indonesia saat ini dan prediksi serta preskripsi masa depannya di 100 tahun kedua. Potret besar ini selanjutnya akan dibahas lebih mendalam secara tematik pada edisi-edisi berikutnya dengan titik tekan kepada pembahasan ekonomi untuk mewujudkan visi dan strategi keadilan, kemandirian dan kebudayaan.

Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali hanya dari Allah.

Selamat membaca.

***Syaiful Rahman Soenaria***

## Indonesia Abad Kedua: Jawaban Budaya



**Radhar Panca Dahana**

Ramalan profetik, sains yang futuristik atau futurologi dalam ilmu sosial, hingga fiksi tentang masa depan Indonesia—baik dalam bentuk prosa, puisi, komik, film, dan lainnya—masih langka di negeri ini. Sementara di bagian dunia lain, hal dan tema-tema seperti itu hampir menjadi bagian dari keseharian masyarakat sebuah negeri.

Katakanlah di Amerika Serikat, sebagian besar Eropa Barat, Jepang, bahkan India dan Cina. Berbagai karya, mulai dari sekadar komik atau novel hingga film dengan teknologi tercanggih saat ini tentang masalah itu sudah dihasilkan, misalnya film *Wandering Earth*, karya sineas Cina, Frant Gwo, produksi 2018, yang dari segi fantasi hingga tek-

nologinya tidak kalah sama sekali dengan Hollywood.

Semua kecenderungan itu tidak lain akibat dari fenomena atau peristiwa-peristiwa mutakhir yang terjadi di bumi ini, di hampir seluruh permukaannya. Peristiwa dan fenomena yang umumnya disebabkan oleh tiga hal: pertama, perubahan radikal pada kondisi alam dan lingkungan hidup kita akibat, dua perubahan yang juga drastis dari perilaku sosial-politik terutama ekonomi manusia sebagai penghuni utama bumi, yang antara lain distimulasi tiga perkembangan revolusioner teknologi terapan di berbagai bidang.

Seluruh perubahan di tiga matra utama itu, diakui atau tidak (karena ada pemimpin dari sebuah negara besar menyebutnya sebagai hoax), menciptakan prediksi atau perkiraan yang sudah teruji secara akademik tentang masa depan manusia dan bumi yang katastrofik. Situasi yang infernal atau *armageddon* di masa depan bukan lagi menjadi fantasi atau imajinasi, bukan hanya secara kultural atau keilmuan, bahkan juga secara religius. “Kiamat nyata semakin dekat!” demikian sebagian kalangan menyerukan. Termasuk kaum evangelis apokaliptik dan para “nabi” dari agama-agama baru yang berusaha menye-

lamatkan (hidup) dunia-manusia, termasuk menggeser kekuatan ilahiah ke kekuatan satanik.

Kecemasan pun melanda dunia, sebagian bahkan mulai frustrasi, apatis, atau menjadi fatalis. Pelbagai gerakan muncul sebagai reaksi dari itu. Selain munculnya gerakan agama-agama apokaliptik di atas, terdapat juga upaya-upaya—yang sebagian seperti mengada-ada atau *over speculation*—di antara lain mencari cara dan tempat untuk menyelamatkan nasib Homo sapiens ini di masa depan. Ada yang melihatnya jauh ke angkasa, membangun stasiun penyelamat manusia di luar angkasa, peluang hidup di planet Mars dan lainnya, atau melihatnya justru ke bawah bumi, menciptakan *bunker-bunker* yang begitu besar yang dapat menampung seluruh kekayaan hayati penunjang hidup manusia, seperti yang dilakukan beberapa kelompok ilmuwan di negara-negara Nordik, termasuk Amerika Serikat.

Sekelompok lain menggerakkan secara massif-global semacam perlawanan, *Extinct Rebellion*, yang terdiri bukan hanya para aktivis lingkungan tapi juga ratusan ilmuwan termasuk puluhan peraih Nobel yang coba melawan banyak pemerintah negara maju dunia yang kebijakannya dianggap mendorong atau

mempercepat kehancuran bumi. Yang lebih menarik dari itu adalah sebuah pemikiran—yang kian meluas saat ini—tentang kian rapuhnya bumi sehingga daya dukungnya pada kehidupan pun kian merosot, secara drastis.

Dalam logika pemikiran terakhir di atas, kondisi mutakhir dunia yang dijejali lebih dari delapan miliar manusia (belum hewan dll) sudah tidak lagi dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya oleh sumberdaya natural yang kian tipis bahkan rusak di banyak bagian karena ulah manusia sendiri. Dalam perhitungan kaum ahli, jumlah ideal manusia bagi bumi—dengan prakondisi alam yang masih sehat—tidak lebih dari 3,5 miliar manusia.

Angka lima miliar masih cukup logis untuk bisa *survive* dan berkembang. Tapi delapan miliar, atau 10 miliar dalam waktu tidak sampai 10 tahun lagi, 20 miliar dalam jangka setengah abad kemudian? *Earth's inferno* atau kiamat bumi sudah akan terjadi dengan sendirinya, tanpa bencana, tanpa perang, atau kejadian hebat lainnya.

Jalan keluar? Ini bagian terpenting dan paling menarik. Dari logika di atas, solusi terbaik tidak lain adalah memusnahkan setidaknya lima puluh persen dari penduduk dunia! Main-main?

Tidak. Logika seperti ini bermunculan di banyak medium, dimulai dari karya-karya seni. Mulai dari roman atau novel, komik, kartun, hingga atau terutama film-film masa kini yang didominasi oleh produk Hollywood.

Sebutlah judul-judul macam (serial) Avengers (dan banyak sekali produk Marvel juga DC lainnya), hingga *'Mission Impossible'* bahkan *'Fast and Furious'* di seri terakhirnya, menyuarakan solusi semacam itu.

Lalu bagaimana kita membayangkan diri kita sendiri, juga sebagai sebuah bangsa atau negeri (Indonesia) dalam berbagai kemungkinan apokaliptik di atas?

Saya mendapatkan, secara umum, di berbagai kelas atau pilahan demografis yang ada, pemikiran bahkan bayangan semacam itu sangat minim adanya. Maknanya? Cukup banyak, dan dalam.

Pertama, secara "positif" katakanlah, orang Indonesia kebanyakan masih (selalu) memandang secara positif kehidupan yang dijalannya, apa pun yang dialami bahkan dideritanya. Aforisme orang Jawa, semacam: "Untung yang putus cuma jempol kaki saja, bukan kakinya," sudah hampir menjadi pemahaman bahkan keyakinan umum.

Kepercayaan pada Tuhan atau spiritualitas yang tinggi (sebagaimana dasar negara menempatkannya di sila pertama), memang terbukti, dalam artian "semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa semata demi kemaslahatan manusia".

Pikiran sekular bahwa kemaslahatan atau keselamatan itu bisa berakhir atau bahkan berganti menjadi kemudharatan atau kehancuran yang diakibatkan manusia, walaupun ada, dimaklumi hanya sebagai bagian dari romantika kehidupan. "Pada akhirnya Gusti Pangeran yang akan bicara lewat takdirNya, untuk kebaikan manusia." Karena? Karena Tuhan Maha Pengasih.

Tentu saja pernyataan di atas bukan dengan maksud *menjudge* secara negatif keyakinan umum kita. Mungkin sebaliknya, dengan sikap itu, orang Indonesia selalu memiliki (atau giat memproduksi) harapan, di situasi seburuk apa pun. Satu sikap yang bagi sisa dunia tentu mendapat tanggapan positif.

Tapi ada implikasi logis lainnya. Sikap yang sebagian fatalistik atau *taqlid* itu membuat (sebagian) kita tidak mau juga tak mampu melihat dan memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan buruk dan destruktif yang terjadi di masa



depan. Apalagi karena itu perbuatan kita (manusia) sendiri.

Sementara banyak data valid dan teruji, yang juga dipahami orang-orang cerdas berkeyakinan agama kuat atau fatal di atas, menunjukkan bagaimana ancaman bencana dahsyat bahkan pada situasi infernal, setidaknya khaotik, di masa depan makin nyata. Katakanlah situasi di kawasan Arktik (kutub Utara) saat ini yang terus mengalami pelelehan (gunung es) akibat pemanasan bumi yang jangankan menurun tapi justru meningkat, karena nafsu ekonomis manusia yang kian tak terbendung.

Pelelehan yang kian ekstrem itu meningkatkan permukaan air laut di seantero dunia, yang saat ini sudah mencapai sekurangnya 30 cm. Peningkatan satu meter akan menciptakan musibah luar biasa di banyak belahan dunia, termasuk di negara-negara Asia Tenggara. Sebagian ibukota yang kebanyakan berbatas pantai akan tenggelam, seperti Istana Negara, juga beberapa negara kepulauan kecil di Hindia dan Pasifik akan hilang sehingga menimbulkan masalah migrasi besar yang memunculkan berbagai masalah sosial, ekonomi, politik, hankam hingga kultural.

Rusaknya lingkungan dan ekosistem akibat eksploitasi bisnis

dan ekonomi akibat syahwat material dari kapitalisme modern, membuat alam mengalami kemerosotan drastis dalam perannya menunjang kehidupan.

Dari segi pangan hingga kebutuhan energi, fosil terutama, yang hingga 50 tahun ke depan masih mendominasi konsumsi dunia. Akan terjadi krisis, konflik dan perang di banyak kawasan dunia, hanya untuk memperebutkan sumber-sumber dari dua SDA itu saja.

Belum lagi konstelasi dunia, geopolitik, geoekonomi hingga geokultural dunia yang kian tak menentu belakangan ini dengan munculnya diktator-diktator baru, ironisnya dilahirkan justru oleh sistem pilihan terbaik dunia: demokrasi. Kaum populis yang notabene ekstrem-kanan (*far-right*) di Amerika Serikat, Amerika Latin, Eropa Kontinental hingga Asia Barat dan Afrika Utara, seperti bergerak secara kolektif untuk meruntuhkan tatanan dunia yang sudah berkecenderungan berdarah dibangun oleh bangsa-bangsa (yang tergabung dalam PBB maupun organisasi mondial lainnya) selepas PD II.

Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Perang dagang yang tajam dan meluas antar Cina dan Amerika, Amerika dan Eropa serta sisa dunia

lainnya, sekarang bertambah dengan ketegangan dagang Jepang dan Korea Selatan, Inggris dan Iran, dst., sudah terbukti menciptakan volatilitas yang tinggi pada perekonomian dan akhir politik dunia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

Tapi kita tahu pasti, kemungkinan buruk itu memiliki probabilitas tinggi untuk terjadi. Apa yang ada dan terjadi ketika Indonesia memasuki usia kedua abadnya nanti? Kita tidak tahu. Itu jawaban paling pas dengan uraian cukup lebar di atas. Internal kita hampir tidak peduli, karena sempitnya ruang imajinasi kita, pendeknya visi, dan fatalisme spiritual terurai di atas tadi. Eksternal, ketidakmenentuan dunia kian membuat kita malas memikirkannya. Kita sudah capek dengan persoalan personal di keseharian dan isi medsos yang mengharu biru bahkan di waktu makan atau ibadah kita. Biarlah orang yang berwenang memikirkannya, dan Tuhan memutuskannya.

Tidak terbayang sama sekali, misalnya, apakah spesies manusia modern ini dapat bertahan tiga puluh atau lima puluh tahun lagi? Tidak usah satu abad kemudian. Dan bukannya tersingkir atau mulai punah karena bencana alam atau evolusi dari beberapa makhluk

yang kembali monstrous. Namun tersingkir atau kalah.

Subspesies manusia yang sebagian dari tubuhnya merupakan implantasi atau transplantasi produk teknologi mutakhir, semacam *chip* yang berisikan *artificial intelligence*, atau manusia android, cyborg, mutan atau *bionic*.

Subspesies manusia baru ini memiliki kapasitas atau kemampuan yang jauh melampaui manusia normal, karena kapabilitasnya—paling kurang—jauh lebih tinggi dalam mencerna Maha Data dan operasi komputasi berbasis *internet of things*. Mereka bisa jadi akan meraih bahkan merebut kekuasaan yang selama ini digenggam oleh manusia alamiah. Konflik di antara kedua subspesies akan terjadi sengit, dan mendapat lawan lain yang jauh lebih menarik dan lebih mumpuni, subspesies yang murni hasil teknologi: robot.

Kumpulan atau komunitas manusia robot ini bukan hanya sudah diwujudkan dalam pelbagai film tapi juga direalisasikan secara nyata, katakanlah, di beberapa negara seperti: Jepang, Amerika Serikat juga Cina. Produk teknologi yang berusaha



Bismillahir Rahmanir Rahim terkenal dengan basmalah atau tasmiyah yang bermakna membaca nama Allah dan mengingat Allah (zikrullah). Diambil dari <https://www.pikpng.com>

memiliki semua kemampuan manusiawi ini, pada satu saat, akan juga memiliki kapabilitas untuk menciptakan keputusan sendiri, mengeksekusinya, termasuk dalam menghadapi kompetitornya (manusia dan *cyborg*), bahkan menciptakan masyarakatnya sendiri.

Bagaimana kemudian dunia yang dihuni oleh—dan persaingan tinggi antara—tiga subspecies manusia di atas?

Anda bisa membuat spekulasinya masing-masing. Yang jelas ketiganya akan menghadapi dan merespon situasi dunia atau bumi sebagaimana terprediksi di atas, dengan caranya masing-masing.

Dan Indonesia pada masa itu, dalam perhitungan yang paling logis (juga teoritis), dalam hemat penulis, masih belum jauh beranjak dari realitas tradisional dan primordial yang sudah ribuan tahun mereka jalani itu. Jika

benar semua prediksi dan munculnya persaingan keras dan subspecies di atas, bangsa Nusantara ini, bangsa yang bahari ini, akan tinggal menjadi suku bangsa tertinggal, primitif. Semacam Baduy, Suku Naga, atau bahkan Asmat atau Anak Dalam seperti sekarang ini.

Apa yang menarik dari spekulasi imajinatif itu adalah: orang atau bangsa Indonesia menjadi satu dari sedikit bangsa yang masih memelihara kebudayaan asli sebagai dasar identitasnya. Dalam logika umum saat itu, kebudayaan adalah

omong kosong. Dalam kesadaran yang *faithfully*, spiritualistik sejak zaman pagan, justru kata itu (kebudayaan dan agama) yang—konon—akan menyelamatkan manusia, juga bumi dan seisinya.

Siapa yang tahu? Kita secara umum sudah menjawabnya: hanya Allah yang tahu. Anda? [ ]

# Pendidikan Jiwa Bangsa untuk Kejayaan Indonesia 2045



**Adian Husaini**

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.” (UUD 1945, pasal 31 (3)).

-----

Rumusan pasal 31 ayat (3) itu tentu bukan rumusan sembarangan. Itu rumusan pendidikan yang sangat mendasar untuk membawa kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Istilah ‘taqwa’, ‘iman’, dan ‘akhlak mulia’ (*akhlaqul karimah*) termasuk istilah-istilah kunci dalam Islam (*Islamic basic vocabularies*).

Manusia yang beriman, ber-taqwa, dan berakhlak mulia, pastilah manusia-manusia unggul. Sebab, manusia bertaqwa adalah makhluk yang paling mulia derajatnya. (QS 49:13).

Dalam kaitan dengan ketaqwaan, patut disyukuri, secara konstitusional (pasal 31 ayat 3), Indonesia adalah satu negara yang juga mengidolakan terbentuknya “manusia taqwa”, melalui proses pendidikan. Tujuan membentuk ‘manusia taqwa’ itu kemudian ditegaskan pada Tujuan Pendidikan Nasional, sebagaimana tercantum dalam UU No 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga disebutkan, bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, dan seterusnya.

Jadi, dalam tataran konstitusi dan perundang-undangan, ada konsensus nasional yang menempatkan “manusia taqwa” sebagai sosok manusia Indonesia ideal. Logisnya, kemudian pemerintah merumuskan dan menjabarkan

konsep “manusia taqwa” itu lebih terperinci dan operasional. Indah sekali jika kemudian pemerintah menetapkan: tujuan, kurikulum, program, dan evaluasi pendidikan ketaqwaan.

Begitu juga dalam program pembangunan nasional, harusnya dibuat indikator-indikator untuk menentukan apakah sasaran-sasaran pembangunan ketaqwaan itu mencapai hasil yang baik atau tidak. Pemerintah sepatutnya membuat indikator-indikator ketaqwaan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan. Inilah yang disebut sebagai pembangunan jiwa insan Indonesia, seperti ditegaskan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya!

Misalnya, dibuat indikator tingkat ketaatan beragama, seperti ketaatan shalat lima waktu, berpuasa, berzakat, shalat jamaah, mengaji al-Quran, cinta kebersihan, ke-disiplinan, dan sebagainya. Masing-masing agama bisa membuat indikator ketaatan beragama menurut agamanya masing-masing, dengan tetap menjaga keharmonisan hubungan di tengah masyarakat.

Jadi, sesuai UUD 1945, pendidikan nasional seharusnya menjadikan ciri-ciri manusia taqwa itu sebagai target pen-

capaian pendidikan. Penanaman keimanan, pembersihan jiwa (*tazkiyyatun nafs*), dan berbagai pelaksanaan ajaran agama, harus menjadi kurikulum inti dan secara otomatis juga dijadikan sebagai standar utama kelulusan siswa dan mahasiswa Muslim.

Maka, sesuai pasal 31 (3) tersebut, sebenarnya sudah tidak relevan lagi ada pemisahan antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam di Indonesia. Sebab, bagi umat Islam, satu-satunya jalan untuk membentuk manusia beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, pastilah melalui proses pendidikan. Itulah pendidikan Islam, yang juga sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

## Kurikulum Taqwa

Al-Quran menegaskan, bahwa bangsa yang mulia adalah bangsa yang bertaqwa. Bangsa yang bertaqwa adalah bangsa yang unggul; bangsa yang kuat, hebat, dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Itulah janji Allah SWT: “Andaikan penduduk suatu wilayah mau beriman dan bertaqwa, maka pasti akan Kami buka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (ajaran-ajaran Allah), maka Kami azab mereka, karena perbuatan mereka sendiri” (QS Al A’raf: 96).

Nabi Muhammad saw telah membuktikan, bahwa melalui proses pendidikan yang benar, beliau berhasil melahirkan satu generasi terbaik yang dalam waktu singkat mampu mengungguli peradaban-peradaban besar di dunia. Model pendidikan ini kemudian juga melahirkan generasi Shalahuddin al-Ayyubi, generasi Muhammad al-Fatih dan juga generasi 1945 di Indonesia, yang mampu memproklamasikan dan mempertahankan kemerdekaan RI. (Lebih jauh lihat, Adian Husaini, Pendidikan Islam: Mewujudkan Generasi Gemilang, Menuju Negara Adidaya 2045, Depok: YPI at-Taqlwa, 2018).

Dalam rangka mewujudkan terbentuknya masyarakat dan negara ideal-yakni masyarakat dan negara taqlwa-maka para pemimpin bangsa perlu merumuskan kriteria negara taqlwa itu seperti apa. Negara sepatutnya merumuskan indeks ketaqlwaan untuk mengukur kemajuan atau kesuksesan suatu pemerintahan, baik nasional maupun daerah.

Setelah itu, disusun kurikulum dan program kerja untuk menuju kepada negara ideal tersebut. Semua itu diperlukan, sebab untuk meraih segala bentuk kesuksesan, apalagi menjadi manusia mulia-yakni manusia taqlwa-dan mewujudkan negara taqlwa tentu saja memerlukan

perjuangan berat dan hebat. Jalan menuju ke sana mendaki dan tajam. Tetapi, waktu terus berjalan. Tidak ada pilihan, kecuali mendaki jalan yang terjal itu.

Kurikulum taqlwa itu berawal pada proses "*tazkiyatun nafs*", "*mujahadah `alan nafs*", berjihad melawan hawa nafsu, atau pengendalian diri. Dalam kaitan inilah, berbagai ibadah memiliki arti yang sangat penting, sebagai upaya latihan pengendalian diri. Sabda Rasulullah saw: "*al-Mujaahidu man jaahada nafsahu*". Bahwa, seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. (HR Tirmidzi, shahih menurut al-Iraqi).

Orang bertaqlwa pasti mulia. Sebab ia bukan orang yang malas, lemah semangat, pesimis, pendendam, pendengki, tetapi orang yang sabar, penyayang, dan pejuang yang tak kenal lelah dalam bekerja mengejar cita-cita. Nasehat bijak untuk menjadi orang bertaqlwa pernah ditorehkan oleh pujangga besar Raja Ali Haji, dalam "Gurindam Dua Belas":

*Barang siapa tiada memegang  
agama,  
sekali-kali tiada boleh  
dibilangkan nama.*

*Barang siapa mengenal yang empat,  
maka ia itulah orang yang ma'rifat*

*Barang siapa mengenal Allah,  
suruh dan tegahnya tiada ia menyalah.*

*Barang siapa mengenal diri,  
maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri.*

*Barang siapa mengenal dunia,  
tahulah ia barang yang teperdaya.*

*Barang siapa mengenal akhirat,  
tahulah ia dunia mudarat.*

*Barang siapa mengenal yang tersebut  
Tahulah ia makna takut"*

## Jangan munafik

Mengingat begitu tegasnya komitmen pembentukan manusia taqwa dalam UUD 1945, UU Pendidikan Nasional dan UU Pendidikan Tinggi, kaum muslim pasti meyakini, bahwa jika kurikulum taqwa itu dirumuskan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka insyaAllah dalam waktu tidak lama, Indonesia akan

menjelma menjadi negara taqwa; yakni satu negara mulia, negara yang lebih hebat dari Cina dan Amerika Serikat.

Tapi, agar semua kata-kata indah itu tidak sekedar cita-cita atau angan-angan, maka patut direnungkan peringatan Budaya-wan Mochtar Lubis yang pernah menyebut bahwa ciri manusia Indonesia yang paling utama adalah MUNAFIK; apa yang dikatakan berbeda dengan yang dikerjakan. Ciri manusia Indonesia lainnya adalah hobi membuat mantra dan semboyan.

Begini kata Mochtar Lubis, dalam pidato Kebudayaan di Taman Ismail Marzuki Jakarta tahun 1977: "Ciri keempat utama manusia Indonesia adalah manusia Indonesia masih percaya takhayul. Dulu, dan sekarang juga, masih ada yang demikian, manusia Indonesia percaya bahwa batu, gunung, pantai, sungai, danau, karang, pohon, patung, bangunan, keris, pisau, pedang, itu punya kekuatan gaib, keramat, dan manusia harus mengatur hubungan khusus dengan ini semua.

Tak berhenti sampai di situ. Berbagai mantra dan semboyan baru dibuat. Tapi itu hanya sebatas ucapan. Tidak dilaksanakan; laiknya, sebuah mantra.

Begitu tandas budayawan yang juga pemimpin redaksi koran Indonesia Raya tentang salah satu ciri manusia Indonesia itu. Tentu tidak semua manusia Indonesia berciri seperti gambaran Mochtar Lubis. Tapi, peringatan itu perlu kita renungkan. Sebab, tak bisa dimungkiri, terdapat jarak yang begitu jauh antara konsep ideal tujuan Pendidikan Nasional, dengan realitas produk pendidikan di lapangan.

Semua pakar pendidikan pastilah mafhum, bahwa tujuan pendidikan hanya bisa dicapai dengan kurikulum yang selaras dengan tujuannya. Kurikulum dijabarkan dalam program dan dievaluasi secara berkala. Kurikulum adalah lintasan; jalan menuju tujuan.

Mungkinkah manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan lahir dari kurikulum yang menolak untuk menjadikan wahyu Tuhan sebagai pedomannya? Manusia taqwa tak akan lahir jika wahyu Tuhan diletakkan lebih rendah nilainya ketimbang produk riset rasional-empiris. Berkah Allah SWT tidak akan dikucurkan jika para elit negara secara sistematis menggusur konsep ilmu dan keadilan Tuhan, sehingga menempatkan para penghibur lebih mulia daripada ulama. Pendidikan kita tak akan pernah melahirkan manusia-manusia taqwa jika

derajat ilmu sudah dinistakan menjadi pengabdian ketamakan kapitalisme.

Manusia taqwa-baca: manusia mulia-akan lahir dari rahim pendidikan yang menempatkan ilmu sebagai wahana mulia pengabdian kepada Yang Maha Kuasa. Kurikulum taqwa menempatkan ilmu secara adil dan beradab; dengan meletakkan pendidikan adab dan akhlak mulia sebagai basis pendidikan; menempatkan ilmu-ilmu wajib sebagai sentral; dilengkapi dengan ilmu-ilmu lain secara proporsional, mengikuti potensi murid dan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum taqwa menempatkan guru sebagai pejuang intelektual yang terhormat. Guru bukan berperan sebagai "tukang ngajar bayaran" yang diperlakukan seperti karyawan pemerintah atau buruh pabrik. Guru harus merdeka dan diberi ruang yang cukup untuk berkreasi. Guru yang sholeh, cerdas, berakhlak mulia, dan kreatif adalah kunci kemajuan pendidikan.

## Pentingnya adab

Pada bulan November 1928, di Majalah Wasita, Jilid I No.2, terbit artikel Ki Hajar Dewantara berjudul "Sistem Pondok dan Asrama Itulah Sistem Nasional". Menurut



Ki Hajar hakikat pesantren adalah terjadinya proses interaksi intensif antara kyai dan santri, sehingga terjadi proses pengajaran dan pendidikan.

"Mulai jaman dahulu hingga sekarang rakyat kita mempunyai rumah pengajaran yang juga menjadi rumah pendidikan, yaitu kalau sekarang "pondok pesantren", kalau jaman kabudan dinamakan "pawiyatan" atau "asrama". Ada pun sifatnya pesantren atau pondok dan asrama yaitu rumah kyai guru (Ki Hajar), yang dipakai buat pondokan santri-santri (cantrik-cantrik) dan buat rumah pengajaran juga. Di situ karena guru dan murid tiap-tiap hari, siang malam berkumpul jadi satu, maka pengajaran dengan sendiri selalu berhubungan dengan pendidikan," demikian kata Ki Hajar Dewantara (Lihat, buku Ki Hajar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, dan Sikap Merdeka (I, Pendidikan), Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, 2013, cetakan kelima, hlm. 370-371).

Dalam berbagai tulisannya, Ki Hajar Dewantara memang menekankan inti sari pendidikan sebagai proses penanaman adab dan kesusilaan. Ia mengemukakan keras Pendidikan model Barat yang hanya menekankan pada aspek

intelektualitas. Kata Ki Hajar Dewantara: "Mendidik berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak-anak kita, supaya mereka kelak menjadi manusia berpribadi yang beradab dan bersusila." (Ibid, hlm. 482).

Sedangkan "Pengajaran adab", menurut Ki Hajar Dewantara, bermaksud memberi macam-macam pengajaran, agar seutuhnya jiwa anak terdidik, bersama-sama dengan pendidikan jasmaninya. (Ibid, hlm, 467). Karena itu, hakikat "pendidikan" adalah: "menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya." (Ibid, hlm. 20).

Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, intisari pendidikan adalah penanaman adab untuk membentuk manusia yang berpribadi dan beradab, dan pondok pesantren merupakan sistem ideal yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan tersebut. Karena itu, sangatlah wajar jika pondok pesantren mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Ki Hajar mengkritisi sistem pendidikan Eropa yang sangat mengabaikan kecerdasan budi pekerti, hingga menimbulkan penyakit "intelektualisme", yakni mendewa-dewakan angan-angan.

Kata Ki Hajar Dewantara: "Semangat mendewa-dewakan angan-angan itu menimbulkan "kemurkaan diri" dan "kemurkaan benda"; kemurkaan diri dan kemurkaan benda, atau "individualisme" dan "materialisme" itulah yang menyebabkan hancurnya ketenteraman dan kedamaian di dalam hidupnya masyarakat." (Ibid, hlm. 149).

Dalam tulisannya yang lain, Ki Hajar Dewantara menyatakan: "Pendidikan yang selama ini diterima orang Indonesia dari Barat jauh dari kebal terhadap pengaruh-pengaruh politik kolonial; singkatnya, ialah pendidikan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial; dan ini sifatnya tetap semenjak zaman VOC meskipun di bawah politik etika.

Tetapi anehnya, banyak priyayi atau kaum bangsawan yang senang dan menerima model pendidikan seperti ini dan mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah yang hanya mengembangkan intelektual dan fisik dan semata-mata hanya memberikan surat ijazah yang hanya memungkinkan mereka menjadi buruh."

Masih lanjutan pernyataan Ki Hajar Dewantara tentang bahaya model Pendidikan Barat: "Pendidikan dalam semangat kolonial

telah mencegah terciptanya masyarakat sosial mandiri dan merdeka lahir batin, hanya menghasilkan suatu kehidupan yang tergantung kepada bangsa-bangsa Barat. Keadaan ini tidak mungkin hanya diselesaikan dengan konfrontasi fisik melalui gerakan-gerakan politik, tapi memerlukan bibit-bibit gaya hidup yang merdeka, ditanamkan dalam jiwa rakyat melalui sistem pendidikan untuk seluruh rakyat, yakni sistem pendidikan nasional."

Pentingnya penanaman adab dan akhlak dalam proses pendidikan inilah yang juga telah ditekankan para ulama dan tokoh-tokoh pendidikan Islam di Indonesia. KH Hasyim Asy'ari menjelaskan lebih mendalam dan sistematis masalah ini dalam kitabnya, *Ādabul 'Ālim wal-Muta'allim*. Meskipun tidak menulis kitab khusus tentang adab, pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan, misalnya, dikenal memiliki adab yang tinggi dalam mendidik para muridnya. Selain memberikan teladan, beliau juga tak henti-hentinya memberikan motivasi dan inspirasi dalam perjuangan. Sampai-sampai Bung Karno mengakui, ketika berusia 15 tahun, beliau sudah "*menginthal* Kyai Dahlan".

Tokoh Persatuan Islam (Persis), A. Hassan pun, sangat menekan-

kan adab guru-murid dalam pendidikannya.

Ia menulis buku berjudul "Kesopanan Tinggi", dan juga diktat berjudul "Hai Poetrakoe!" (tahun 1946). Raja Ali Haji menggubah pentingnya masalah adab dan akhlak ini dalam Gurindam 12. Dan sebagainya.

Dalam kitab *Ādabul 'Ālim wal-Muta'allim*, Kyai Hasyim Asy'ari menuliskan rumus: "Siapa yang tidak mempunyai adab, sejatinya ia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid." (Hasyim Asy'ari, *Ādabul Ālim wal-Muta'allim*, Jombang: Maktabah Turats Islamiy, 1415 H).

Jadi, sebenarnya para tokoh bangsa ini sudah merusmuskan konsep pendidikan yang bertumpu pada pendidikan jiwa insan, agar mereka menjadi insan mulia, insan bertaqwa, dan insan merdeka. Jika konsep pendidikan semacam ini yang diterapkan, pastilah bangsa kita akan menjadi bangsa mulia, negara kita menjadi negara adidaya. Secara teologis dan empiris, konsep ini sudah terbukti dalam sejarah. Dan Allah SWT memberikan panduan: "Sungguh memang orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh binasa orang yang mengotori jiwanya." (QS 91:9-10). [ ]



Kaligrafi Surat Al-Baqarah ayat 255 atau lazim disebut Ayat Kursi. Gambar diambil dari [kisspng-quran-al-baqara-255-islam-surah.com](http://kisspng-quran-al-baqara-255-islam-surah.com)

## Menjadikan Pancasila Sakti



**Yudi Latif**

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang mestinya dikuasai oleh negara, jatuh ke tangan penguasaan orang seorang dan modal asing, menjadikan rakyat banyak sebagai tindasan segelintir orang kuat..."

-----

Krisis yang melanda bangsa ini telah menyerang segala jaringan pembuluh darah dan menembus kedalaman jantung kehidupan. Usaha menyembuhkannya tak cukup dengan rutinitas penyelenggaraan demokrasi prosedural. Harus dilakukan pembedahan mendasar untuk menyapukan biang penyakit hingga ke akar-akarnya yang terdalam.

Pada garis besarnya, pemerintahan negara belum mampu

menunaikan kewajibannya untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Pada basis material, perwujudan masyarakat adil dan makmur tercegat oleh pendalaman dan perluasan penetrasi kapitalisme predatoris. Usaha bersama yang berlandaskan semangat tolong-menolong, bergotong royong (kooperasi) tertikam oleh usaha perseorangan yang saling mematikan. Kemakmuran masyarakat disisihkan oleh kemakmuran orang seorang. Kesenjangan sosial melebar, menjauh dari cita-cita keadilan sosial.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang mestinya dikuasai oleh negara, jatuh ke tangan penguasaan orang seorang dan modal asing, menjadikan rakyat banyak sebagai tindasan segelintir orang kuat.

Begitu pun bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat, yang seharusnya dikuasai oleh negara

untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, semakin dikuasai oleh orang seorang bagi sebesar-besar kemakmuran segolongan kecil dan orang asing. Perampasan dan perusakan sumber daya alam oleh pemodal kuat terjadi secara sistematis, massif dan terstruktur, menyisakan malapetaka ekologis, ketidakadilan, dan keterancaman kesinambungan pembangunan.

Pada langit mental, semangat ketuhanan yang mestinya menjadi bantalan etis, etos dan welas asih terdangkalkan oleh formalisme dan egoisme kegunaan. Kemanusiaan yang mestinya mengarah pada kemerdekaan, kemandirian, persaudaraan manusia, terlumpuhkan oleh individualisme, materialisme dan hedonisme, keserakahan menimbun, gila status dan kekuasaan. Keragaman yang mestinya memberi wahana saling mengenal, saling menghormati, saling belajar, saling menyempurnakan, serta saling berbagi dan melayani untuk menguatkan persatuan, justru menjadi wahana saling menyangkal, saling mengucilkan, saling meniadakan yang mengarah pada kelumpuhan dan kehancuran bersama.

Pada ranah politik—sebagai agen perantara dalam perubahan sistem sosial—konsentrasi kekua-

tan nasional bagi transformasi ranah material dan mental menuju perwujudan masyarakat Pancasila yang berkekeluargaan dan berkeadilan, tercabik oleh pengadopsian model demokrasi yang tidak selaras dengan dasar falsafah dan kepribadian bangsa.

Perwujudan demokrasi permusyawaratan sebagai wahana penguatan negara persatuan (yang mengatasi paham perseorangan dan golongan) dan negara kesejahteraan (yang berorientasi keadilan sosial), tercegat oleh hambatan-hambatan kultural, institusional, dan struktural.

Pada tingkat kultural, politik sebagai teknik mengalami kemajuan; tetapi politik sebagai etik mengalami kemunduran. Perangkat keras—prosedur demokrasinya—terlihat relatif lebih demokratis; namun perangkat lunak—budaya demokrasinya—masih tetap nepotisfeodalistis; pemerintahan demokratis tidak diikuti oleh meritokrasi (pemerintahan orang-orang berprestasi), malahan sebaliknya cenderung diikuti mediokrasi (pemerintahan orang sedang-sedang saja); perluasan partisipasi politik beriringan dengan perluasan partisipasi korupsi.

Pada tingkat institusional, desain institusi demokrasi terlalu mene-

kankan pada kekuatan alokatif (sumber dana), ketimbang kekuatan otoritatif (kapasitas manusia). Demokrasi padat modal melambungkan biaya kekuasaan, mengakibatkan perekonomian biaya tinggi (*high cost economy*), dan merebakkan korupsi. Demokrasi yang ingin memperkuat daulat rakyat justru memperkuat segelintir orang; demokrasi yang ingin memperkuat cita-cita republikanisme dan nasionalisme kewargaan (*civic nationalism*) justru menyuburkan tribalisme dan provinsialisme (putra daerahisme). Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan (*disengagement*), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat.

Pada tingkat struktural, kecenderungan untuk mengadopsi model-model demokrasi "liberal" tanpa menyesuaikannya secara seksama dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, justru dapat melemahkan demokrasi.

Sementara demokrasi menghendaki derajat kesetaraan dan kesejahteraan, pilihan desain demokrasi kita justru seringkali memperlebar ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Situasi ini kian memburuk dengan menguatnya penetrasi neoliberalisme yang

memperkuat individualisme dan memaksakan relasi pasar dalam segala bidang kehidupan. Kekuatan demokrasi perwakilan menjadi lumpuh ketika kepentingan minoritas pemodal lebih aktif dan ampuh mengendalikan politik daripada institusi-institusi publik.

Demokrasi tidak lagi menjadi sarana efektif bagi kekuatan kolektif untuk mengendalikan kepentingan perseorangan, malahan berbalik arah menjadi sarana efektif bagi kepentingan perseorangan untuk mengontrol institusi dan kebijakan publik; *res publica* (urusan umum) tunduk di bawah kendali *res privata* (urusan privat).

Dengan demikian, yang kita dapati di seberang jembatan emas kemerdekaan adalah jalan bercabang dua. Jalan yang satu adalah jalan mulus bagi segelintir orang yang hidup berkelimpahan; sama dapat, sama bahagia; sedang jalan yang satu lagi adalah jalan terjal bagi kebanyakan orang yang hidup berkekurangan; sama ratap, sama sengsara.

Semangat persaudaraan kebangsaan sejati hancur. Warga berlomba mengkhianati negara dan sesamanya; rasa saling percaya pudar karena sumpah dan keimanan disalahgunakan; hukum dan institusi lumpuh tak

mampu meredam penyalahgunaan kekuasaan; ketamakan dan hasrat meraih kehormatan rendah merajalela. Semuanya berujung pada kegelapan dan kebiadaban: kebaikan dimusuhi, kejahatan diagungkan.

Alhasil, setelah 74 tahun Indonesia merdeka, keberadaan Pancasila—sebagai titik temu, titik tumpu dan titik tuju kehidupan berbangsa dan bernegara—ibarat kitab suci dengan kertas yang rombeng. Dibuang takut kuwalat, dipakai tak lagi terbaca.

Terlalu lama terpajang sebagai hiasan seremonial, tanpa ketekunan perawatan, membuat Pancasila mengalami pelapukan. Untuk menghentikan proses degenerasi, cara melestarikan Pancasila harus keluar dari tendensi formalisme verbalistik menuju efektivitas operatif.

Apabila Pancasila dikehendaki kesaktiannya, kita perlu melakukan perubahan sikap kejiwaan (*mindset*), dengan meletakkan Pancasila dalam konteks perjuangan patriotisme yang lebih positif-progresif. Pengalaman marginalisasi, diskriminasi dan eksploitasi memang pantas disejati dan dimusuhi. Namun, manusia tidaklah hidup sekadar untuk memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan yang positif, untuk menghadirkan kebaikan.

Kebiasaan kita untuk mengutuk masa lalu dengan mengulanginya, bukan dengan melampauinya, membuat perilaku politik Indonesia tak pernah melampaui fase kekanak-kanakannya (*regressive politics*).

Melampaui masa lalu diperlukan konsepsi patriotisme yang lebih progresif. Patriotisme yang tidak cuma bersandar pada apa yang bisa dilawan, melainkan juga pada apa yang bisa ditawarkan. Proyek historisnya bukan hanya menjebol, melainkan juga membangun, memperbaiki keadaan negeri.

Meletakkan Pancasila dalam konteks patriotisme progresif menuntut pembumian nilai dan visi Pancasila secara efektif dalam tiga ranah peradaban: ranah tana nilai, tata kelola dan tata sejahtera; bersamaan dengan penguatan Pancasila pada tiga dimensi ideologi: keyakinan, pengetahuan, dan tindakan.

## Tata nilai

Untuk dapat berkembang hebat, peradaban suatu bangsa harus tumbuh di atas landasan nilai. Meminjam ungkapan John Gardner, "Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang

dipercayainya itu tidak mengandung dimensi nilai moral guna menopang peradaban besar.”

Nilai itu cahaya petunjuk yang menerangi jalan menuju tujuan. Tanpa tuntunan nilai, sehebat apapun pembangunan fisik, kecerdasan dan keterampilan yang kita kerahkan tidaklah memberi nilai tambah yang signifikan, karena bisa tersesat di banyak tikungan.

Sebagai nilai inti moral publik, Pancasila bukanlah bahan hafalan, melainkan nilai hidup yang harus dialami dan dijalani penuh integritas, dengan menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan; antara keyakinan, pengetahuan, kebijakan dan tindakan.

Tata nilai Pancasila diarahkan untuk menjadikan bangsa yang berkepribadian (berkarakter) dengan nilai utamanya berlandaskan sila pertama, kedua, dan ketiga. Bahwa kehendak untuk bersatu dan harmoni dalam perbedaan bisa diraih manakala kita mampu mengembangkan hubungan welas asih dengan “Yang Mahasuci”, yang memancarkan semangat ketuhanan yang berkebudayaan, lapang dan toleran; welas asih dengan sesama manusia, yang memancarkan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab; welas asih

dalam hubungan manusia dengan ruang hidup (tanah air) dan pergaulan hidupnya (kebangsaan), yang memancarkan semangat persatuan dalam keragaman bangsa. Dengan *spirit* Ketuhanan, kemanusiaan dan persatuan, dikembangkan daya-daya spiritualitas dalam sosialitas yang berperikemanusiaan, egaliter, mandiri, amanah (berintegritas), beretos kerja yang positif dan kreatif, serta sanggup menjalin persatuan (gotong-royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).

Pemangku utama yang mengembangkan urusan tata nilai ini adalah komunitas. Nilai Pancasila yang semula digali dari nilai-nilai hidup yang tumbuh di berbagai komunitas Tanah Air, sudah sepanasnya dikembalikan ke komunitas sebagai perawat utamanya. Ada sejumlah komunitas inti pembudayaan nilai Pancasila: komunitas sekolah, komunitas agama, komunitas pemukiman, komunitas kerja, komunitas media, komunitas Orpol dan Ormas, serta komunitas adat-budaya. Setiap komunitas tersebut memiliki titik tekan dan pendekatannya tersendiri dalam membudayakan nilai Pancasila, namun secara keseluruhan membentuk rantai nilai Pancasila secara holistik dan integral.



Dengan dikembalikan ke komunitas, lembaga-lembaga negara (non-persekolahan), ketimbang sibuk mengurus sosialisasi Pancasila kepada masyarakat sebagai pemborosan sumber daya yang tidak efektif, lebih baik mengurus pembudayaan nilai di lingkungan komunitas kerjanya sendiri (penyelenggara negara). Hal itu sesuai dengan tuntunan pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. "Negara berdasar atas keTuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, undang-undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur."

Alhasil, sebelum mempancasilakan masyarakat, penyelenggara negara harus terlebih dahulu mempancasilakan dirinya sendiri. Perlu diingat, pejabat dan aparatur negara tidak selalu punya kredibilitas dan kewibawaan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada masyarakat. Terlebih dalam kondisi kemarau moral di lingkungan penyelenggara negara, yang diperlukan malah pembalikan peran. Justru tokoh-tokoh panutan masyarakatlah yang pantas menanamkan

nilai Pancasila kepada penyelenggara negara.

Adapun lembaga-lembaga negara dengan tugas pembinaan nilai kebangsaan, dalam menjalankan tugasnya harus bekerjasama dengan komunitas-komunitas tadi sesuai dengan kelompok sasaran. Tugas paling penting yang bisa dikerjakan lembaga-lembaga negara tersebut adalah membuat kerangka regulasi, pedoman dasar, fasilitasi, pengukuran dan *monitoring*, agar pembudayaan nilai yang dilakukan berbagai komunitas tadi memiliki irisan persamaann, koherensi dan jaminan mutu, sehingga secara serempak bisa memenuhi sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

## Tata kelola

Setelah basis nilai diperkuat, peradaban suatu bangsa hanya bisa dimajukan dengan ketepatan tata kelola. Daren Acemoglu dan James A. Robinson, dalam bukunya, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty* (2012), menengarai bahwa sebab pokok kegagalan suatu negara-bangsa bukan karena kurang adidaya atau sumberdaya, melainkan karena salah urus, alias salah desain

kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Tata kelola sosial-politik Pancasila diarahkan untuk menjadi bangsa yang berdaulat dengan nilai utamanya berlandaskan sila keempat. Bahwa tatanan sosial-politik hendak dibangun melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan); yang termanifestasi dalam kehadiran pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan.

Pemangku utama dalam urusan tata kelola pemerintahan ini adalah lembaga-lembaga kenegaraan. Adapun prioritas lembaga tersebut sebagai rezim politik kebijakan adalah menata ulang sistem demokrasi dan pemerintahan dalam kerangka memperkuat persatuan nasional dan keadilan sosial. Untuk itu, berbagai desain institusi demokrasi dan pemerintahan harus

ditinjau ulang. Praktik politik tidak dibiarkan sekadar perjuangan kuasa demi kuasa, namun harus mengemban substansi politik dalam rangka menghadirkan berbagai kebijakan yang andal demi memenuhi visi dan misi negara. Kebijakan politik harus merespons tantangan perbaikan tata kelola mental-kultural (tata nilai), tata kelola sumberdaya material (tata kesejahteraan), serta tata kelola demokrasi dan pemerintahan.

Dalam kaitan dengan tata kelola demokrasi dan pemerintahan, berbagai elemen krusial harus mendapat perhatian yang serius. Beberapa diantaranya menyangkut penataan sistem hukum dan pemulihan kewibawaan otoritas hukum (nomokrasi) yang dapat menopang kesehatan demokrasi, persoalan institusi pemilihan yang padat modal, penataan ulang otonomi daerah, urgensi kehadiran pedoman direktif (haluan pembangunan) yang lebih solid, persoalan tumpang-tindih kewenangan insituti-institusi negara, terlalu luasnya cakupan kelembagaan negara karena kehadiran beragam komisi negara serta pentingnya perampingan birokrasi negara untuk menghindari jebakan negara pegawai, urgensi pembenahan sistem perwakilan yang lebih inklusif dan representatif dengan kesanggupan mengak-

omodasi segala kekuatan sosial-politik, serta pentingnya memperbaiki rezim negara kesejahteraan yang bersemangat gotong-royong.

## Tata sejahtera

Pada akhirnya, peradaban maju ditentukan oleh kesanggupannya mengolah sumber daya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Dalam kaitan itu, setiap ideologi harus memiliki kerangka konseptual dan kerangka operatif tentang perwujudan masyarakat sejahtera yang diimpikan.

Pengembangan tata sejahtera diarahkan untuk menjadi bangsa yang mandiri dan berkesejahteraan umum dengan nilai utamanya berlandaskan sila kelima. Bahwa kemandirian dan kesejahteraan umum hendak diraih dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat koperatif), disertai penguasaan negara atas “karunia kekayaan bersama” (*commonwealth*) serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas karunia yang terberikan dengan input pengetahuan dan teknologi.

Pemangku utama dalam urusan tata sejahtera ini adalah dunia usaha dan rezim perekonomian, dengan prioritas utamanya mengembangkan perekonomian berbasis semangat tolong-menolong (kooperatif).

Dengan semangat itu, politik anggaran harus lebih berorientasi pada kesejahteraan umum. Kemampuan negara untuk menguasai dan mengelola kekayaan bersama (*commonweath*) serta cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus disehtakan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir jangan sampai terkonsentrasi di satu tangan. Kemakmuran dan pemerataan ekonomi bisa didorong melalui pengembangan kewirausahaan dengan penguasaan teknologi dan terobosan inovatif.

Untuk mengatasi jebakan kelas menengah bawah dan defisit neraca perdagangan, Indonesia harus mentransformasikan diri dari perekonomian berbasis ekstraktif, pertanian tradisional, dan manufaktur konvensional menuju ekonomi berbasis industri (*knowledge economy*).

Ukuran yang berkaitan dengan *total factor productivity* dan *knowledge economy index* menunjukan betapa rendahnya kontribusi nilai tambah Iptek dan

tingkat inovasi Indonesia bagi pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan pengembangan teknologi dan industri kita bisa belajar dari bangsa lain, tetapi tidak perlu sama. Kita bisa memberikan prioritas pada pengembangan Iptek yang bisa memberi nilai tambah terhadap *comparative advantage* (kekhasan potensi) Indonesia. Lautan yang luas, menunggu sentuhan pengembangan teknologi dan industri kemaritiman. Tanah yang relatif subur, perlu bioteknologi dan agroindustri. Negeri yang indah perlu teknologi dan industri kepariwisataan. Jiwa estetik yang kuat, perlu teknologi dan industri kesenian. Kekayaan sumber energi terbarukan perlu pengembangan teknologi dan industri energi alternatif, dan seterusnya.

Dengan prioritas pengembangan teknologi dan industri seperti itu, lembaga pendidikan dan riset bisa menentukan area prioritas apa dan jenis SDM seperti apa yang menjadi prioritas pengembangan. Selain itu, keterkaitan antara aktivitas riset dengan dunia usaha juga perlu diperkuat.

Problem riset Indonesia terlalu memusat pada lembaga riset negara. Kurang ada terobosan untuk membawa aktivitas dan hasil riset ke jantung masyarakat. Bagaimana pun juga, riset

inovatif itu harus sampai ke pasar. Oleh karena itu, kegiatan riset mestinya menjadi bagian organik dari dunia usaha. Kebijakan yang harus ditempuh bukan dengan jalan terus menambah birokrasi baru lembaga riset negara, melainkan harus mendorong pembudayaan riset-inovasi di dunia usaha, dengan berbagai kerangka kebijakan fiskal (insentif pajak dan permodalan).

Di Amerika, misalnya, anak-anak muda cemerlang dengan ide-ide teknologi inovatif bisa membangun *start-up* dengan pinjaman modal ventura. Memang tidak semua berhasil; tetapi selalu ada beberapa yang sukses mengembangkan perusahaan berbasis pengetahuan berskala global, seperti microsoft, apple, facebook, dan lain-lain.

Berkaca dari pengalaman negara-negara yang berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi negara makmur, seperti negara-negara Asia Timur, bisa ditarik kesimpulan bahwa lokomotif kemakmuran itu terletak pada usahawan inovator yang berhasil mengembangkan inovasi yang dapat menciptakan pasar baru (*market-creating innovation*).

Usahawan inovator mengambil inisiatif memantik api terobosan

inovatif, lalu pemerintah memperbesar bara api inovasi itu dengan memberikan dukungan kerangka regulasi, kebijakan dan infrastruktur yang diperlukan usahawan inovator dalam kerangka penciptaan pasar baru (baik lokal maupun global) yang dapat melambungkan kemakmuran bangsa.

## Pembudayaan dimensi ideologi

Selain persoalan ruang lingkup pembumian di tiga ranah peradaban, kemanjuran pembudayaan Pancasila juga memerlukan proses aktualisasi tiga dimensi ideologi: keyakinan, pengetahuan dan tindakan.

Tantangan pertama dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana meyakinkan segenap warga negara bahwa nilai-nilai ideologi Pancasila itu cocok, relevan dan ampuh sebagai titik temu, titik tumpu dan titik tuju dalam kehidupan kebangsaan yang majemuk. Dalam urusan keyakinan ini, seperti dalam keyakinan keagamaan, bahwa kendati tidak ada seorang pun di antara pemeluk agama (yang masih hidup), yang sudah memasuki sorga atau pun neraka, namun mereka yakin bahwa sorga dan neraka itu ada.

Meyakinkan pemeluk agama akan adanya sorga dan neraka itu tidak mengandalkan penjelasan-penjelasan rasional, melainkan oleh pendekatan-pendekatan emotif (penghayatan) dengan mengandalkan daya paku dan daya imajinasi dari kekuatan “mitos” (dalam arti positif). Pemupukan keyakinan dengan kekuatan mitos itu menggabungkan antara kekuatan narasi (kisah), daya-daya estetik, permainan, ritual dan simbol.

Pengaruh kisah (sejarah, sastra dan film) terhadap kehidupan tak bisa diremehkan. Tokoh-tokoh dalam karya fiksi kerap kali mempengaruhi hidup, standar moral masyarakat, mengobarkan revolusi, dan bahkan merubah dunia. Dalam konteks pembentukan nasionalisme Indonesia sendiri, Bung Karno pernah menunjukkan secara canggih bagaimana mengembangkan berbagai mitos integrasi nasional dengan menautkan keindonesiaan dengan epos kebesaran Majapahit dan Sriwijaya. Dia juga acap kali mencuplik kisah-kisah pewayangan sebagai sumber teladan dalam menumbuhkan keyakinan kepada rakyatnya akan kemampuan bangsa Indonesia melalui berbagai tantangan.

Dimensi estetik dan simbolik dalam menumbuhkan keyakinan terhadap Pancasila itu kian

penting dalam menjawab pertumbuhan generasi milineal. Suatu generasi yang lebih terbiasa menafsir dan merespon realitas melalui sarana-sarana simbolik dan ikonik. Dan Indonesia dengan kekayaan kulturalnya yang luar biasa bisa menjadi tambang emas untuk mengembangkan berbagai mitos berbasis ekspresi simbolik, estetik dan permainan dalam menumbuhkan dimensi keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Tantangan kedua dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana menjelaskan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan keilmuan secara multidisiplin, antar disiplin dan transdisiplin. Tujuannya agar setiap warga negara memahami keluasan dan kedalaman wawasan Pancasila serta konsekuensi-konsekuensi turutannya ke dalam berbagai bentuk pranata dan lembaga sosial. Dalam kaitan ini, Pancasila juga harus mewarnai segala aspek pendidikan kewargaan.

Berbagai teori bisa digunakan untuk menjelaskan perspektif Pancasila mengenai hubungan manusia dengan kosmos, agama dan negara, hak-hak asasi manusia, konsepsi kebangsaan, demokrasi, sistem hukum nasional, keadilan sosial-ekonomi dan Seterusnya. Dalam usaha

ini, selain kita harus menggali khasanah pengetahuan-kearifan bangsa sendiri, perlu juga dilakukan berbagai studi komparatif dengan pengalaman sejenis di negara-negara lain, karena bagaimana pun juga nilai-nilai Pancasila memiliki dimensi-dimensi yang bersifat universal.

Tantangan ketiga dalam pembudayaan Pancasila adalah bagaimana mendorong warga negara (khususnya peserta didik) untuk dapat mengembangkan laku hidup berdasarkan nilai dan konsepsi Pancasila.

Pancasila tidak berhenti sekadar butir-butir hafalan, melainkan menjelma menjadi karakter yang mendarah-daging dalam perilaku warga dalam kehidupan publik. Selama ini, banyak guru mengajarkan pendidikan moral Pancasila seperti dokter yang memberi resep kepada orang sakit. Namun, petunjuk resep itu tak diamalkan oleh sang pasien dengan meminum obatnya; bahkan berusaha membeli obatnya pun tak sudi. Pendidikan karakter adalah ilmu amal (terapan) yang tidak diberikan kecuali untuk diamalkan. Guru mendidik (membudayakan) karakter dengan praktik keteladanan, murid mempelajari ilmu itu dengan mempraktikkan langsung laku terpuji. Pembelajaran Pancasila bisa dilakukan dengan

membentuk kelompok-kelompok terbatas yang terdiri dari ragam identitas, lalu mendorong mereka untuk mengembangkan berbagai kegiatan dalam rangka pengamalan langsung sila-sila Pancasila.

## Menguatkan titik temu

*Last but not least*, usaha membudayakan Pancasila itu memerlukan terang kesadaran tentang dasar ontologis Pancasila. Pada 1 Juni 1945, dalam mengawali uraiannya tentang dasar negara, Soekarno menyerukan “bahwa kita harus men-cari persetujuan, mencari persetujuan faham”. Lantas ia katakan, “Kita bersama-sama mencari persatuan Philosophische grondslag, mencari satu ‘Weltanschauung’ yang kita semuanya setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hadjar setuju, yang saudara Sanoesi setuju, yang saudara Abikoesno setuju, yang saudara Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita semua mencari satu modus.”

Demikianlah, dasar ontologis (struktur makna terdalam) dari

keberadaan Pancasila adalah kehendak mencari “persetujuan” dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan bersama (*al-masalahah al-ammah, bonnum comune*) dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang mejemuk.

Maka dari itu, setiap kali Pancasila disebut, setiap kali itu pula kita diingatkan untuk kembali menghayati struktur makna terdalam dari keberadaan Pancasila. Kembali mempertanyakan titik temu, titik tumpu, dan titik tuju kita bersama, di tengah kemungkinan keterpecahan, kerapuhan landasan, dan disorientasi.

Dalam kerangka mengupayakan titik-titik persetujuan itu, kita harus mengupayakan demokrasi yang tidak berhenti sekadar ritual perebutan kekuasaan lima tahunan dengan obsesi kemenangan sebatas mempercundangi lawan. Kita harus mengembangkan demokrasi yang bisa memenangkan dan membahagiakan seluruh bangsa Indonesia, dengan meletakkannya dalam kerangka perwujudan cita-cita nasional: menjadi bangsa merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. []

## Nasib Umat Islam di 100 Tahun Kedua



**Fachry Ali**

"Dan jika model gerakan 1912 melahirkan efek samping rangka dasar kemasyarakatan tingkat bangsa "Indonesia", gerakan umat Islam dewasa ini cenderung melahirkan perselisihan justru di dalam lingkup negara-bangsa Indonesia."

-----

### I

Setelah membaca dengan lebih cermat judul yang diminta pada malam 1 September 2019—tenggat waktu janji saya untuk mulai menulis—saya segera menelpon Darmawan Sepriyossa. Mengapa? Karena ketika pesan permintaan menulis yang diterima pada 7 Agustus 2019, saya tidak menyimak judul tulisan yang dimohonkan. Telepon yang saya buat sebulan setelah itu

bertujuan menyatakan keterkejutan bahwa ternyata kewajiban yang dibebankan kepada saya (untuk menulis dengan tema itu) sangat berat: "Nasib Umat Islam di 100 Tahun Kedua". Siapapun juga akan mengatakan bahwa penulisan dengan tema ini memerlukan waktu yang panjang dan, di atas itu, penelitian mendalam. "Untung"-nya (atau sayangnya?), Darmawan tidak mengangkat telepon saya. Ini membuat rasa "terbebaskan" secara psikologis atas tugas ini bisa saya elakan, walau secara substansial tak hilang sama sekali.

Mengapa secara substansial tak hilang sama sekali? Karena, untuk memberikan jawaban sederhana, sumbangan tulisan saya tentang tema itu tak akan mencapai maksud ideal seperti diharapkan "peminta". Akan tetapi, telah diperkirakan bahwa justru saya sendiri secara konseptual tak akan puas dengan tulisan yang saya buat sendiri ini. Mengapa tulisan ini tetap saya lanjutkan adalah semata-mata karena telah terlanjur menyanggupi di tengah-tengah waktu yang begitu sempit.

### II

Masalah yang segera saya hadapi adalah bukan hadangan perta-



nyaan tentang bagaimana umat Islam 100 tahun ke depan. Melainkan, apa definisi konseptual “umat Islam” itu sendiri. Pada hemat saya, dengan menemukan definisi tersebut, usaha mengeksplorasi perkembangan ke depan tentang nasib apa yang disebut “umat Islam” (sampai dengan pembahasan tentang definisinya, saya menggunakan dua tanda petik ketika menulis umat Islam), relatif bisa dipetakan. Sebab, dengan itu, ancap-ancang konseptual bisa digelar dan daya penjelasan (*explanation*) dapat diteguhkan.

Maka, dengan mengambil risiko *debatable*, izinkan saya memberikan definisi “umat Islam” secara lebih spesifik yang dengan itu usaha eksplorasi bisa dilanjutkan. Yaitu bahwa apa yang dimaksudkan dengan “umat Islam” adalah pribadi-pribadi atau golongan-golongan Muslimin yang mempersepsikan diri sebagai aktor. Dengan persepsi semacam ini, baik secara pribadi maupun bergolongan, “umat Islam” yang dimaksud mempunyai keprihatinan terhadap nasib Islam, sebagai agama.

Keprihatinan ini bukan saja mendorong aktor-aktor ini memperjuangkan “Islam” ke arah yang lebih baik (di dalam persepsi mereka), melainkan

juga merasa bahwa mencapai pengetahuan dan kemampuan tertentu menjadi dibutuhkan guna memenuhi misi tersebut.

Apa yang dimaksudkan dengan pengetahuan dan kemampuan di atas adalah, selain ilmu agama, kontrol terhadap informasi, alam pemikiran dan perkembangan sosial-politik dan ekonomi bukan saja terbatas pada wilayah atau tempat di mana berartikulasi (yaitu negara-bangsa). Melainkan, juga perkembangan informasi, alam pemikiran sosial-politik dan ekonomi yang berkembang pada tingkat global.

Sementara pengetahuan dan kemampuan pada tingkat negara-bangsa dibutuhkan agar mempertajam langkah-langkah rencana dan penerapannya, hal-hal yang sama pada tingkat global dibutuhkan dengan alasan imajinasi sosiologis (*sociological imagination*). Bahwa apa yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan tingkat negara-bangsa adalah efek gaung balik dari yang terjadi pada tingkat global. Karena itu, tak ada satupun alasan bagi “umat Islam” (dalam definisi ini) dengan sengaja mengabaikan kedua perkembangan di atas.

Maka, jika ingin diringkas, apa yang dimaksudkan dengan “umat Islam” di dalam tulisan ini adalah aktor baik secara pribadi maupun

golongan yang cenderung tak puas terhadap kenyataan "Islam" (sebagai agama) yang berkembang di sekitarnya. Ketakpuasan ini mendorong "umat Islam" menggelar aktivitas untuk "mencapai sesuatu yang lebih ideal" bagi "Islam" sesuai dengan persepsi mereka. Contoh sederhana adalah tujuan Mathla'ul Anwar. Lembaga pendidikan yang lahir di Banten pada 1916 ini "menjadikan ajaran Islam menjadi dasar hidup individu dan masyarakat."

Sifat dan status sebagai aktor telah dengan sendirinya mentransformasikan diri mereka sebagai aktivis baik dalam konteks pemikiran maupun "aksi-aksi" organisasi. Kedua hal terakhir ini tak bisa dipisahkan. Sementara aktivitas pemikiran dibutuhkan untuk menafsirkan realitas, "aksi-aksi" organisasi dianggap sebagai usaha kongkret mewujudkan kenyataan yang dihasilkan dari penafsiran tersebut.

### III

Dengan bertelekan sepenuhnya kepada definisi di atas, maka apa yang kita maksudkan dengan umat Islam (kini tidak lagi dalam tanda petik) itu adalah mereka yang mengartikulasikan diri pasca aktivitas lembaga-lembaga

pendidikan Islam (dayah-untuk Aceh, pesantren, untuk Jawa) dan organisasi-organisasi sosial-politik dan ekonomi berbasis keagamaan yang tumbuh sejak 1912.

Tak ingin terlalu ketat menggunakan kaidah sejarah, izinkan saya mengatakan bahwa kelahiran 100 (seratus) tahun pertama umat Islam, dalam pengertian definisi di atas, terjadi pada 1912. Alasannya sederhana. Sementara aktivis lembaga-lembaga pendidikan melanjutkan tugasnya, pada tahun itu telah berdiri dua perserikatan Islam yang, dalam konteks sejarah kesadaran, bersifat *decisive*: Muhammadiyah dan Sarekat Islam (SI). Sementara lembaga-lembaga pendidikan Islam secara kontinue mereproduksi kalangan terpelajar Islam, Muhammadiyah dan SI memperkaya daya ekspansinya dengan mengakomodasikan kalangan terpelajar itu.

Maka, secara langsung atau tidak, terdapat hubungan simbiosis antara lembaga-lembaga pendidikan itu dengan organisasi sosial-ekonomi dalam politik Umat Islam. Baik Muhammadiyah maupun SI berfungsi sebagai wadah mengartikulasikan diri dalam gerakan bersifat kekotaan umat Islam, lembaga-lembaga pendidikan secara terus-menerus memasok

sumberdaya manusia. Ingar-bingar politik-ekonomi dan sosial budaya tingkat “nasional” yang terjadi dalam dekade-dekade awal abad ke-20 lebih berasal dari hubungan simbiosis lembaga-lembaga pendidikan dan Muhammadiyah-SI ini.

Apa yang terpenting dicatat di sini adalah bahwa simbiosis “tak terencana” ini telah menjadi model gerakan umat Islam untuk beberapa dekade berikutnya hingga di penghujung abad ke-20. Dengan mengambil model Muhammadiyah-SI, seraya tetap mengembangkan dunia pendidikan, umat Islam Jawa Barat mendirikan Persatuan Islam (Persis) pada 1923 dan dilanjutkan kalangan ulama Jawa Timur mendirikan Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926. Dua tahun sebelumnya, kalangan yang sama mendirikan organisasi pemuda, Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air), pada 1924. Berpola yang sama, umat Islam Sumatera Utara dan Sumatera Barat masing-masing mendirikan Jami’atul al-Washliyah dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) pada 1930. Kurang satu dekade kemudian, kalangan ulama di Aceh mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada 1939. Sebelum itu, berbagai cabang Muhammadiyah dan SI dirikan hampir di seluruh wilayah Nusantara. Alhasil, walau

SI pada akhirnya mengalami metamorfosis politik, Muhammadiyah secara ajek mempertahankan diri sebagai model ideal gerakan umat Islam.

Pada 1925, misalnya, berdiri Jong Islamieten Bond (JIB). Sama seperti kelahiran Muhammadiyah-SI, kehadiran JIB ini bersifat *decisive* karena memberikan corak baru gerakan umat Islam, yaitu memberi preseden kelahiran kaum terpelajar Islam yang tergabung ke dalam satu wadah organisasi. Dan, melalui duet Muhammadiyah-NU, organisasi-organisasi kaum terpelajar ini kian tumbuh mekar. Ini dimulai dengan lahirnya Masyumi pada 7 November 1945 yang kemudian—di masa Revolusi Nasional 1945 hingga 1949—diikuti oleh kelahiran Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar Islam Indonesia (PII) serta Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Dan, walau resmi berdiri pada 1968, apa yang kita kenal sebagai Ansor dewasa ini berakar pada organisasi pemuda NU masa Revolusi Nasional: Ansharu Nahdlatul Ulama (ANU).

Dilihat dari genealoginya, Masyumi adalah ekspresi politik umat Islam hasil simbiosis lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi sosial-ekonomi dan politik dua dekade abad ke-20. Dan HMI, PII serta GPII

adalah derivatif Masyumi. Dengan demikian, sampai dengan periode Revolusi Nasional itu, jejak gerakan umat Islam yang dimulai pada 1912 terlihat dengan jelas. Simbiosis lembaga-lembaga pendidikan-orgaisasi-sosial-ekonomi dan politik Muhammadiyah dan SI telah memberi landasan kuat bagi aktivitas umat Islam hingga dewasa ini. Walau dengan intensitas dan, mungkin, motivasi yang "berbeda", keberadaan berbagai partai politik dan organisasi umat Islam yang kita lihat dewasa ini berakar pada sumber sejarah yang sama: 1912.

Maka, tahun 1912, pada hemat saya, harus kita lihat dengan serius. Tahun itu ditandai oleh lahirnya jenis keaktoran baru umat Islam, yaitu menjelmana aktivis-aktivis umat Islam yang beradaptasi dengan alam modern. Tahun itu, untuk pertama kalinya sejarah menampilkan kemampuan umat Islam mengorganisasikan diri secara kolosal. Dan karena itu—baik melalui gerakan ekspansif hingga ke seluruh wilayah Nusantara maupun penerbitan-penerbitan yang mereka lakukan—wajah "Indonesia" yang masih sangat samar-samar di masa itu, mulai ditempa.

Dengan menggunakan konsep *imagined community* Benedict

Anderson, bukankah penyebaran keanggotaan Muhammadiyah, SI dan NU ke seluruh wilayah Indonesia telah secara otomatis merangkai struktur persaudaraan sesama rakyat Nusantara antarpulau? Bukankah melalui penerbitan-penerbitan mereka yang terbaca secara meluas, membentuk kesamaan kesadaran di antara rakyat Nusantara, walau berbeda pulau dan etnik atau suku bangsa?

#### IV

Di sini kita melihat "efek samping" umat Islam sebagai aktor telah melahirkan konsep "Indonesia". Dengan berpedoman pada definisi umat Islam di atas, frasa "efek samping" ini perlu ditekankan. Kegelisahan intelektual para pendiri lembaga-lembaga pendidikan seperti dayah dan pesantren pertamanya ditujukan pada ketidakpuasan umat Islam atas posisi Islam (sebagai agama) yang dilihat (dan rasakan) masa itu. Usaha mengubah posisi Islam ke arah lebih baik (menurut perspesi mereka) mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan itu.

Hal yang sama terjadi pada pendirian organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik. Sesuai dengan perspektif definisi

yang telah kita baca, kehadiran pola kehidupan kota dan tempat Islam di dalamnya memberikan inspirasi umat Islam menggelar corak ke-Islaman yang sesuai dengan struktur baru itu. Bahwa perluasan aktivitas organisasi-organisasi tersebut bergerak melampaui “tanah kelahiran”-nya adalah akibat logis yang tak terelakkan. Konsep “Indonesia” yang lahir melalui kesamaan kesadaran dan perasaan di dalam kerangka perluasan keanggotaan dan aktivitas organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik di atas, dengan demikian, adalah penanaman struktur logika bersifat “efek samping” itu.

Dalam arti kata lain, walau secara resmi konsep “Indonesia” belum tercipta, infrastruktur kesamaan kesadaran dan perasaan untuk mengakomodasikannya telah terbangun melalui ekspansi keanggotaan organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik bersifat lintas etnik dan pulau di kawasan Nusantara itu.

Maka, jika bukan titik anjak “kelahiran kesadaran Ke-indonesiaan”, tahun 1912 tersebut tetap harus kita lihat sebagai pengawal (*starting point*) intensitas kesadaran kebangsaan rakyat Nusantara. Membaca fakta sejarah ini, sulit bagi kita untuk tidak menyimpulkan bahwa rangka dasar kesadaran berbangsa

beproses dari situasi yang tercipta sejak 1912, ketika umat Islam kian intensif berusaha mengangkat derajat Islam (sebagai agama) dalam situasi perkotaan yang baru muncul awal abad ke-20. Usaha ini secara struktural mendorong lembaga-lembaga pendidikan bersimbiosis dengan organisasi-organisasi yang lahir pada saat itu dan meluaskan aktivitas mereka ke seluruh wilayah Nusantara. Karena itu, dalam konteks ideologis, dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial-politik tahun 1912 itu adalah refleksi penemuan identitas baru masyarakat Nusantara sebagai alternatif identitas dan simbol yang disodorkan kolonial Belanda. Ini berarti bahwa sosialisasi nama “Indonesia” kepada segenap masyarakat Nusantara menjadi jauh lebih muda diterima dibandingkan dengan absennya pergerakan umat Islam sejak 1912.

Kini umat Islam telah berada dalam situasi pasca produk perkembangan gerakan 1912. Jika dihitung sampai dengan 2019, usia umat Islam—sekali lagi, sesuai dengan definisi di atas—telah berumur 107 (seratus tujuh) tahun. Untuk sebagian besar, model 1912 masih tetap berlaku di dalam struktur gerakan umat Islam: lembaga-lembaga pendidikan (walau telah

mengalami modernisasi yang jauh melampaui 1912) yang ber-simbiosis dengan organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik. Dengan tingkat kecanggihan berlipat ganda, lembaga-lembaga pendidikan terus-menerus mereproduksi sumber-daya manusia yang terserap dan terakomodasikan ke dalam organisasi-organisasi itu. Sementara pada saat yang sama, dengan wujud keragaman yang lebih berwarna, organisasi-organisasi tersebut mengintensifkan ekspansi mereka dengan mengikuti pola Muhammadiyah-SI.

Namun sifat pasca 1912 ini segera berpengaruh terhadap corak artikulasi umat Islam dewasa ini. Pertama, jika model gerakan 1912 melahirkan rangka dasar yang mempermudah akomodasi kesadaran kebangsaan (yang kemudian disebut "Indonesia" itu), umat Islam dewasa ini telah menemukan Indonesia secara resmi sebagai negara-bangsa.

Kedua, berada dalam lingkup keresmian negara-bangsa, artikulasi aktivisme atau keaktoran umat Islam yang terekspresikan ke dalam berbagai lembaga pendidikan dan organisasi tak lagi menemukan alasan yang sama dalam menyatakan diri. Dalam arti bahwa justru karena

telah berada di dalam keresmian negara-bangsa, perbedaan tujuan dan, di atas itu, kepentingan lebih tertonjolkan daripada persamaan.

Ketiga, kemajuan teknologi (komunikasi) di dalam struktur globalisasi bukan saja telah memungkinkan terjadinya individualisasi dan otonominisasi anggota-anggota umat Islam, melainkan juga terbuka kemungkinan diseminasi gagasan yang pertumbuhan dan perkembangannya tak berasal dari sejarah perjuangan dalam lingkup negara-bangsa.

Keempat, karena percaturan artikulasi di dalam lingkup negara-bangsa ternyata jauh lebih kompleks dibandungkan dengan periode sebelumnya, terutama menyangkut kemampuan mengontrol dan menghimpun kekayaan material, maka timbul kecenderungan perasaan tersisih di sebagian golongan umat Islam.

Dengan empat masalah yang muncul secara simultan tersebut, umat Islam pasca 1912 mengalami *parcelization* (pembelahan diri) tanpa ada dasar pemikiran yang menyatukan. Untuk sebagian, ini terjadi karena negara-bangsa, wadah bersama yang kerangka umumnya tercetak melalui pola gerakan umat

Islam 1912, secara perlahan-lahan tampil mengukuhkan diri sebagai jangkar "kolektif". Yaitu, poros utama yang mengikat kebersamaan yang lebih luas dari sekedar apa yang kita definisikan umat Islam. Jangkar 'kolektif' ini menghimpun berbagai golongan dan etnik dan, di atas itu, agama.

Berbeda dengan gerakan berpola 1912, di dalam lingkup negara-bangsa, hubungan antar agama tersrukturkan secara horizontal. Struktur hubungan horizontal ini tak terpengaruh oleh pembilahan demografi, walau secara statistik porsi kuantitas kalangan beragama Islam jauh lebih besar daripada lainnya. Dan, menggunakan perspektif Max Weber, atas dasar legitimasi legal-rasional, negara-bangsa mempunyai otoritas politik bukan saja untuk berada di atas semua golongan etnik dan agama, melainkan memberikan sanksi dan mengatur pergerakan masyarakat yang berada di dalam yurisdiksinya.

Sampai di sini, kita tiba pada tataran di atas mana perumusan spesifik tentang umat Islam dewasa ini, yakni yang mengartikulasikan diri pasca model 1912, dapat dicandra. Pertama, melalui otoritas legal-rasional, negara-bangsa mengambil alih (secara langsung atau tidak) kepemimpinan

"umum" yang di dalam pola gerakan 1912 sebelumnya didominasi organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik.

Kedua, dengan otoritas legal-rasional, negara-bangsa mempunyai hak menghimpun, atau lebih tepat, mengatur pergerakan hampir semua kekayaan politik dan material di dalam yurisdiksinya. Sebagai akibatnya, berbeda dengan masa kolonial, negara-bangsa secara otomatis tampil sebagai arena kontestasi terbuka bagi tiap-tiap golongan masyarakat, termasuk umat Islam.

Ketiga, dalam situasi kepemimpinan "umum" telah beralih ke dalam otoritas negara-bangsa, pengaruh kepemimpinan di kalangan internal umat Islam mengalami reduksi besar-besaran. Di dalam posisi di mana perbedaan tujuan dan kepentingan, seperti telah disinggung, lebih terlihat daripada persamaan, maka organisasi-organisasi di dalam struktur kehidupan umat Islam lebih bersifat nafsi-nafsi, bahkan sampai pada titik "ekstrems". Jika frasa "nafsi-nafsi" ini bisa ditafsirkan sebagai pertarungan di antara anggota (organisasi) umat dalam memperebutkan kekayaan politik dan material yang terhimpun dan dalam pengaturan negara-bangsa, maka tambahan frasa "ekstrems"

menunjukkan sesuatu yang lebih “mendalam”, yakni kesediaan beberapa anggota umat bekerja sama dengan golongan non-Islam untuk berkontestasi dengan organisasi Islam lainnya. Dan untuk memberikan alasan “aliansi” dengan golongan agama lain ini, teks-teks keagamaan dijadikan dasarnya.

Maka, dalam “silang-aliansi” semacam ini, sistem gagasan model gerakan 1912 tak lagi berlaku sepenuhnya dalam struktur kehidupan 100 (seratus) tahun kemudian, yaitu dewasa ini. Jika model gerakan 1912 termotivasi oleh cita-cita meninggikan derajat dan status Islam (sebagai agama), kini tiap-tiap golongan (organisasi) umat Islam memberi tafsir berbeda tentang apa yang dimaksudkan “Islam”. Dan jika model gerakan 1912 melahirkan efek samping rangka dasar kemasyarakatan tingkat bangsa “Indonesia”, gerakan umat Islam dewasa ini cenderung melahirkan perselisihan justru di dalam lingkup negara-bangsa Indonesia.

## V

Bagaimana perkembangan umat Islam 100 tahun mendatang?

Telah saya sampaikan, ini pertanyaan pelik yang tak bisa dijawab dengan tepat. Akan

tetapi, secara spekulatif, saya melihat pola atau model 1912 hanya akan menyisakan pengaruh yang kian mengecil. Benar, bahwa anggota (organisasi) umat Islam masih memainkan peran pada tingkat tertentu. Akan tetapi, sejalan dengan itu, umat Islam akan berhadapan dengan dua fase perkembangan struktural yang *decisive*.

Pertama, sementara pengaruh kepemimpinannya secara struktural telah terlimpahkan kepada negara-bangsa, arus globalisasi yang kian “menggila”, justru berpotensi menggerus posisi negara-bangsa. Secara teoretis, jika globalisasi berpotensi mereduksi kepemimpinan negara-bangsa, maka perkembangan masyarakat bisa kembali ke “titik nol”. Dalam arti bahwa struktur horizontal kepemimpinan yang akan berjaya menggantikan struktur hierarkis yang terbangun di dalam lingkup negara-bangsa.

Kedua, berkaitan dengan itu, pengaruh globalisasi yang “menggila” itu akan kian meruntuhkan tapal-batas yang memisahkan umat manusia dewasa ini. Sebagai akibatnya, kontestasi politik dan ekonomi beralih ke tingkat supranegara-bangsa. Ini berarti bahwa model-model kepemimpinan lama (yaitu yang berlaku dewasa ini)



akan berubah dalam 100 tahun mendatang. Dalam rumusan yang lebih kongkret, ketika baik kepemimpinan organisasi dan negara-bangsa kian tergerus globalisasi, hanya mereka berkemampuan kompetitif tingkat supra negara-bangsa yang akan mampu beradaptasi di dalam struktur kehidupan baru itu.

Dalam konteks inilah, sekali lagi, secara spekulatif, perkembangan umat Islam dalam 100 tahun mendatang, akan lebih ditentukan oleh kualitas reproduksi lembaga-lembaga pendidikan, bukan oleh organisasi sosial-ekonomi dan politik sebagai anggota umat Islam. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, lembaga-lembaga pendidikan telah memainkan peranan penting dalam memasok sumberdaya manusia yang terakomodasi ke dalam organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik umat Islam.

Seratus tahun setelah 1912, lembaga-lembaga ini kian canggih dalam mereproduksi sumberdaya manusia. Berbeda dengan periode 1912, reproduksi manusia canggih lembaga-lembaga pendidikan dewasa ini tak sepenuhnya tertampung atau mau terekrut ke dalam organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik umat Islam. Dengan kecanggihan talenta

yang mereka miliki, kalangan yang tereproduksi lembaga-lembaga pendidikan dewasa ini kian mempertanyakan relevansi organisasi-organisasi tersebut di dalam struktur kehidupan mereka. Akibatnya dalam kurun 100 tahun mendatang, posisi organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik berpotensi tereleminasi.

Karena itu, peranan lembaga-lembaga ini akan kian besar melalui proses modernisasi dan teknologisasi dalam kurun 100 tahun ke depan. Mengapa? Jawabannya, juga spekulatif, dapat kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, reproduksi lembaga-lembaga pendidikan yang kian canggih ini punya alasan mempertanyakan relevansi organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik yang berkembang selama 100 tahun belakangan ini. Apa gunanya organisasi-organisasi tersebut jika hanya menghasilkan perpecahan di kalangan umat Islam selama 100 tahun pasca 1912? Pertanyaan ini tentu dibarengi oleh kemunculan paradigma baru dalam di struktur kehidupan mereka.

Kedua, karena lembaga-lembaga inilah yang paling adaptif terhadap perkembangan teknologi dan globalisasi. Kecanggihan teknologi yang kini berada di

bawah kontrol mereka bukan saja akan membuat mereka membuang jawaban-jawaban lama yang dipegang teguh generasi 100 tahun belakangan ini, melainkan juga mereka mampu memberikan jawaban-jawaban yang lebih relevan atas tantangan-tantangan yang lahir dalam periode mereka.

Maka, umat Islam dalam 100 tahun mendatang, di samping lebih berorientasi global, akan cenderung menjadi pemimpin otonom pada diri mereka sendiri. Organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik yang menjadi anggota umat Islam dalam 100 tahun belakangan ini bukan saja akan dilihat tak memberi kontribusi signifikan bagi kehidupan, melainkan juga sumber kelemahan. Sementara status dan nilai kepemimpinannya telah memudar, karena telah beralih kepada negara-bangsa, organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik umat Islam itu masing-masing lebih berorientasi kepada tujuan dan kepentingan masing-masing. Dan

karena menyadari bahwa kepemimpinan negara-bangsa kian terhimpit oleh globalisasi, dengan lebih mendasarkan diri pada talenta canggih yang telah dimiliki, mereka akan cenderung menghapus struktur dan wujud kepemimpinan “konvensional”. Sebagai gantinya, anggota-anggota umat Islam 100 tahun mendatang itu akan mengembangkan kepemimpinan otonom pada tingkat individual.

Maka, dalam analisis bersifat spekulatif ini, saya ingin mengatakan bahwa umat Islam 100 tahun mendatang akan lebih berbasis pada lembaga-lembaga pendidikan daripada organisasi-organisasi sosial-ekonomi dan politik. Ini berarti bahwa reproduksi lembaga-lembaga pendidikan di masa depan akan lebih diserap umat Islam “wujud baru”, sebuah struktur kehidupan umat yang—tanpa pengaruh organisasi sosial-ekonomi dan politik—mengembangkan diri, atas basis talenta, tanpa tergantung kepada kuasa-kuasa massif dan besar-besaran di luar diri mereka. [ ]

## Arah Perekonomian Indonesia 2045: Menghindari Jebakan Negara Bерpendapatan Menengah



**Didin S Damanhuri**

Ada tiga faktor mengapa kita harus mengawatirkan Indonesia bisa masuk dalam 'jebakan negara berpendapatan Menengah (*middle income trap*)', yakni berakhirnya era pertumbuhan tinggi (di atas 6-7 persen) dan pendapatan per kapita yang sekarang sekitar 3.700 US dollar, terjebak tak mampu lebih dari 6000 USD, bahkan bisa stagnan dan turun karena pertumbuhan ekonomipun berada di level rendah (sekitar 2-3 persen).

Pertama, pertumbuhan selama era reformasi ini lebih bertumpu kepada ekspor komoditas (sawit, batubara, karet) dan konsumsi

barang-barang (yang makin berkonten impor) di dalam negeri dan makin rendahnya investasi di sektor industri manufaktur (lebih banyak di sektor perkebunan dan pertambangan untuk tujuan ekspor yang tak terolah). Sekarang era *booming* harga komoditas karena berbagai alasan—antara lain karena krisis yang bersifat struktural di Amerika Serikat dan Eropa—telah berakhir sehingga memukul korporasi-korporasi yang bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan skala besar, yang pada gilirannya pajak yang berasal dari korporasi tersebut berkurang signifikan.

Kedua, terjadi proses "deindustrialisasi" di satu pihak, dimana menurut data kalau pada periode 1987-1996 pertumbuhan industri manufaktur sekitar 12 persen, sementara periode 2000-2008 hanya sekitar 5,7 persen dan makin padat modal.

Di lain pihak, output produktivitas industri manufaktur yang digerakkan oleh teknologi (*Total Factor Productivity*/TFP) juga melemah sejak era reformasi. Menurut hasil studi L-KEN dan Aliansi Kebangsaan, kalau periode 1987-1996 TFP 0,009 (masih positif), tapi pada periode 2000-2012 menjadi -0035.

Apalagi, kalau dipertanyakan konten teknologi yang dikuasai anak bangsa, terutama target terjadinya *full-manufacturing* dengan penguasaan *core-technology*, sudah semakin jauh dari harapan.

Padahal di negara-negara industri maju maupun baru, seperti Eropa, AS, Jepang dan Korsel, faktor penguasaan teknologi inti dan *full manufacturing*, menjadi faktor utama tercapainya kesejahteraan dan pertumbuhan yang terus menerus (*sustainable growth*). Dengan begitu, pendapatan per kapita maupun distribusi pendapatannya pun terjadi perbaikan terus menerus, terutama dicapai oleh Eropa, Jepang dan Korea Selatan.

Sementara di AS masih terjadi kesenjangan pendapatan yang tetap tinggi, dimana 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menerima kurang dari 17 persen pendapatan nasionalnya. Hal itu terkait sistem perekonomiannya yang terlalu liberal.

Ketiga, karena masih sangat lemahnya keberadaan kelas menengah di Indonesia. Secara teori, yang diangkat dari pengalaman Renaissans Eropa dan Revolusi Prancis dimana kelas menengah tersebut dalam jumlah yang besar serta sangat

independen dan kritis, sehingga pada gilirannya mampu membuat transformasi masyarakat menjadi makmur dan egaliter. Maka dalam pengertian tersebut, kelas menengah di Indonesia sama sekali belum terbentuk. Memang, di negeri ini ada sejumlah orang-orang kaya dari kalangan swasta, tapi dihasilkan umumnya oleh kepengusahaan yang tidak berwatak entrepreneur, dan lebih karena fasilitas dan kronisme serta jumlahnya pun hanya sekitar 0,008 persen dari jumlah pengusaha yang sekitar 55 juta.

Sementara, kalau kelas menengah dalam istilah bank dunia, yakni hanya dikategorikan orang yang berpenghasilan di atas 2 dolar AS hari dan hanya sebagai konsumen, meskipun jumlahnya sekitar 120 jutaan, justru lebih banyak membebani APBN/D terutama untuk macam-macam subsidi dan juga rakus akan barang dan jasa serta teknologi impor. Dengan demikian, kelas menengah dalam pengertian terakhir akan lebih menguras devisa yang justru akan menekan pertumbuhan ekonomi.

## Keluar dari Jebakan

Kalau kita melihat “modal sosial, ekonomi, sumber daya alam,

SDM dan bahkan peradaban”, sebenarnya bangsa ini harusnya lebih mengkonsentrasikan kepada moda produksi agrikultur. Namun semua itu harus ditransformasikan secara industrial dengan konten teknologi yang makin tinggi disertai dorongan kaum wirausahawan yang cukup.

Tengok saja dalam struktur ketenagakerjaan negara kita. Dari angkatan kerja yang sekitar 110 juta, sekarang ini mereka bekerja di sektor pertanian skala menengah dan kecil, yakni sekitar 70 persen daripada bekerja dalam bidang padi, palawija, perkebunan, peternakan sapi, hortikultur, sawit, tembakau, garam, kelapa, tebu, dan seterusnya.

Sementara, yang bekerja di perkebunan besar, misalnya dalam kelapa sawit, hanya sekitar 1,4 juta. Itu pun termasuk yang berpola kemitraan dengan perkebunan rakyat. Dengan demikian yang mampu menyerap tenaga kerja dalam bidang agrikultur, adalah pertanian skala menengah dan kecil.

Sementara, dalam hal upah rata-rata untuk UKM perkebunan, misalnya untuk sawit dan karet, adalah Rp 1,2 juta dan Rp 960.000. Padahal upah buruh perkebunan rata-rata untuk sawit dan karet tersebut adalah Rp 760.000 dan Rp 650.000. Kita

tahu prioritas yang tinggi dari pemerintah dewasa ini (lewat kebijakan perizinan, alokasi tata ruang, permodalan perbankan dan seterusnya) sangat berpihak kepada perkebunan dan pertambangan skala besar.

Dengan demikian, tak heran dampaknya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi (sekitar 5,5 persen), lebih banyak dinikmati oleh lima persen kelompok berpendapatan tinggi. Hal itu berdampak lebih lanjut terhadap ketimpangan pendapatan yang makin menyolok. Lihatlah, pada awal tahun 2000-an rasio Gini Konsumsi berkisar sekitar 0,32 (relative merata), tahun 2012 sudah menjadi 0,41 ( timpang) dan baru sedikit menurun jadi 0,39. Bahkan kalau memakai rasio Gini Pendapatan sebenarnya sudah lebih dari 0,5, artinya ketimpangan yang buruk dengan segala dampaknya dalam meningkatkan kriminalitas, konflik sosial, ketidakstabilan politik bahkan penurunan pertumbuhan ekonomi secara drastis.

Hal ini sangat mirip dengan apa yang terjadi saat ini di Brazil. Negara yang sebelumnya menikmati pertumbuhan tinggi (sekitar 5 persen), karena ketimpangan yang menajam, serta terlalu memberi prioritas pembangunan ekonomi kepada

pemodal raksasa dan meninggalkan UKM, pertanian dan industri, dan seterusnya. Akibat adanya gejala *middle income trap*, maka sekarang pertumbuhannya hanya sekitar 2 persen dengan diikuti makin banyaknya pengangguran, makin meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, konflik sosial, dan seterusnya. Bahkan penentangan terhadap penyelenggaraan Piala Dunia pun marak, antara lain adanya ancaman dari para gangster di sana.

Dengan ilustrasi tersebut kita dapat menarik kesimpulan, kalau kebijakan pembangunan ekonomi seperti sekarang diteruskan, yakni bertumpu kepada pertumbuhan GDP berbasis komoditas (perkebunan dan pertambangan berskala besar), maka akan berdampak buruk bagi pembangunan secara keseluruhan. Hal itu bukan hanya karena daya serap kesempatan kerjanya rendah, buruhnya dibayar murah, makin memperburuk ketimpangan, tapi juga dengan konten teknologi dan kewirausahaan yang rendah, karena umumnya diekspor sebagai bahan mentah dan proses bisnisnya umumnya bersifat lebih menggantungkan diri pada fasilitas pemerintah.

Hal ini diperkuat oleh analisis berdasarkan perhitungan *Social Accounting Matrix* (SAM) berbasis

data BPS, justru UKM lebih memiliki efek pengganda kesempatan kerja dan pendapatan serta bahkan produktivitasnya pun lebih tinggi dibandingkan skala besar.

Lebih spesifik lagi, menurut perhitungan SAM, sektor pertanian memberikan kontribusi efek pengganda pendapatan dan kesempatan kerja yang jauh lebih besar daripada sektor pertambangan dan manufaktur.

Hal ini tentu bukan harus meninggalkan industrialisasi non-agro dan skala besar yang kini sudah berkembang. Tapi peran pemerintah cukup lebih bermain di regulasi dan *market intelligent* terutama untuk tujuan ekspor dari industri yang telah berkembang tersebut.

## Arah perekonomian Indonesia 2045 dan seterusnya

Kebijakan yang komprehensif untuk generasi baru pembangunan ekonomi menjelang 2045 dan seterusnya untuk menghindari 'jebakan negara berpendapatan menengah', hendaknya Indonesia mengarahkan kepada pembangunan infrastruktur secara komprehensif (fisik, ekonomi, sosial, hukum,

hingga politik) yang mendukung pembangunan berkualitas dan berkelanjutan yang didukung tata ruang, reforma agraria, perbankan, fiskal dan moneter yang mendorong industrialisasi agro dan perdesaan, non-agro, digital dan "society 5.0" (seperti telah ditunjukkan oleh Jepang).

Lebih sempurna lagi dengan di kuasanya teknologi (berbagai tingkatan dan jenis) yang akan mendukung sebagai negara industri modern dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkeadilan.

Dalam bayangan tersebut maka dalam prosesnya nanti harus tumbuh kelas menengah yang besar dan independen yang akan lebih mendinamisasi secara terus menerus baik secara ekonomi maupun politik dan akan makin menguntungkan rakyat banyak.

Gambaran Pembangunan Ekonomi 2045 dan seterusnya tersebut sesuai dengan tujuan nasional seperti yang termaktub dalam pembukanaan UUD'45, yakni untuk melindungi seluruh warga negara (dari ketidak-amanan akibat kemiskinan dan pengangguran), dengan memajukan kesejahteraan umum

(kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya jasmani maupun rohani) dan mencerdaskan kehidupan bangsa (dengan terciptanya struktur ekonomi dan politik yang makin sehat sehingga berkembang manusia Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas intelegensia, emosionalitas dan spiritualitas).

Sebab, kalau kebijakan pembangunan ekonomi masih *business as usual* (bertumpu kepada komoditas skala besar yang absen untuk

Penguasaan teknologi dan kewirausahaan oleh anak bangsa), perekonomian yang penuh dengan para aktor pemburu sewa (*rent seekers*) yang menciptakan oligarki finansial, ekonomi dan politik bahkan terjadi 'perkawinan antara ketiga jenis oligarki' tersebut, maka Indonesia akan masuk kepada *middle income trap* seperti telah terjadi di berbagai negara, termasuk terakhir ini terjadi kedua kalinya di Brazil (yang pertama terjadi awal abad 20) dengan ketimpangan yang akan makin memburuk serta segala dampaknya secara social, ekonomi dan politik. [ ]

# Reforma Agraria



**Arif Budimanta**

Terjadinya konsentrasi kekayaan dan sumber-sumber pendapatan di tengah masyarakat merupakan persoalan yang tak kunjung usai di Indonesia. Berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru, sejatinya memberikan angin segar bagi peningkatan dan kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat.

Salah satu kritik penting pada era kekuasaan Orde Baru adalah terkonsentrasinya kekuasaan dan kesempatan oleh sekelompok orang. Hal ini, antara lain ditandai dengan populernya istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun pada kenyataannya, harapan segera pupusnya ketimpangan berjalan sangat lambat. Pada Era Reformasi, fenomena ketimpangan masih sangat kuat, begitu juga dengan kecenderungan yang mengarah kondisi oligarkis (Hadiz, V. dan Richard, R., 2004).

Secara konsep, ketimpangan ekonomi mengacu pada bagaimana variabel ekonomi terdistribusi antara individu-individu dalam kelompok, antara kelompok dalam suatu populasi atau antara negara dan negara lainnya (Dabla, E. dan Kochhar, K., 2015). Artinya, ketimpangan dapat muncul ketika terdapat perbedaan distribusi variabel ekonomi yang terjadi baik antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai dua lapisan masyarakat yang berjarak, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas ini dapat dimaknai sebagai lapisan dengan konsentrasi kekayaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bawah dan begitu sebaliknya. Selanjutnya, dalam kelompok lapisan bawah, terdapat penduduk dengan kemampuan ekonomi lemah (masyarakat miskin).

Dalam mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan. Selanjutnya, penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per



bulan di bawah garis kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2018). Artinya, persoalan ketimpangan dan kemiskinan adalah dua soal yang berkaitan erat.

## Kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia

Kondisi ketimpangan dapat dilihat melalui indeks gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan antar individu. Angka gini Indonesia penting untuk diperhatikan, mengingat laju penurunannya belum signifikan. Bahkan dibandingkan dengan masa Orde Baru masih lebih tinggi. Per September 2017, indeks gini berada pada angka 0,391 (Badan Pusat Statistik, 2018). Menurut studi World Bank, terdapat beberapa penyebab utama munculnya ketimpangan pendapatan di Indonesia, di antaranya adalah ketimpangan peluang, ketimpangan pasar kerja, konsentrasi kekayaan dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan (World Bank, 2016).

Selain itu, ketimpangan juga terjadi dalam penguasaan lahan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka gini lahan dari waktu ke waktu, hingga mencapai 0,68 pada tahun 2013. Artinya dilihat dari sisi aset, telah terjadi ketimpangan yang lebar

dalam kepemilikan lahan. Hal ini jelas akan menjadi penghambat bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin untuk dapat memproduksi.

Kondisi tersebut kemudian diperburuk dengan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir rumah tangga terkaya. Data dari Credit Suisse menunjukkan jika 1 persen rumah tangga terkaya menguasai 45,4 persen kekayaan nasional, lebih jauh lagi 10 persen rumah tangga terkaya menguasai 74,8 persen kekayaan nasional (Credit Suisse, 2018).

Ketimpangan yang akut ini menghasilkan gejala dan bahkan fenomena oligarki di Indonesia. Salah satu cara untuk mengukur situasi oligarkis dalam kehidupan sosial politik ekonomi suatu masyarakat adalah melalui *Material Power Index* (MPI) Indonesia yang dikembangkan oleh Prof. Jeffrey Winters (Winters, A. J., 2013).

Dalam perspektif Winters tersebut, MPI Indonesia pada 2016 tercatat sebesar 584.478 (Megawati Institute, 2017). Angka ini menggambarkan bahwa 40 orang terkaya di Indonesia memiliki kapasitas politik pertahanan kekayaan hampir enam ratus ribu kali lipat lebih besar dibandingkan dengan masyarakat biasa. Politik perta-

hanan kekayaan ini dilakukan melalui lobi, proses politik pemilihan umum, pembentukan opini dan proses pembentukan kebijakan negara (Winters, A. J. dan Page, B., 2009). Maka dengan kondisi yang demikian, kebijakan negara akan terus mendapat tantangan dari para Oligark agar lebih berpihak kepada mereka dibandingkan dengan publik khususnya masyarakat miskin.

Sementara itu, kondisi kemiskinan sebetulnya relatif membaik jika dilihat dari sisi jumlah dan persentase. Jumlah penduduk miskin pada 2004 mencapai 36,15 juta jiwa atau 16,6 persen dari total jumlah penduduk. Sedangkan per September 2017, jumlah penduduk miskin adalah 26,5 juta jiwa atau 10,12 persen dari total jumlah penduduk (Badan Pusat Statistik, 2018). Hanya saja, angka ini masih relatif tinggi untuk ukuran sebuah negara dan laju dari penurunan angka kemiskinan cenderung melambat. Angka tersebut juga masih jauh di bawah target yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk menanggulangi tingkat kemiskinan. Upaya tersebut kemudian dikelompokkan menjadi empat

klaster utama. Klaster pertama merupakan program penanggulangan yang berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Klaster kedua merupakan program penanggulangan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri. Klaster ketiga adalah program penanggulangan yang berbasis usaha mikro dan kecil. Terakhir, klaster keempat yang merupakan program peningkatan dan perluasan program pro rakyat.

Selain itu, telah dialokasikan anggaran hingga ratusan triliun rupiah untuk kemiskinan. Artinya, terdapat cukup keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, meskipun terdapat beberapa masalah serius pada situasi kemiskinan di Indonesia. Masalah tersebut adalah rentannya masyarakat yang tergolong tidak miskin untuk kembali jatuh miskin, khususnya ketika terjadi guncangan ekonomi atau adanya pengurangan program bantuan dari pemerintah. Permasalahan ini kemudian dapat memperparah kemiskinan masyarakat miskin dari kondisi sebelumnya, atau dapat dijelaskan melalui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tercatat, indeks kedalaman kemiskinan pada September

2012 sebesar 1,9, sedangkan per September 2017 sebesar 1,79. Selanjutnya, indeks keparahan kemiskinan pada September 2012 sebesar 0,48 dan per September 2017 sebesar 0,46. Selain itu, perbaikan yang terjadi belum menunjukkan pola yang searah dengan pengurangan angka kemiskinan, bahkan pernah memburuk.

Ketika dicek lebih jauh, kondisi di perdesaan justru memburuk. Indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan per September 2012 adalah 2,42 dan per September 2017 adalah 2,43. Selanjutnya untuk keparahan per September 2012 adalah 0,61 dan pada September 2017 adalah 0,65 (Badan Pusat Statistik, 2018). Artinya penduduk miskin di perdesaan dapat dikatakan kondisinya benar-benar miskin, yang pada gilirannya akan memunculkan fenomena ketimpangan yang makin melebar antara penduduk miskin dengan penduduk yang sangat miskin.

Situasi yang demikian telah menjelaskan jika terdapat ketimpangan akses dan aset yang serius dan bahkan cenderung oligarkis, sehingga kemiskinan masih menjadi persoalan pokok bagi Indonesia. Diperlukan kebijakan strategis yang dapat menyelesaikan persoalan ketimpangan aset dan akses agar laju

penurunan kemiskinan dapat semakin cepat.

## Rumusan masalah

Masalah ketimpangan yang kemudian menyebabkan kemiskinan, setidaknya dapat dilihat melalui dua hal, yaitu ketimpangan terhadap aset dan akses. Tulisan ini akan fokus pada bagaimana mengatasi ketimpangan terhadap aset dan akses melalui sistem kelembagaan yang baik serta business process pelaksanaan program reforma agraria yang terintegrasi. Setelah itu, akan dilakukan simulasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam upaya mengatasi ketimpangan dan kemiskinan.

## Kerangka acuan

Kebijakan reforma agraria, yang dalam implementasinya melalui program legalisasi aset dan redistribusi lahan, dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan yang ampuh dalam menurunkan tingkat ketimpangan dan kemiskinan. Kebijakan ini diyakini tidak hanya memberikan efek pertumbuhan (*growth effect*) tetapi juga efek distribusi (*distributional effect*). Efek pertumbuhan

(*growth effect*) adalah efek dari peningkatan pendapatan secara proporsional dengan distribusi relatif pendapatan tidak berubah.

Sedangkan efek distribusi (*distributional effect*) adalah efek dari perubahan dalam distribusi pendapatan relatif (Bourguignon, F., 2004). Kebijakan reforma agraria telah dilakukan di sejumlah negara, seperti Brazil, Cina, Korea, Vietnam, Taiwan dan India dengan sistem dan mekanisme yang berbeda-beda.

Studi yang dilakukan Besley dan Burgess tahun 2000 (Besley, T. dan Burgess, R., 2004) dilakukan untuk menganalisa pengaruh kebijakan reformasi lahan terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di India. Reformasi lahan dilihat sebagai bentuk kebijakan redistributif. Besley dan Burgess mengklasifikasikan reformasi lahan menjadi empat pokok kategori yaitu *tenancy reform*, menghapuskan perantara, menetapkan batas atas kepemilikan tanah dan konsolidasi dari kepemilikan lahan yang berbeda.

Studi ini menggunakan data panel pada tingkat negara bagian yang tersedia dari 16 negara bagian di India dalam periode waktu dari tahun 1958 hingga 1992. Untuk mengukur kemiskinan, studi ini

menggunakan data *headcount ratio* dan kesejangan kemiskinan (*poverty gap*). Selain itu, Data upah sektor pertanian juga digunakan untuk menganalisis apakah reformasi lahan memiliki dampak pada keseimbangan umum dan mampu menjangkau kelompok orang miskin yang secara tidak langsung memperoleh manfaat dari regulasi ini. Sedangkan, nilai riil produk domestik pertanian, non-pertanian dan GDP per kapita digunakan untuk menganalisa faktor penentu pertumbuhan.

Hasil studi menunjukkan bahwa reformasi lahan pada umumnya berkaitan dengan pengurangan kemiskinan di perdesaan, khususnya terkait dengan reformasi lahan yang berusaha menghapus adanya peran perantara (*intermediaries*) dan mereformasi kondisi penyewaan lahan (*tenancies*). Kedua indikator yang digunakan, baik *headcount ratio* ataupun *poverty gap*, menunjukkan hasil yang sama di mana redistribusi lahan berdampak positif dan signifikan terhadap upah pertanian. Output yang dihasilkan juga disebabkan oleh peran pemerintah dalam kebijakannya menghapus peran perantara.

Studi mereka juga menemukan bahwa variabel reformasi lahan terpilah (*dissagregated land*

*reform*) yang tertinggal empat periode tidak memiliki dampak signifikan terhadap total pendapatan negara bagian per kapita. Hal tersebut masuk akal mengingat reformasi tanah lebih mempengaruhi hubungan produksi di bidang pertanian. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa reformasi penyewaan (*tenancy*) memiliki efek negatif pada output pertanian, sementara konsolidasi tanah memiliki efek sebaliknya. Dan efek tersebut tetap sama meskipun variabel pendapatan per kapita diganti dengan variabel hasil pertanian. Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa reformasi tanah lebih mengubah hubungan produksi di bidang pertanian daripada mengubah pola kepemilikan tanah.

Selain itu, terdapat bukti bahwa dampak paling besar dari reformasi tanah terhadap kemiskinan terjadi di negara-negara yang memiliki kesenjangan kepemilikan tanah paling besar. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negatif dan signifikan dalam setiap kasus reformasi lahan agregat.

Disisi lain, studi yang dilakukan Deininger, Jin dan Nagarajan pada tahun 2007 (Besley, T. dan Burgess, R., 2004) mengkaji dampak pelaksanaan reformasi lahan terhadap investasi, per-

tumbuhan ekonomi, dan kemiskinan. Data yang digunakan adalah data tingkat individu dan rumah tangga dengan periode waktu 20 tahun. Data tingkat rumah tangga yang digunakan dalam studi ini adalah berasal dari survei ARIS/RED yang dilakukan oleh India's National Council for Applied Economic Research (NCAER) pada tahun 1982 dan 1999.

Dalam konteks meningkatkan investasi rumah tangga, mereka menemukan bahwa reformasi lahan mempunyai dampak positif pada akumulasi aset dalam bentuk modal fisik maupun manusia yang memungkinkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dampak tersebut dapat terwujud berbeda antara reformasi sewa-menyewa (*tenancy reform*) dan plafon perundang-undangan (*ceiling legislation*).

Sementara *tenancy reform* memiliki efek langsung (*direct effect*) yang signifikan, sebagian besar dampak keseluruhan dari *ceiling legislation* diperkirakan muncul secara tidak langsung. Artinya bahwa, *tenancy reform* tidak memberi manfaat banyak bagi orang miskin yang mungkin bisa mendapat manfaat lebih dari *ceiling legislation*.

Mereka juga mengeksplorasi dampak reformasi tanah ter-

hadap akumulasi modal manusia (*human capital*) oleh mereka yang menyelesaikan pendidikan mereka setelah sebagian besar reformasi tanah dilaksanakan. Dalam semua regresi, ditemukan koefisien yang sangat signifikan pada pengeluaran pendidikan publik (*public education spending*) yang mengarah pada dampak positif dari reformasi tanah terhadap tingkat akumulasi modal manusia.

Di sisi lain, reformasi lahan memberikan manfaat yang tidak proporsional bagi rumah tangga dengan tingkat aset awal yang lebih rendah ketika ingin mewujudkan pemerataan dari pelaksanaan reformasi lahan. Dan terakhir, dampak reformasi lahan menurun seiring waktu dan hal ini juga terjadi pada penelitian lain yang gagal menunjukkan efek pertumbuhan yang signifikan dari pelaksanaan reformasi lahan ini.

Selanjutnya, Keswell dan Carter berusaha mengisi gap dalam penelitian distribusi lahan dengan memanfaatkan fitur-fitur dari implementasi program *Land Redistribution for Agricultural Development* (LRAD) di Afrika Selatan untuk mengekstrak variasi eksogen terkait apakah dan untuk seberapa lama, rumah tangga pemohon program bisa menikmati manfaat dari adanya

transfer tanah (*land transfer*). LRAD merupakan program yang memungkinkan buruh tani (*farm workers*) dan penyewa tenaga kerja (*labor tenant*) yang tidak memiliki tanah bisa mendapatkan hibah pembelian tanah (*land-purchase grant*) (Keswell, M. dan Carter, M. R., 2014).

LRAD tidak mewajibkan redistribusi tanah dari yang kaya ke yang miskin, melainkan beroperasi melalui pasar berdasarkan keinginan pembeli dan keinginan penjual yang bersedia. "Tangan bantuan" negara terlihat jelas dalam proses ini. Namun, oleh karena program LRAD merupakan program yang berbasis pasar sehingga membuat program tersebut tidak banyak diperdebatkan, dan lebih mudah dievaluasi, daripada program reformasi redistributif yang diamanatkan negara (*state mandated redistributive reforms*).

Untuk mendapatkan hasil analisis, Keswell dan Carter menggunakan metode *generalized propensity score* (GPS) yang memungkinkan mereka dapat mencocokkan penerima transfer berdasarkan karakteristik yang dapat diamati yang cenderung memengaruhi durasi perlakuan (*treatment duration*) dan dampaknya. Keswell dan Carter menganalisis data penerima manfaat berdasarkan dua

strategi identifikasi statistik. Pada strategi pertama, dan merupakan strategi inti (*core strategy*).

Keswell dan Carter mencocokkan individu berdasarkan tanggal masuk ke dalam program dan karakteristik modal manusia pada umumnya. Identifikasi dalam strategi ini mengasumsikan bahwa periode penelitian, baik untuk persetujuan dan penerimaan akhir dari transfer tanah, adalah bersifat acak. Strategi identifikasi penerima manfaat yang kedua lebih mencocokkan penerima transfer pada seluruh waktu yang mereka habiskan dalam program sampai penandatanganan kontrak penjualan untuk lahan.

Berdasarkan kedua strategi identifikasi tersebut, Keswell dan Carter mengestimasi fungsi respon durasi (*duration response function*) dengan mengikuti pendekatan yang digunakan oleh Hirano dan Imbens (2004) yang memetakan skor *generalized propensity* menjadi hasil dan kemudian merata-ratakan hasil dengan tingkat durasi (*duration level*). Selain GPS, Keswell dan Carter juga menggunakan metode perlakuan biner standar (*standard binary treatment*) untuk membandingkan semua pemohon dalam perlakuan dengan kelompok kontrol dari pemohon yang sudah disetujui yang

masih dalam perlakuan pada saat survei penelitian dilakukan.

Validitas dari metode ini bergantung pada asumsi yang sama seperti yang digunakan dalam strategi identifikasi inti yang digunakan dalam analisis perlakuan berkelanjutan (*continuous treatment*). Berdasarkan kedua strategi identifikasi, *estimator continuous treatment* dalam penelitian Keswell dan Carter menunjukkan bahwa setelah terjadi penurunan di awal (*initial dip*), dampak dari transfer tanah terus meningkat dan setelah 3 hingga 4 tahun, dampak tersebut berada pada tingkat yang menyiratkan kenaikan jangka panjang dalam pengeluaran per kapita sekitar 50 persen.

## Arah kebijakan pemerintah

Pelaksanaan program reforma agraria adalah salah satu instrumen pemerintah dalam mempersempit ketimpangan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian negara disusun dan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Rincian pasal 33 ayat 3 memberikan gambaran

yang lebih detail, yakni: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini menjadi dasar arah kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan penataan kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hutan dan kekayaan alam.

Indonesia telah mengatur soal kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara khusus dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria dan juga Undang-Undang No. 56 PRP tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Pasal 7 dalam UU No. 5 tahun 1960 secara jelas mengamanatkan bahwa "Agar tidak merugikan kepentingan umum, maka kepemilikan dan penguasaan tanah tidak diperkenankan melampaui batas". Selanjutnya, Pasal 17 dengan tegas menyebutkan bahwa agar kepemilikan dan penguasaan tanah tidak melampaui batas, maka akan diatur luas maksimum dan minimum tanah yang boleh dimiliki oleh satu keluarga atau badan hukum. Tanah yang melebihi batas maksimum akan diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian yang selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017 yang tertuang pada Perpres No. 45 Tahun 2016 menyatakana bahwa reforma agraria menjadi salah satu prioritas nasional yang dijalankan dari mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Melalui program prioritas reforma agraria, pemerintah mengupayakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dalam rangka menurunkan tingkat kesenjangan.

Berdasarkan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target dalam reforma agraria adalah pemberian hak atas tanah yang meliputi 4,5 juta hektare untuk legalisasi aset dan 4,5 juta hektare lahan untuk redistribusi lahan.

Namun, akses terhadap lahan tersebut harus juga didorong dengan peningkatan terhadap akses lainnya sehingga dapat mendorong *utility* masyarakat terhadap aset produktif, baik berupa akses terhadap modal, pendidikan maupun pelatihan/pemberdayaan masyarakat. Strategi tersebut diharapkan mampu mengurangi masalah ketimpangan, ketidaksetaraan, serta mendongkrak proses pembangunan berkelanjutan.



Pelaksanaan kebijakan reforma agraria menjadi sangat penting karena reforma agraria merupakan janji Presiden dan sekaligus menjadi kebijakan yang strategis dan fundamental serta ditunggu oleh masyarakat untuk menekan ketimpangan dan mendorong pemerataan aset dan akses.

## Konsep reforma agraria di Indonesia

Reforma agraria secara operasional didefinisikan sebagai menata kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan UUPA. Secara garis besar, reforma agraria dibagi kedalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan akses.

Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN.

Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang m-

akmurkan (asas manfaat). Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh KL terkait dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta Perpres No. 2 tahun 2015, total luasan lahan pada reforma agraria mencapai sembilan juta hektare. Angka ini terbagi kedalam dua skema besar, yakni penataan kembali sektor pertanahan melalui legalisasi aset seluas 4,5 juta serta penyediaan akses tanah melalui redistribusi lahan seluas 4,5 juta hektare.

## Skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Klasifikasi lahan yang masuk kedalam program kebijakan legalisasi aset meliputi tanah transmigrasi dan tanah milik rakyat yang belum bersertifikat masing-masing seluas 0,6 juta hektare dan 3,9 juta hektare. Sedangkan klasifikasi tanah yang dijadikan objek redistribusi lahan adalah tanah yang habis hak guna usahanya dan tanah terlantar seluas 0,4 juta hektare serta tanah hasil pelepasan kawasan hutan yang mencapai 4,1 juta hektare.

Untuk mendukung kepemilikan aset tersebut, pemerintah juga

memberikan akses pendanaan yang murah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementerian Koordinator Per-ekonomian menjelaskan KUR adalah kredit/ pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/ perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tam-bahan belum cukup. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perin-dustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam.

Peluang inilah yang dapat diman-faatkan untuk meningkatkan dan memperluas akses wirausaha seluruh sektor usaha produktif kepada pembiayaan perbankan, mendorong pertumbuhan ekono-mi dan meningkatkan daya saing.

KUR berbeda dengan pinjaman kredit komersial lembaga keuangannya karena memberikan bunga yang rendah. Pada 2018 bunga KUR hanya dipatok 7 persen, terus menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu persyaratan pengajuan pinjaman KUR pun relatif lebih mudah. Pemerintah juga terus meningkatkan besaran plafon KUR setiap tahunnya.

## Skema kelembagaan

Lembaga pelaksana/gugus tugas merupakan organisasi terinteg-rasi yang terdiri dari para *stakeholders*, seperti pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota, serta masyara-kat sipil/masyarakat adat. Tujuan dibentuknya lembaga pelaksa-na/gugus tugas yaitu untuk mengimplementasikan pelaksa-naan reforma agraria agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Lembaga pelaksana/gugus tugas meliputi tiga level pemerintahan, yakni lembaga pelaksana/gugus tugas tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga pelaksana ini diketuai langsung oleh Presiden RI yang bertugas mengatur, membuat kebijakan dan mengevaluasi pelak-sanaan kegiatan reforma agraria.

Sistem pengawasan dan audit perlu hadir untuk menjamin implementasi kebijakan program reforma agraria efisien dan sesuai target. Di tingkat nasional, pengawasan dan audit dilakukan oleh BPK dan KPK. Sedangkan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota), pengawasan dan audit dilakukan oleh BPKP dan BPK.

## Sistem pengimplemetasian kebijakan reforma agraria

Sistem merupakan yang terpenting dalam pengimplemetasian pelaksanaan reforma agraria. Dalam pengimplemetasiannya, sistem yang dijalankan harus memiliki karakteristik di antaranya: (i) transparan, mudah diakses dan mudah dipahami dalam suatu pusat data; (ii) menerapkan *e-governance* yang meliputi *e-land certification* dan *e-registration* untuk menghindari risiko korupsi; (iii) sistem yang ada harus mampu menjelaskan fungsi lahan yang diserahkan kepada subjek penerima TORA dan memastikan lahan tidak dialihfungsikan.

Solusi yang ditawarkan dalam studi ini akan mencakup semua hal tersebut dalam *One Map Policy* yang merupakan kebijakan atau sistem pengintegrasian data terkait dengan status pemanfaatan dan kepemilikan lahan dalam satu peta digital. Dengan adanya *One Map Policy*, memungkinkan stakeholders terkait menyinkronisasikan sistem hukum yang diperlukan supaya pelaksanaan reforma agraria tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, dualisme data yang tidak akurat sehingga dapat

mengakibatkan munculnya sengketa agrarian.

## Dampak kebijakan pemerintah (policy impact)

Untuk mengetahui pengaruh redistribusi lahan terhadap ketimpangan di Indonesia, simulasi dilakukan dengan menggunakan data SUSENAS Maret 2017. Ketimpangan dalam simulasi ini diukur dengan menggunakan pendekatan koefisien Gini. Adapun target rumah tangga penerima program redistribusi lahan adalah rumah tangga miskin (11 persen dari total populasi) yang tinggal di perdesaan dengan pekerjaan utama di sektor pertanian. Berdasarkan data dasar SUSENAS Maret 2017, kriteria rumah tangga yang memenuhi target penerima redistribusi lahan tersebut adalah sekitar 665 ribu rumah tangga.

Dengan mengasumsikan bahwa setiap rumah tangga penerima program redistribusi lahan setidaknya akan mengalami kenaikan penerimaan sekitar 15 persen per bulan, maka kebijakan redistribusi lahan dapat mendorong rumah tangga yang tadinya miskin menjadi tidak miskin. Selain itu, kenaikan pendapatan kelompok rumah tangga

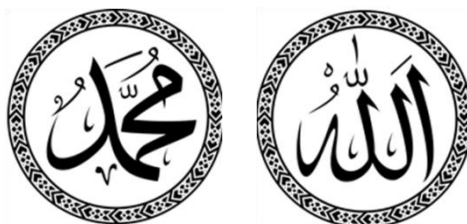
penerima program redistribusi pada akhirnya dapat mengurangi tingkat ketimpangan yang terjadi.

Hasil simulasi dengan menggunakan data SUSENAS Maret 2017 diatas menunjukkan bahwa koefisien Gini secara nasional mengalami penurunan sekitar 0,02 poin, dari yang sebelumnya sebesar 0,393 menjadi 0,391. Sementara itu, koefisien gini di perdesaan mengalami perubahan yang cukup besar dan nilainya menjadi 0,316 dari kondisi awal sebesar 0,320. Adapun kondisi ketimpangan di

perkotaan, nilainya tidak mengalami perubahan karena model yang dikembangkan mengasumsikan bahwa kebijakan redistribusi lahan hanya untuk penduduk miskin di perdesaan

yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian Kebijakan tersebut juga mampu menekan persentase kemiskinan di perdesaan, bahkan di tingkat nasional.

Kendati demikian, hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan redistribusi lahan saja kurang optimal dalam mengurangi kondisi ketimpangan. Kebijakan redistribusi lahan perlu didukung dengan kebijakan lainnya untuk mendorong pendapatan rumah tangga penerima lahan dan mengurangi ketimpangan, seperti kebijakan pembiayaan, program pendampingan keterampilan, inovasi teknologi, dukungan terkait akses pasar dan distribusi hasil lahan hingga penguatan kelembagaan pertanian. [ ]



Diambil dari <https://haurgeulis.com>

# Mengharap Pengelolaan Sumber Daya Alam Konstitusional



**Marwan Batubara**

## Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar yang jika dikelola dengan baik diyakini hasilnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. SDA tersebut meliputi minyak dan gas (Migas), mineral dan batubara (Minerba), hutan, kekayaan laut, dan sebagainya. Masalahnya, karena kebijakan yang tidak konstitusional, peraturan yang tidak optimal, salah kelola, maraknya *moral hazard* dan perilaku KKN dan oligarkis, kekayaan SDA tersebut belum memberikan hasil yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meskipun Indonesia memiliki beragam jenis SDA, karena perannya yang signifikan dalam perekonomian dan fiskal nasional, tulisan ini hanya fokus membahas pengelolaan SDA Migas dan Minerba. Faktanya pada masa awal orde baru, kontribusi sektor Migas terhadap penerimaan APBN pernah mencapai sekitar 60-70 persen. Begitu pula dengan sektor Minerba yang dapat memberikan kontribusi sekitar 5-10 persen. Namun karena produksi Migas dan mineral yang terus menurun kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari SDA terhadap APBN juga terus menurun, yang berada pada kisaran 15-17 persen pada periode 2016-2019.

Salah satu persyaratan penting agar SDA kita dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pengelolanya haruslah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai konsep penguasaan negara. Hal tersebut memang telah diamanatkan dalam konstitusi. Ternyata selama ini BUMN sektor Migas dan Minerba tidak dominan dalam pengelolaan SDA, sehingga hasilnya pun belum optimal.

Bagaimana prospek pengelolaan SDA oleh BUMN ke depan, terutama dalam 5, 10 atau 100 tahun ke depan? Mari kita cermati dalam uraian berikut.

## Penguasaan negara

Penguasaan negara pada sumber daya alam, termasuk Migas dan Minerba, telah ditegaskan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang antara lain menyatakan: Ayat (2), Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan Ayat (3) menegaskan: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Migas dan Minerba sebagai SDA strategis tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan pengelolaannya harus diarahkan untuk mencapai sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan tafsir atas makna penguasaan oleh negara. Dalam putusan No.036/PUU-X/2012, MK menjelaskan bahwa penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pengurusan oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangan untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perijinan, lisensi, dan konsesi. Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN atau BHMN sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya negara, c.q. pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara dilakukan negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan Mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh Negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.

Menurut MK, Pasal 33 UUD 1945 menghendaki bahwa penguasaan negara itu harus berdampak pada sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, "pengertian dikuasai oleh negara" tidak dapat dipisahkan dengan makna untuk "sebesar-besar kemakmuran rak-

yat” yang menjadi tujuan Pasal 33 UUD 1945. Dengan adanya anak kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka hal tersebut dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran. Oleh karena itu, menurut MK, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Konsep penguasaan negara dan Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah teramat penting untuk dipahami dengan

dan dijalankan dengan benar. Dapat dikatakan dalam pengelolaan SDA, pemerintah dan BUMN memegang peran utama. Aspek penguasaan negara dalam eksploitasi SDA harus diperkuat dengan berperannya BUMN dalam pengelolaan. Bukan sebaliknya, yakni lebih banyak dikuasai dan dimanfaatkan oleh perusahaan asing atau swasta nasional. Ketika SDA dikuasai asing, maka manfaatnya akan jauh dari sebesar-besar kemakmuran rakyat.

## Pengelolaan Migas

Indonesia mengalami pasang surut kebijakan tata kelola Migas dan silih bergantinya pemberlakuan peraturan, sejak zaman penjajahan hingga kini. Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki empat perangkat hukum atau undang-undang (UU) sebagai kerangka regulasi perusahaan industri Migas, yaitu Indische Mijnwet 1899, UU No.44/1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU No.8/1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina), dan UU No.22/2001 tentang Migas.

Indische Mijnwet 1899 merupakan produk hukum penjajah Belanda sehingga pasti tidak

sejalan dengan konstitusi. Sedangkan UU No.44/1960 dibentuk atas dasar kuatnya keinginan untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Migas asing, namun masih membuka peluang kerja sama dengan asing akibat terbatasnya modal dan kemampuan teknis operasional. UU No.44 Prp./1960 telah meletakkan dasar tata kelola Migas yang mengutamakan kepentingan nasional dan penegasan pertambangan Migas dikuasai oleh negara dan dikelola BUMN.

Untuk menjamin perkembangan BUMN dan mampu bersaing secara global, pemerintah menerbitkan UU No.8/1971 yang mengatur lebih rinci tata cara pengurusan perusahaan Migas. UU ini merubah PN Pertamina menjadi Pertamina dan menetapkan sebagai satu-satunya BUMN yang bertugas melaksanakan pengusahaan Migas berupa kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta penjualan, dengan struktur monopoli terpadu (*vertically integrated*). Selain hak monopoli atas pengusahaan Migas nasional, Pertamina juga diberi tugas *Public Service Obligation* (PSO), yakni menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri.

Pertamina ditunjuk sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (KP) di seluruh wilayah hukum pertambangan Indonesia meliputi wilayah daratan, dasar laut, serta tanah di bawahnya. Karena keterbatasan modal dan teknologi, UU No.8/1971 memberi kebebasan kepada Pertamina bekerja sama dengan pihak lain dalam bentuk Kontrak *Production Sharing* (KPS). Model kontrak semacam ini dianggap paling memenuhi aspirasi konstitusi, sekaligus dapat menarik minat investor. Dengan ketentuan ini, Pertamina bertindak sebagai regulator dari kontrak kerja sama dengan kontraktor, sekaligus operator dari KP.

Disahkannya UU Migas No.22/2001 telah merombak status, posisi, peran, dan tugas Pertamina. UU Migas menjadi tonggak liberalisasi dan privatisasi sektor Migas. UU ini menghapus kuasa dan kontrol Pertamina atas cadangan dan produksi minyak mentah di Indonesia, serta membuka jalan bagi liberalisasi pasar BBM dalam negeri. Status Pertamina dirombak dari BUMN yang dibentuk berdasarkan UU menjadi PT Persero dengan orientasi mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan, bukan menjalankan fungsi sosial. Dengan status sebagai Persero, Pertamina dimungkinkan untuk dijual



atau diprivatisasi melalui penawaran saham umum atau diakuisisi atas persetujuan RUPS.

UU Migas menempatkan Pertamina menjadi sekadar salah satu pelaku usaha, bukan satu-satunya. Pertamina tidak lagi memonopoli pengusahaan Migas dengan struktur organisasi terpadu (*vertically integrated*) yang mencakup sektor hulu dan hilir. Pertamina dirombak dari sebuah perusahaan berskala besar (*integrated oil company*) menjadi perusahaan minyak yang dipecah (*unbundling*) dalam ranting-ranting usaha dengan skala yang diperkecil.

Ketentuan ini memangkas peran pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan Migas hasil ladang dan sumur sendiri. Ketentuan ini juga memotong peran Pertamina sebagai perusahaan Migas milik negara: pelaku bisnis yang membawa kepentingan nasional. Sebagai bentuk liberalisasi, Kontraktor *Production Sharing* (KPS) berhak menguasai sepenuhnya ladang-ladang yang digarap, menetapkan harga, termasuk ke mana akan menjual hasil produksinya. UU Migas juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi pihak swasta, termasuk asing, untuk masuk lebih dalam ke arena industri Migas nasional.

Terbitnya UU Migas telah menghilangkan peran penguasaan negara yang sebelumnya dijalankan oleh Pertamina. Hilangnya penguasaan negara atas sumberdaya Migas nasional dari Pertamina telah membuat kontraktor asing menjadi sangat dominan dalam menguasai lapangan dan produksi Migas. Saat ini Pertamina hanya menguasai sekitar 30 persen dari total produksi Migas nasional, sedangkan sisanya dikuasai oleh asing dan swasta nasional.

Karena tidak puas pada UU Migas, sejumlah tokoh dan ormas mengajukan *judicial review* (JR) terhadap UU No.22/2001 kepada MK. Hasilnya, beberapa pasal dari UU Migas dibatalkan oleh MK karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Atas adanya 3 kali gugatan JR oleh sejumlah kalangan, MK telah tiga kali pula membuat putusan pembatalan sejumlah pasal yang berbeda dalam UU Migas. Sebagian pasal direvisi, sebagian lagi dinyatakan tidak berlaku.

UU No.22/2001 telah menciptakan sistem yang merugikan negara, sehingga pengelolaan kekayaan Migas nasional menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dan benar (*good corporate governance*), berakibat hasilnya tidak lagi

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. UU ini mendesain struktur industri Migas nasional melalui cara *divide et impera* sesuai pola kolonial. UU ini menjadikan sistem perminyakan Indonesia tidak efisien, tidak sejalan dengan prinsip GCG dan menggiring terbukanya lubang inefisiensi dan tindak KKN.

Putusan MK No.36/PUU.X/2012 merupakan pijakan konstitusional yang kuat untuk terjadinya perbaikan peraturan dan pengelolaan Migas yang lebih baik ke depan melalui penetapan UU Migas baru. Bahkan, sebelum putusan MK tersebut ditetapkan, DPR pun telah memahami serta melakukan kajian dan upaya perubahan terhadap UU No.22/2001. Hal ini diwujudkan dengan diajukannya draf RUU Migas pada 2008/2009 oleh DPR periode 2004-2009 dan dilanjutkan oleh DPR periode 2009-2014 dengan menjadikan RUU Migas sebagai RUU prioritas dalam Prolegnas yang disepakati oleh DPR dan Pemerintah.

Namun dalam prakteknya, meskipun telah hampir 10 tahun berlalu, karena alasan yang tidak jelas dan diduga sarat kepentingan yang merugikan negara, UU Migas baru tak kunjung dibentuk oleh DPR dan Pemerintah. Kerja sama antara oknum-oknum penguasa dengan

pengusaha, termasuk oknum-oknum partai, telah membuat Indonesia gagal membentuk UU Migas baru yang sesuai konstitusi dan kepentingan strategis nasional ke depan.

## Pengelolaan Minerba

Pengelolaan SDA Minerba ditandai dengan berlakunya sistem Kontrak Karya (KK) pada tahun 1967, melalui ditetapkannya UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan UU No.11/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Sistem KK pertama kali diterapkan saat ditandatanganinya kontrak antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia pada 1967 (KK Generasi I). KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka PMA dalam rangka melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk Migas, panas bumi, radioaktif, dan batubara.

Secara umum, jenis kerja sama antara swasta dan negara yang berlaku dalam pertambangan nasional adalah KK, Perjanjian Kerja Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dan Kuasa Pertambangan (KP). Bentuk-bentuk kerja sama

tersebut bukanlah kuasa mutlak bahan tambang dari Negara dengan kontraktor dalam hal penguasaan bahan tambang. Dari segi kontraktual, keterlibatan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM sebagai salah satu pihak dalam kontrak menjadi salah satu daya tarik bagi investor. Hal ini disebabkan karena dapat memberikan kepastian hukum bagi investor.

Selanjutnya, setelah dibahas oleh Pemerintah dan DPR selama lebih dari 4 tahun, Indonesia akhirnya memiliki UU Minerba baru sebagai pengganti UU No.11/1967, yaitu UU Minerba No.4/2009. Kehadiran UU No.4/2009 terutama pada pasal peralihannya (Pasal 169) memberi dampak signifikan bagi keberadaan KK. Pasal tersebut mengamanatkan agar seluruh KK dan PKP2B disesuaikan (renegosiasi) dengan ketentuan-ketentuan UU No.4/2009. Berdasarkan perintah UU tersebut, terdapat 6 (enam) isu strategis untuk disepakati, yaitu: 1) luas wilayah kerja, 2) perpanjangan kontrak, 3) penerimaan negara, 4) kewajiban divestasi, 5) kewajiban pengolahan dan pemurnian, dan 6) kewajiban penggunaan barang dan jasa dalam negeri.

Dalam praktiknya, renegosiasi Pemerintah dengan kontraktor KK dan PKP2B tidak berjalan

mulus, meskipun UU Minerba memerintahkan agar penyesuaian ketentuan kontrak harus diselesaikan dalam 5 tahun sejak UU tersebut ditetapkan pada Januari 2009. Tertundanya kesepakatan terutama karena pembangkangan oleh para kontraktor di satu sisi dan tidak konsisten dan tidak tegasnya pemerintah dalam menjalankan perintah UU Minerba.

Faktanya pemerintah cenderung mengakomodasi keinginan kontraktor melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) ESDM, meskipun isi ketentuan-ketentuan dalam PP atau Permen tersebut bertentangan dengan konstitusi atau UU Minerba. Hal ini tercermin dalam penerbitan PP No.1/2014 tentang relaksasi ekspor konsentrat yang telah dilarang dalam UU Minerba 5 tahun setelah penetapannya, pada Era SBY, dan PP No.1/2017 pada Era Jokowi. Pemerintah pun memberi kelonggaran atas luas wilayah tambang saat eksplorasi dan operasi/produksi, serta relaksasi atas kewajiban divestasi saham.

Secara umum, pada prinsipnya baik pada Era SBY, maupun pada Era Jokowi, pemerintah telah bersedia "berkompromi" dengan para kontraktor KK dan PKP2B, untuk tidak menjalankan amanat

konstitusi dan perintah UU Minerba No.4/2009 secara benar dan konsisten. Dengan begitu, maka penguasaan negara atas SDA Minerba tidak dapat dijalankan optimal dan manfaat yang diperoleh pun jauh dari men-sejahterakan rakyat.

## Tantangan Menuju Perbaikan: Pengelolaan oleh BUMN

Uraian di atas telah memperlihatkan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat memperoleh manfaat terbesar dari SDA Migas dan Minerba adalah tidak atau belum adanya UU atau peraturan yang mengatur pengelolaan aset negara tersebut oleh BUMN, sesuai konstitusi. Saat UU No.8/1971 berlaku, aspek penguasaan negara oleh BUMN telah diterapkan, namun karena adanya KKN di satu sisi, dan intervensi asing di sisi lain, UU No.8/1971 telah diberangus dengan ditetapkannya UU No.22/2001. UU No.22/2001 merupakan UU yang dipaksakan asing saat Indonesia mengalami krisis ekonomi 1998/1999.

Begitu pula untuk sektor Minerba. Meskipun telah berhasil menetapkan UU No.4/2009 yang dapat dianggap konsisten dengan

amanat konstitusi, namun dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak mampu menjalankan perintah UU tersebut secara kon-

sisten. Kegagalan ini terutama disebabkan oleh oknum-oknum penyelenggara negara yang lemah dan mengidap *moral hazard* di satu sisi, dan adanya tekanan dan kerakusan asing dan swasta nasional untuk tetap menguasai SDA negara di sisi lain.

Di sektor Migas, dalam kasus kontrak Blok Mahakam misalnya, masyarakat bersama serikat-sekikat pekerja BUMN dan badan-badan eksekutif mahasiswa, serta sejumlah tokoh nasional harus melakukan advokasi selama lebih dari 3 tahun, sehingga pengelolaan blok Migas tersebut akhirnya diserahkan kepada Pertamina.

Sebelumnya, Jero Wacik dan Rudi Rubiandini sebagai Menteri dan Wamen ESDM cenderung memilih untuk memberi perpanjangan kontrak kepada Total Indonesia, tanpa peduli dengan peran BUMN yang memiliki hak konstitusional.

Ternyata, meskipun Pertamina telah resmi ditunjuk untuk mengelola Blok Mahakam pada 2015, pada 2016-2017 masih ada saja upaya pejabat pemerintah, seperti Luhut Binsar Panjaitan atau Ignatius Jonan, dengan menggunakan berbagai alasan

sumir, untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Total. Dalam kasus blok Rokan, Pertamina dituntut untuk membayar *signature bonus* di depan (2018) sebesar US\$ 784 juta, meskipun pengelolaannya baru diperoleh pada 2021. Padahal pengelolaan Blok Rokan merupakan hak konstitusional Pertamina, tanpa harus membayar *signature bonus*. Sama seperti terjadi pada kasus Blok Mahakam, belakangan ini telah terdengar ucapan pejabat negara yang menggiring publik untuk menerima Chevron tetap sebagai pengelola Blok Rokan.

Contoh terbaru adalah kasus perpanjangan kontrak Blok Corridor di Sumatera Selatan yang kontraknya akan berakhir pada 2023. Meskipun masih cukup lama, guna memuluskan kepentingan asing, KESDM menerbitkan SK No.128/K/10/MEM/2019 pada 22 Juli 2019 yang menetapkan komposisi pemilikan saham Blok Corridor oleh ConocoPhillips 46 persen, Pertamina 30 persen, dan Repsol 24 persen. Ketiga perusahaan Migas tersebut hanya membayar *signature bonus* US\$ 250 juta. ConocoPhillips masih diberi kesempatan sebagai pengelola hingga 2026.

Padahal jika konsisten dengan konstitusi, otomatis pengelolaan

Blok *Corridor* harus diserahkan kepada Pertamina, tanpa membayar *signature bonus* dan kerja sama dengan asing. Pemerintah pun “membiarkan” asing tetap memiliki saham di Blok Corridor dengan hanya membayar US\$ 175 juta. Padahal negara berpotensi memperoleh dana jauh lebih besar, berkisar antara US\$ 1 miliar hingga US\$ 2 miliar jika cadangan terbukti Migas blok tersebut ditawarkan secara terbuka kepada kontraktor-kontraktor Migas. Pola penawaran terbuka merupakan hal yang lumrah di dunia. Namun menjadi aneh ketika dijalankan secara tertutup dan berpotensi KKN oleh KESDM. Penulis bersama sejumlah LSM telah melaporkan kasus Blok Corridor ini kepada KPK pada Juli 2019.

Dalam sektor Minerba, kita pun menemukan kebijakan pemerintah yang inkonstitusional pada sejumlah kasus perpanjangan kontrak (KK dan PKP2B). Contoh paling gamblang terlihat pada hasil renegosiasi KK Freeport dimana Indonesia harus membayar US\$ 3,85 miliar untuk menguasai 42persen saham Freeport MacMorran (2018). Padahal KK Freeport akan segera berakhir pada 2021, sehingga terbuka opsi menguasai tambang Freeport secara penuh hanya dengan membayar aset perusahaan tersebut sesuai dengan

nilai buku. Dalam kasus KK Newmont, pemerintah justru "membuang" peluang menguasai mayoritas saham Newmont Nusa Tenggara (NNT), dengan alasan tidak memiliki dana.

Kementrian BUMN (KBUMN) "membiarkan" Amman Mineral milik MEDCO (Arifin Panigoro) dan Kiki Barki membeli saham NNT dengan dukungan dana dari konsorsium bank BUMN (Mandiri, BRI dan BNI). Padahal nilai cadangan terbukti tambang Newmont masih besar dan merupakan aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan. Ternyata bank-bank yang mendanai kebutuhan dana Amman Mineral adalah bank-bank BUMN. Mengapa pemerintah justru tidak mendukung penguasaan saham NNT oleh holding BUMN Tambang untuk mengelola tambang Newmont?

## RUU Minerba dan upaya penyelundupan regulasi

Lebih lanjut di sektor Minerba, pemerintah dan DPR pun telah berulang kali mencoba merubah aturan main melalui perubahan UU maupun PP untuk memenuhi keinginan para kontraktor. Pada 2014, Pemerintah dan DPR telah menyetujui rencana revisi UU

Minerba No.4/2009. Pembahasan RUU Minerba untuk 3 tahun pertama, tidak intensif. Namun, awal tahun 2018 terkesan kuat RUU ditargetkan selesai pada awal 2019, yang berdekatan dengan masa kampanye dan Pemilu sehingga luput dari perhatian publik.

Draf awal RUU Minerba dari DPR pertama kali muncul pada 10 April 2018. Draf RUU tersebut disampaikan kepada Presiden RI pada 11 April 2018. Setelah naskah RUU Minerba ini beredar secara mendadak, lantas publik mempertanyakan relevansi RUU dengan kepentingan nasional dan adanya pihak-pihak tertentu di balik kemunculannya. Di dalam RUU ditemukan pasal-pasal strategis yang "disisipkan" secara tidak prudent.

Draf RUU Minerba tersebut dinilai tidak sejalan dengan konstitusi, kedaulatan negara dan kepentingan strategis nasional. BUMN sebagai pengelola SDA tidak mendapat peran dan posisi yang seharusnya. Draf RUU tidak memuat ketentuan yang mengatur peran pengawasan negara dan pengelolaan BUMN guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Draf juga luput mengatur peran BUMN yang harus mendapatkan *privilege* dan status kustodian aset SDA.

Terdapat indikasi draf RUU memuat ketentuan yang disisipkan perusahaan pertambangan untuk mengamankan kepentingan bisnis. Penyelesaian RUU Minerba sangat dipengaruhi sejumlah kontraktor pertambangan besar. Salah satu poin yang dimasukkan dalam draf adalah perusahaan pertambangan secara otomatis mendapatkan perpanjangan kontrak jika kontraknya berakhir. Padahal jika kita mengikuti ketentuan dalam UU No.4/2009, perpanjangan itu tidak akan otomatis diperoleh. Karena besarnya arus penolakan dari masyarakat sipil, draf RUU tersebut akhirnya ditarik oleh pemerintah.

Setelah pembahasan draf RUU Minerba gagal dilanjutkan akibat penolakan publik, pada awal November 2018 pemerintah menyiapkan revisi ke-6 PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. Konsep revisi PP diakui KESDM telah melewati proses harmonisasi di Menko Perekonomian dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk ditandatangani Presiden Jokowi. Revisi PP antara lain terdapat pada ketentuan pasal 112 ayat 2 dengan menambah 4 angka menjadi ayat 2a, 2b, 2c dan 2d. Namun begitu, revisi PP berpotensi melanggar ketentuan dalam UU Minerba No.4/2009.

Pemerintah antara lain menyatakan perlu merevisi PP No.23/2010 guna memberi manfaat optimal bagi negara, menjamin kepastian berusaha bagi pengusaha dan kekhawatiran penurunan pendapatan negara jika dikelola BUMN. Kebodohan dan manipulasi informasi ini dengan gamblang disampaikan pemerintah kepada publik guna mengamankan kepentingan para kontraktor yang tampaknya sangat mudah mengintervensi kebijakan pemerintah.

Ternyata rencana perubahan ke-6 PP No.23/2010 memang dipersiapkan untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha PKP2B yang kontraknya akan berakhir beberapa tahun mendatang. Ada 7 kontraktor PKP2B yang kontraknya akan berakhir, yakni Tanito Harum (2019), Arutmin Indonesia (2020), Kaltim Prima Coal (2021), Multi Harapan Utama (2022), Adaro Indonesia (2022), Kideco Jaya Agung (2022) dan Berau Coal (2025). Belakangan, rencana revisi PP No.23/2010 diurungkan pemerintah akibat kuatnya advokasi penolakan masyarakat.

Setelah tenggelam pada Mei 2018, RUU Minerba kembali muncul sebagai upaya DPR agar RUU dapat ditetapkan sebagai UU sebelum masa bakti DPR 2014-2019 berakhir. Komisi VII DPR

pada 18 Juli 2019 memulai agenda Pembicaraan Tingkat 1 draf RUU tersebut pada Rapat Kerja dengan pemerintah yang diwakili Menteri ESDM dan Menteri Perindustrian, sekaligus membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan oleh Pemerintah.

Komisi VII DPR menghimbau pemerintah agar DIM RUU Minerba segera dikembalikan kepada DPR, sehingga UU dapat segera diselesaikan dalam waktu sekitar 3 minggu. Namun saat itu pemerintah belum satu suara, karena Menteri ESDM mengaku masih harus melakukan pembahasan dengan kementerian terkait yang menerima Amanat Presiden (ampres) untuk membahas RUU, yakni KESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.

Terungkap dalam Rapat Kerja Komisi VII di atas bahwa setidaknya ada 12 poin besar dalam DIM pemerintah. Dari 12 poin besar tersebut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal RUU Minerba (KMSK RUU Minerba, beranggotakan 57 LSM, termasuk IRESS) memandang draf RUU Minerba dan DIM pemerintah sangat bermasalah karena tidak mencerminkan kedaulatan

negara sebagaimana Pasal 33 UUD 1945.

DIM RUU Minerba dinilai justru memberikan peluang mengobrol sumber daya alam tanpa batas, serta berpotensi digunakan mengkriminalisasi masyarakat yang dituding menghalang-halangi kegiatan pertambangan. Draft RUU Minerba juga tidak berpihak pada keselamatan rakyat dan berpotensi menambah perluasan pembongkaran komoditas tambang baru mulai dari logam tanah jarang, radioaktif hingga tambang di laut dalam (*seabed mining*).

Draf tidak memperhatikan aspek kepentingan ekologis dan perlindungan lingkungan, serta tidak memberikan perlindungan atas hak-hak dan keselamatan warga. Hak rakyat dan masyarakat adat luput diberi ruang. Pada pasal 99 draf RUU Minerba termuat ketentuan yang melegitimasi lubang tambang untuk dijadikan irigasi dan wisata. Hal ini akan melegalkan perusahaan terus meninggalkan lubang maut dalam kegiatan penambangan. Namun, ternyata draf RUU lebih banyak membahas proses perizinan dan pengusaha tambang.

Dengan berbagai kekurangan yang ada, KMSK RUU Minerba telah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menarik kembali



DIM draf RUU Minerba dari pembahasan di Komisi VII DPR. Selain karena pasal-pasal dalam RUU Minerba bermasalah, DIM tersebut juga belum selesai dilakukan harmonisasi di internal Kementerian/Lembaga terkait. KMSK RUU Minerba mendesak Presiden dan DPR agar RUU Minerba yang sangat strategis tersebut dibahas secara terbuka, transparan dan tidak boleh dibahas secara serampangan apalagi kejar tayang, terutama guna memenuhi kepentingan segelintir kontraktor tambang.

Pembahasan RUU Minerba harus melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, tidak hanya oleh DPR, pemerintah dan pelaku usaha. Akademisi, lembaga non pemerintahan dan masyarakat sekitar pertambangan harus dilibatkan. Jika prasyarat tersebut tidak dipenuhi, maka pembahasan RUU Minerba harus segera dihentikan oleh DPR RI dan Pemerintah, terutama karena banyaknya permasalahan yang merugikan negara dan rakyat, serta terjadinya pelanggaran UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## Prospek pengelolaan SDA ke depan

Hingga 9 September 2019 pembahasan RUU Minerba oleh DPR dan Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda terbentuknya UU Minerba baru. Seandainya pun pemerintah dan DPR berhasil menyelesaikan DIM yang tertunda, dan UU akhirnya ditetapkan Presiden, karena banyaknya permasalahan dan pelanggaran terhadap konstitusi, maka UU tersebut diyakini akan segera di-*judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Terlepas dari berbagai permasalahan kebijakan dan peraturan yang diuraikan di atas, kita dapat memahami bahwa meskipun memiliki landasan filosofis dan konstitusional yang kuat, eksploitasi SDA untuk bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat belum akan dapat diraih secara optimal hingga saat ini, atau bahkan beberapa puluh tahun ke depan. Ternyata permasalahan utama terdapat pada subjek pemegang kekuasaan dan pengambil keputusan.

UU dan peraturan yang ditetapkan di sektor Migas dan Minerba memang masih memiliki banyak kekurangan dan perlu segera disempurnakan. Itu pula sebabnya mengapa pemerintah dan DPR sepakat untuk mela-

kukan revisi dan niat tersebut telah tertuang dalam Prolegnas 2014-2019. Walau demikian, ketentuan dalam UU Minerba sudah cukup memadai untuk memberikan manfaat terbaik bagi negara dan rakyat jika dijalankan dengan konsisten. Namun karena *moral hazard* oknum-oknum oligarki penguasa dan pengusaha, berbagai ketentuan dalam UU Minerba No.4/2009 dilanggar, sehingga manfaat terbaik luput tercapai.

Sebaliknya, dalam kasus UU Migas No.22/2001, revisi memang mendesak dilakukan, agar kepentingan strategis negara dan amanat konstitusi dapat terpenuhi. Ternyata kekurangan dalam aspek pengaturan tersebut terus dibiarkan berlangsung atau malah dimanfaatkan, agar berbagai penyimpangan yang lebih memihak kepentingan oligarkis tetap dapat berlangsung. Oknum-oknum oligarki tersebut tidak merasa penting untuk segera menyelesaikan pembahasan draf RUU Migas, walau drafnya telah disiapkan sejak 2008.

Ternyata “musuh” negara dan rakyat untuk dapat memperoleh manfaat terbesar dari pengelolaan SDA adalah oknum-oknum penguasa, baik yang berada di pemerintahan maupun di parlemen. Pengalaman IRESS mengadvokasi pengelolaan Blok

Mahakam dan Blok Rokan, atau tambang Newmont dan Freeport menunjukkan para oknum oligarki justru bekerja untuk para investor atau pengusaha, bukan untuk negara dan rakyat. Selebihnya, kita tidak perlu bertanya tentang oknum-oknum pengusaha, asing dan swasta nasional, yang pada umumnya bersifat rakus dan menghalalkan segala cara guna mempengaruhi penguasa.

Para oknum oligarkis tidak merasa khawatir jika cadangan SDA kita semakin menipis. Saat ini cadangan terbukti minyak nasional hanya sekitar 3,6 miliar barel dan akan habis dalam 12 tahun jika dikuras dengan *rate* rata-rata seperti sekarang, dan tidak ada penemuan cadangan baru yang signifikan. Begitu pula dengan cadangan terbukti gas 100 TCF yang diperkirakan bertahan dalam 60 tahun ke depan. Di sektor batubara, 20 miliar ton cadangan terbukti hanya dapat bertahan sekitar 50 tahun ke depan pada laju pengurusan sekitar 400 juta ton per tahun.

Menurut Indonesian Mining Institute (IMI), cadangan mineral per kapita nasional sangat minim jika dibagi dengan cadangan per kapita dunia. Nilainya adalah untuk bauksit 3,91 ton/kapita, emas 0,000000117 ton/kapita, nikel 0,018 ton/kapita, timah

0,0031 ton/kapita, tembaga 0,1 ton/kapita, dan batubara 169,67 ton/kapita. Cadangan mineral tersebut dibanding cadangan dunia adalah emas 5 persen, bauksit 4 persen, nikel 6 persen, batubara 3 persen, tembaga 3 persen dan timah 17 persen.

Ternyata maraknya kegiatan eksplorasi dalam 10-15 tahun terakhir, bukan saja telah menurunkan cadangan terbukti Migas nasional, tetapi telah pula membawa Indonesia ke fase kelangkaan cadangan mineral. Di satu sisi, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengindikasikan adanya upaya yang serius untuk mengatasi kelangkaan. RUU Migas dan RUU Minerba belum mengindikasikan adanya upaya serius untuk menggalakkan kegiatan eksplorasi guna meningkatkan cadangan. Pemerintah dan DPR tidak sensitif terhadap terjadinya masalah kelangkaan SDA tersebut. Di sisi lain, penjualan bahan mentah (*raw material*) masih terus berlangsung seperti

biasa, dan *term of trade* bahan mentah tersebut telah memicu terjadinya *over exploitation*.

Dalam konteks kehidupan demokrasi dan politik nasional yang berkembang akhir-akhir ini, maka menjadi *absurd* dan utopis jika kita bertanya tentang prospek manfaat pengelolaan SDA nasional bagi rakyat ke depan. Politik uang dan *moral hazard* semakin marak terjadi.

Sementara itu, kepentingan dan peran oligarki penguasa dan pengusaha tetap dominan dalam menentukan arah kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, jika masyarakat sipil dan para tokoh, akademisi dan mahasiswa tidak bersatu untuk melakukan advokasi, maka manfaat optimal SDA bagi kesejahteraan rakyat akan sulit tercapai. Jangankan bicara 100 tahun, bahkan dalam 10 atau 20 tahun ke depan sebagian jenis SDA tersebut justru telah akan habis karena salah kelola, *moral hazard* dan kerakusan. [ ]

# Determinan Model Bisnis Perbankan Islam: Kajian Literatur



**Firman Jatnika**



**Erie Febrian**

## Introduksi

Pembaharuan terus menerus pada aplikasi teknologi informasi telah mengubah secara revolusioner cara perusahaan menjalankan bisnis dan merespon tuntutan lingkungan. Inovasi berimplikasi pada akselerasi perubahan pada suatu lembaga bisnis, termasuk di sektor keuangan. Bahkan, secara rerata di seluruh industri, 28 persen

laba perusahaan dideterminasi oleh inovasi produk dan layanan (Barczak et al, 2009). Inovasi bisnis kemudian memaksa perusahaan-perusahaan melakukan penyesuaian model bisnis agar tetap kompetitif.

Demikian pula, peningkatan diferensiasi model bisnis dalam konteks strategis menjadikan pertimbangan komponen strategi model bisnis semakin krusial (Chesbrough dan Rosenbloom, 2002). Pendekatan model bisnis juga memungkinkan analisis struktur kompetisi dan keputusan inovasi strategis dilakukan dengan lebih baik.

Kondisi ini mendorong pembahasan konsep Model Bisnis (MB) dan Inovasi Model Bisnis (IMB) semakin signifikan dalam penelitian makro manajemen pada beberapa tahun terakhir (Spieth, Schneckenberg & Ricart, 2014). Konsep model bisnis pada awalnya dikaitkan dengan aktivitas operasi untuk pemodelan dan teknologi informasi (Wirtz et al., 2016). Kemudian pada pertengahan tahun 1990an, pakar kewiraswastaan dan strategi menerapkan konstruksi tersebut sebagai deskripsi menyeluruh tentang proses bisnis utama perusahaan dan bagaimana hubungan antar variabel tersebut (Zott et al., 2011).

## Model bisnis

Setiap entitas bisnis yang sukses seyogyanya telah mengimplementasikan Model Bisnis (MB) yang efektif. Melalui proses identifikasi komponen pendukung model bisnis secara komprehensif, orang-orang bisa memahami mekanisme model bisnis membangun *value proposition* untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumberdaya dan proses yang diperlukan (Mark, et al, 2011). Model bisnis memiliki tiga komponen, yaitu proposisi nilai, konstelasi nilai, dan persamaan laba (Yunus et al., 2010). Sebuah proposisi nilai mendefinisikan konsumen perusahaan dan nilai yang dapat ditawarkan perusahaan kepada mereka. Konstelasi nilai berkaitan dengan cara perusahaan memberikan penawaran kepada pelanggan. Lalu, persamaan laba merinci cara nilai diperoleh dari pendapatan yang dihasilkan oleh proposisi nilai.

Model Bisnis, dalam perspektif dinamis, berjalan secara berkesinambungan dan secara periodik mengalami perubahan di sisi komponen, hubungan dan struktur. Dengan demikian, kami memformulasikan bahwa Model bisnis pada prinsipnya adalah sistem yang mengintegrasikan seluruh elemen dalam proses implementasi strategi perusa-

haan dalam kebijakan, aktifitas dan mengalokasikan sumberdaya untuk mencari kesempatan bisnis, menciptakan dan menghantarkan *value* terhadap konsumen dan pasar yang dibidik untuk menghasilkan keuntungan ekonomis bagi perusahaan dan masyarakat.

## Inovasi model bisnis

Kompetisi bisnis di lingkungan yang berubah dengan cepat membutuhkan ketangkasan dalam memahami dan mengembangkan peluang untuk menciptakan inovasi (Afuah & Tucci, 2003), meningkatkan respons terhadap gangguan (Doz & Kosonen, 2010) dan meningkatkan ketahanan terhadap ancaman eksternal (Demil & Lecocq, 2010). Inovasi model bisnis yang berubah dari waktu ke waktu menggambarkan upaya perusahaan jika ingin tetap kompetitif di dunia yang kompleks dan mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan (Doz & Kosonen, 2010; Teece, 2010). Perusahaan-perusahaan besar dan mapan yang berinovasi dalam bisnis model mereka mengalami efek kinerja positif (Cucculelli & Bettinelli, 2015). Perusahaan juga mendapat keuntungan dari menemukan model bisnis baru atau

menerapkan model bisnis yang berbeda agar tetap inovatif (Carayannis, Sindakis, & Walter, 2014), di lain pihak, dalam melakukan pembaharuan model bisnis atau rekonfigurasi ulang model bisnis.

Inovasi model bisnis adalah konsep terbaru di antara serangkaian berbagai konsep inovasi, dan mencakup/mewakilkkan sebuah sistem aktivitas baru yang mengikutsertakan inovasi, pembentukan nilai yang menangkap struktur perusahaan serta aliansinya (Bouncken and Fredrich, 2016). Lebih jauh, Spieth et al (2014) memaparkan bahwa Inovasi Model Bisnis terutama mencakup eksplorasi di bidang kewirausahaan, inovasi dan manajemen teknologi, dan strategi perusahaan. Pada dasarnya, ada tiga jenis Inovasi model bisnis: yaitu teknologi, nilai jaringan, dan hambatan keuangan (Koen et al.. 2011).

Meskipun tidak ada definisi universal tentang model bisnis, hampir semua peneliti, ilmuwan dan orang-orang dari industri dengan suara bulat menyetujui pentingnya, penerapan dan relevansi konsep inovasi model bisnis (Amit and Zott, 2012; dan Bashir et al, 2016). Periset, ilmuwan dan eksekutif puncak dengan suara bulat menyetujui bahwa inovasi model bisnis

sama-sama merupakan bentuk inovasi baru yang berbeda dari inovasi produk atau proses (Baden-Fuller dan Mange-matin, 2013; Björkdahl dan Holmén, 2013; dan Massa dan Tucci, 2014).

Inovasi Model bisnis telah didefinisikan dalam banyak cara, yang menurut Foss and Saebi (2017) secara umum terdapat empat aliran utama penelitian inovasi model bisnis yakni: i) konseptualisasi inovasi model bisnis, yang menawarkan definisi dan konseptualisasi inovasi model bisnis; ii) inovasi model bisnis sebagai proses perubahan organisasi, yang menekankan pada kemampuan, kepemimpinan, dan mekanisme pembelajaran yang dibutuhkan untuk kesuksesan inovasi model bisnis; iii) inovasi model bisnis sebagai hasil, yang fokus pada hasil proses perubahan organisasi-penerapan bisnis model baru dan inovatif, yang biasanya dikontekstualkan dengan cara tertentu; iv) konsekuensi dari inovasi model bisnis, yang membahas pengaruh inovasi model bisnis terhadap kinerja organisasi.

Akhirnya, Schneider dan Spieth (2013) mengembangkan kerangka penelitian model bisnis berdasarkan perbedaan perkembangan model bisnis dan inovasi model bisnis, di mana inovasi

model bisnis merupakan respon terhadap perubahan sumber penciptaan nilai, sementara model bisnis adalah perubahan yang berkelanjutan. Akibatnya, inovasi model bisnis secara dominan berakar pada kewirausahaan strategis, sementara pengembangan model bisnis berakar pada konsep pandangan berbasis sumber daya dan perspektif kapabilitas dinamis.

Dalam konteks ikhtiar pengembangan perbankan Islam di negara muslim dan berkembang, misalnya Indonesia, bank-bank Islam perlu mereformulasikan model bisnisnya dengan memperhatikan beberapa titik penting, termasuk 1) dinamika perkembangan literasi teknologi perbankan, baik di kelompok konsumen maupun praktisi perbankan syariah; 2) sinkronisasi ide pengembangan produk dengan *syariah-compliance*; dan 3) dukungan para *stakeholder* perbankan Islam.

Pertama, kemajuan teknologi informasi telah diadopsi dengan baik dalam sistem keuangan nasional di berbagai perekonomian. Potensi pelanggaran syariah pada praktik adopsi teknologi informasi lebih banyak terletak pada transaksi *ayn bi ayn* (uang dengan uang). Dengan teknologi informasi, transaksi bisa dipercepat, namun juga membuka

peluang masalah. Pola transaksi non fisik banyak memunculkan ide tentang media pengganti uang yang dapat bermuara ke transaksi gharar. Bank-bank Islam perlu mewaspadai model bisnis yang memanfaatkan teknologi perbankan dalam transaksi *ayn bi ayn*.

Kedua, proses pengembangan produk bank Islam perlu selalu merujuk pada rekomendasi atau fatwa pihak yang berkompeten dalam hukum Islam. Tuntutan untuk bersaing dengan sesama bank Islam dan bank konvensional tidak serta merta membolehkan bank Islam melonggarkan dasar syariahnya. Tentu saja menjadi tantangan yang berat bagi manajemen untuk mendesain produk yang tetap marketable bagi pasar yang semakin pragmatis di tengah tuntutan *syariah compliance*.

Terakhir, dukungan para pemangku kepentingan dengan berbagai latarnya kepada kinerja bank Islam menjadi krusial. Aura kemunduran kinerja industri perbankan Islam di negara muslim terbesar di dunia, Indonesia, misalnya, menjadi cambuk bagi segenap pihak yang peduli terhadap industri ini. Dukungan pemerintah yang stagnan dan kurang tepat, dukungan pasar yang tidak konsisten, dan dukungan akademisi yang tidak

efektif membuat industri ini serasa kehilangan momentum. Industri perbankan Islam mencoba bertahan di tengah gelombang persaingan yang tidak seimbang. Usianya sudah 27 tahun kini, tapi industri ini keluar dari inkubatornya lebih awal tanpa perlindungan yang ekonomis, sehingga wajar jika hingga saat ini terus berjuang hidup.

### Kapabilitas dinamis dan *Customer Knowledge Management* (CKM)

Perusahaan harus terhubung dengan pelanggan untuk membuat mereka sadar akan perubahan eksternal dan mengekstraksi ide, informasi, dan pengetahuan pelanggan. CKM memberi umpan balik khusus bagi perusahaan untuk tetap mengetahui kebutuhan pelanggan. Melalui CKM, pelanggan dapat menerima dan memberikan umpan balik langsung dan berbagi informasi mereka, yang merupakan peningkatan penciptaan nilai dan inovasi (Johannessen dan Olsen, 2010).

Secara umum, pelanggan memainkan peran aktif dan signifikan dalam inovasi, karena ide-ide mereka jauh lebih dekat dengan kebutuhan pasar (Hoyer et al., 2010). Gagasan dan

pengetahuan pelanggan dapat menghasilkan produk/ layanan baru atau meningkatkan produk/ layanan yang ada, yang mungkin diabaikan oleh perusahaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perilaku organisasi yang berorientasi pasar sebagai aset strategi utama yang mengarah pada keunggulan kompetitif memungkinkan perusahaan untuk membuat penawaran nilai tambah bagi pelanggan yang menghasilkan posisi kompetitif yang unggul di pasar (Cac-ciolatti & Lee, 2016; Rakthin, Calantone, & Wang, 2016). Dalam alur pemikiran ini, sejumlah besar literatur membingkai orientasi pasar sebagai aset tidak berwujud penting yang penting untuk mencapai peningkatan kompetitif yang berkelanjutan (misalnya, Lonial & Carter, 2015; O'Cass et al., 2015).

Melalui CKM, perusahaan meningkatkan kapasitas integratif mereka, yang didefinisikan sebagai kapabilitas perusahaan untuk melibatkan pelanggan dalam proses inovasi untuk menciptakan nilai (Belkahl dan Triki, 2011). Dalam integrasi pasif, CKM mengumpulkan pengetahuan tentang pelanggan melalui beberapa metode, seperti frekuensi pembelian pelanggan, analisis keluhan mereka, fitur sosial-demografis mereka, dll. Di sisi lain, dalam integrasi aktif,



CKM mengumpulkan pengetahuan dari pelanggan melalui beberapa teknik, seperti studi pasar, forum diskusi online, jejaring sosial, grup fokus dengan pelanggan, dan lain-lain.

Perbankan Islam di negara-negara Muslim, khususnya Indonesia, sesungguhnya telah memahami pola-pola di atas. Namun, bank-bank Islam tampak kesulitan mempraktikkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien mengingat sebagian besar bank tersebut masih jauh dari titik skala ekonomisnya, dibandingkan dengan sebagian besar bank konvensional. Proteksi dan dukungan pemerintah di tahun-tahun awal operasi industri ini tampak ambivalen dan kurang sesuai, sehingga hingga hari ini, industri ini tetap masih merangkak mengejar pasar.

## Kapabilitas dinamis dan religiusitas

Religiusitas pegawai dapat menghasilkan berbagai hasil positif—seperti peningkatan komitmen organisasi dan kepuasan kerja (Sikorska-Simmons 2005), perasaan bahwa pekerjaan itu bermakna (Harpaz 1998), kesediaan untuk bekerja lebih lama (Snir dan Harpaz 2004), perilaku yang berhubungan

dengan konsumsi berkelanjutan (Minton et al. 2015), dan perilaku pegawai yang sifatnya kooperatif dan loyal terhadap tujuan organisasi (Kutcher et al. 2010).

Terdapat berbagai penelitian yang berusaha meneliti bagaimana energi pribadi dari nilai-nilai religiusitas yang memengaruhi organisasi (Shinde dan Fleck 2015). Park, Edmondson, dan Hale-Smith (2013) berpendapat bahwa agama itu berakar pada makna-sistem motivasi. Mereka menyatakan bahwa individu menggunakan agama sebagai cara untuk menemukan makna yang signifikan untuk bekerja, menumbuhkan kontrol di lingkungan mereka, dan mengurangi ketidakpastian.

Islam sangat mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam berkontribusi secara sukarela untuk kesejahteraan organisasi mereka (Alhyasat 2012; Murtaza et al. 2016), termasuk dengan mengidentifikasi solusi inovatif untuk masalah organisasi (Kumar dan Che Rose 2012). Religiositas mungkin menghasilkan kecenderungan menuju konformisme secara umum (Saroglou et al. 2009), tetapi prinsip-prinsip yang mendasari iman Islam—dan khususnya gagasan Zakat, salah satu dari lima pilar kode kehi-

dupan Islam, yang mengharuskan orang untuk menjadi proaktif dalam mengurangi situasi yang merugikan (Olanipekun et al. 2015; Zaman et al. 2018)—mendukung gagasan bahwa karyawan harus melakukan yang terbaik untuk mengubah dan meningkatkan *status quo* organisasi, bahkan jika upaya ini tidak dimasukkan dalam deskripsi pekerjaan formal.

Lembaga-lembaga ZIS (zakat, infaq, dan sadaqoh) perlu diintegrasikan secara sistematis dengan upaya pengembangan perbankan Islam di suatu perekonomian. Dengan demikian, konsep dan cita-cita sosial dari keberadaan perbankan Islam menjadi realita, khususnya bagi masyarakat Muslim. Lebih jauh, upaya itu akan menjadi penopang bagi bank-bank Islam untuk mengupayakan skala ekonomisnya dan keberlanjutan bisnis.

### *Customer Knowledge Management (CKM) dan religiusitas*

Religiusitas telah ditemukan sebagai faktor yang mempengaruhi utama bagi umat Islam ketika membeli jasa lembaga keuangan syariah (Omer, 1992), memilih bank Islam (Khan et al., 2007) dan mengadakan pem-

biayaan rumah Islam (Alam et al., 2011). Studi-studi ini menunjukkan bahwa bank syariah menikmati basis kekuatan yang relatif kuat di antara para pelanggan yang menekankan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam praktik lembaga keuangan yang mereka pilih.

Niat untuk membeli adalah faktor penentu utama perilaku pembelian aktual (Morwitz et al., 2007). Hubungan positif antara religiusitas dan niat beli diterima secara luas (Al-Hyari et al., 2012). Namun, dampak religiusitas pada perilaku pembelian konsumen Muslim lebih mendalam (Ismail et al., 2012) karena masyarakat Islam dipengaruhi oleh pandangan dunia Islam yang berbeda berdasarkan Syariah. Prinsip-prinsip Islam sangat jelas tentang apa yang dipraktikkan seorang Muslim dan tidak diizinkan untuk dikonsumsi.

Semakin seorang konsumen Muslim yang saleh, semakin besar kemungkinan konsumen akan berhati-hati dalam membeli produk tersebut. Secara khusus, konsumen Muslim ini akan mempertimbangkan untuk membeli suatu produk jika mereka yakin bahwa produk tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan kepercayaan suci mereka. Religiusitas Muslim berdampak pada keterlibatan

pembelian konsumen Muslim (Rehman dan Shabbir, 2010) dan niat untuk memilih produk yang sesuai dengan Syariah (Mukhtar dan Butt, 2012).

Dengan lembaga keuangan Islam yang menawarkan produk keuangan syariah dan layanan yang mematuhi prinsip, nilai, dan tujuan Islam, hasil penelitian memperkirakan bahwa alasan agama adalah motivator prinsip bagi umat Islam dalam berurusan dengan lembaga keuangan Islam (Amin et al., 2011).

Pilihan produk halal dipengaruhi oleh tingkat religiusitas konsumen Muslim, karena Muslim yang sangat religius cenderung menjalani kehidupan mereka sesuai dengan aturan Islam. Temuan ini diperkuat oleh Razzaque dan Chaudhry (2013) yang menemukan kepercayaan agama memiliki efek signifikan pada pengambilan keputusan konsumen.

Meski demikian, religiusitas memerlukan suatu inkubasi iman dan taqwa yang memadai, setidaknya dalam bentuk upaya-upaya perluasan praktik-praktik ke-Islaman sehari-hari di berbagai komunitas dan lingkungan. Hal ini mengingatkan bahwa dalam Islam, praktik ekonomi (termasuk perbankan) adalah bagian integral dalam realisasi perintah Allah Ta'ala bersamaan

dengan perintah di berbagai aspek hidup lainnya secara utuh.

## Kapabilitas dinamis dan inovasi model bisnis

Berdasarkan *Resource Based View*, kapabilitas proses bisnis adalah sumber daya paling berharga yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, karena mereka dilindungi oleh mekanisme terisolasi seperti kompleksitas sosial, ketergantungan jalur dan kondisi historis yang unik (Fathy dan Hooley, 2002). Selain itu, para peneliti berpendapat kapabilitas ini sebagai mediator penting dalam berpotensi mewujudkan kinerja perusahaan dari penggagas sumber daya pengetahuan (Haas dan Hansen, 2005).

Secara khusus, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kapabilitas proses inti, seperti manajemen hubungan pelanggan, manajemen rantai pasokan dan manufaktur fleksibel, memiliki dampak langsung pada kinerja organisasi (Santhanam et al., 2007). Secara khusus, konsep *Balanced Score Card* juga menyiratkan bahwa kapabilitas proses bisnis adalah pendorong penting untuk mempengaruhi kinerja keuangan dan pelanggan.

Pengaruh kapabilitas dinamis pada setiap fase inovasi manajemen adaptif konsisten dengan sebagian besar penelitian tentang hubungan antara Kapabilitas dinamis dan inovasi (misalnya, Cheng & Chen, 2013; Clausen, 2013; Kohlbacher, 2013).

Hasil penelitian Lin dan Su (2014) menunjukkan inovasi manajemen sebagai proses akuisisi pengetahuan, asimilasi, transformasi dan eksploitasi. Lebih khusus lagi, kapasitas daya serap memungkinkan perusahaan untuk memulai inovasi, secara efisien mendapatkan informasi dari luar, dan jelas memahami nilai potensinya melalui akuisisi pengetahuan dan asimilasi. Akibatnya, perusahaan dapat mengintegrasikan inovasi dengan sumber daya internal melalui transformasi dan eksploitasi pengetahuan; dan secara efektif mengimplementasikan inovasi melalui eksploitasi pengetahuan.

Hasil penelitian juga menunjukkan tentang kapabilitas integratif yang mengkonfirmasi efek positif dan signifikan dari kapabilitas integratif pada proses inovasi, khususnya implementasi. Hal ini menunjukkan suatu proses yang tergantung pada tingkat kapabilitas organisasi yang lebih tinggi dalam melengkapi sumber daya yang ada melalui peningkatan,

replikasi dan penciptaan dengan sukses (Helfat & Peteraf, 2003).

Lebih khusus, penelitian ini mengkonfirmasi ketergantungan kapabilitas integratif pada implementasi dan tugas penting untuk mendirikan basis sumber daya internal baru untuk inovasi, dan mendukung Lin dan Su (2014) yang menyarankan implementasi sebagai proses integrasi.

### *Customer Knowledge Management (CKM) dan inovasi model bisnis*

Fokus CKM pada dasarnya diawali dari upaya perusahaan untuk menyerap dan memahami pengetahuan dari pelanggan yang menghasilkan pengetahuan tentang pelanggan. Atas dasar pengetahuan pelanggan, perusahaan bisa melakukan identifikasi dan membuat fitur yang unik dan membangun strategi yang spesifik terhadap segmen yang dituju dengan efektif.

Kapabilitas inovasi perusahaan melihat dan memanfaatkan tiap peluang bertambah baik karena bertambahnya pengetahuan dan pemahaman tentang kebutuhan dan ekspektasi pelanggan (Lee et al., 2011). Lebih jauh, inovasi yang diciptakan perusahaan berdasarkan ide-ide pelanggan

lebih mutakhir, realistis dan gampang diterima serta dapat meningkatkan kepuasan pasar dan pelanggan. Bahkan kapabilitas mengelola dan mendayagunakan pengetahuan pelanggan adalah basis kapabilitas berkelanjutan untuk kinerja yang unggul. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperbarui pengetahuan mereka sesuai dengan informasi pelanggan mereka.

Studi Lee et al. (2011) memperlihatkan pengaruh langsung dan signifikan pengetahuan pelanggan terhadap kinerja bisnis. Sebaliknya temuan Ngo dan O'Cass (2012) memperlihatkan pengaruh tidak langsung dari partisipasi pelanggan terhadap kinerja operasional. Walaupun hubungan empiris antara CKM dan kinerja bisnis telah diselidiki, hanya beberapa hasil studi yang menunjukkan efek langsung CKM pada kinerja bisnis.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa CKM berpengaruh terhadap peningkatan kinerja bisnis secara tidak langsung melalui kapabilitas inovasi yang lebih tinggi. Selain itu, CKM adalah sejenis manajemen pengetahuan eksternal yang terkait dengan pelanggan (Zhang, 2011).

Melalui CKM, pelanggan dapat menerima dan memberikan umpan balik langsung dan berbagi informasi mereka, yang merupakan peningkatan penciptaan nilai dan inovasi (Johannessen dan Olsen, 2010). Secara umum, pelanggan memainkan peran aktif dan signifikan dalam inovasi, karena ide-ide mereka jauh lebih dekat dengan kebutuhan pasar (Hoyer et al., 2010). Gagasan dan pengetahuan pelanggan dapat menghasilkan produk/layanan baru atau meningkatkan produk/layanan yang ada, yang mungkin diabaikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, jika pengetahuan pelanggan dikelola secara efektif, itu dapat meningkatkan proses inovasi dan kegiatan R&D (Rowley, 2002; Rollins dan Halinen, 2005) dan juga mempengaruhi masa depan inovasi organisasi (Lopez-Nicolas dan Molina-Castillo, 2008; Zhang et al., 2009).

Melalui CKM, perusahaan meningkatkan kapasitas integratif mereka, yang didefinisikan sebagai kapabilitas perusahaan untuk melibatkan pelanggan dalam proses inovasi untuk menciptakan nilai (Belkahl dan Triki, 2011). Dalam integrasi pasif, CKM mengumpulkan pengetahuan tentang pelanggan melalui beberapa metode, seperti frekuensi pembelian pelanggan,

analisis keluhan mereka, fitur sosial-demografis mereka, dan lain-lain.

## Religiusitas dan inovasi model bisnis

Religiusitas bermanfaat untuk bisnis dalam menghadapi perubahan lingkungan (Patel, 2003). Dalam analisis lintas negara, penelitian Barro dan McCleary (2003) menunjukkan bahwa religiusitas berdampak positif pada pertumbuhan perusahaan. Selain itu, religiusitas berfungsi sebagai katalis bagi karyawan untuk menerapkan energi pribadi untuk melakukan perubahan (Quinn et al. 2012). Konsisten dengan logika teori COR (Hobfoll 1989, 2001), tantangan ini berkurang sejauh karyawan dapat mengambil dari sumber daya pribadi, seperti religiusitas, yang meningkatkan motivasi mereka untuk melakukan kegiatan yang berorientasi perubahan secara sukarela karena keuntungan sumber daya tambahan yang dihasilkan melalui pemenuhan pribadi. Demikian pula, karyawan yang ditandai dengan tingkat religiusitas yang tinggi termotivasi untuk melakukan perilaku kewarganegaraan yang berorientasi pada perubahan, karena mengubah dan meningkatkan *status quo* organisasi

konsisten dengan nilai-nilai dan harapan yang terkait dengan keyakinan keagamaan mereka (Kutcher et al. 2010; Murtaza et al. 2016).

Agar bisnis perusahaan untuk bertahan hidup—tujuan utama mereka—mereka harus mendukung melalui orientasi jangka panjang koeksistensi inovasi dan etika, dan harus mengizinkan kombinasi positif mereka dengan mengintegrasikan proses etika yang dilembagakan ke dalam perangkat inovasi mereka (Brans dan Gallo 2007; Gallo 2004; Le Menestrel dan Van Wassenhove 2004).

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh kepercayaan budaya terhadap kualitas laba (Nabar dan Thailand 2007; Doupnik 2008; Han et al. 2010; Kanagaretnam et al. 2011). Ghoul et al. (2012) mencatat bahwa meskipun banyak penelitian melaporkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dari agama di tingkat individu, hanya baru-baru ini para peneliti mulai memeriksa dampaknya di tingkat perusahaan dan, khususnya, pengaruhnya terhadap pelaporan keuangan.

## Inovasi model bisnis dan kinerja bisnis

Menurut Calantone et al. (2002) inovasi adalah determinan utama kinerja organisasi. Tidd (2001) menggunakan 2 (dua) kategori untuk membagi ukuran yang digunakan untuk membuktikan hubungan antara inovasi dan kinerja bisnis. Kategori pertama menyangkut kinerja akuntansi dan keuangan. Langkah-langkah ini termasuk profitabilitas, pengembalian investasi dan harga saham.

Kategori kedua terkait kinerja pasar, misalnya pangsa atau pertumbuhan (Tidd, 2001). Banyak studi sebelumnya telah mengkonfirmasi hubungan positif antara *innovativeness* dan kinerja bisnis organisasi (Cho dan Pucik, 2005; Cho dan Pucik, 2005; Chapman, 2006; Armbruster et al., 2008). Menurut Chapman (2006), inovasi memiliki pengaruh kuat terhadap kesuksesan finansial.

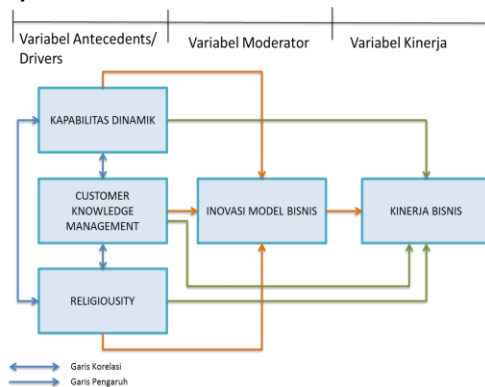
Inovasi organisasi itu sendiri memiliki dampak pada kinerja bisnis melalui perubahan produktivitas, waktu, kualitas dan fleksibilitas (Armbruster et al., 2008). Cho dan Pucik (2005) telah mempelajari bagaimana inovasi dan kualitas organisasi memengaruhi kinerja. Mereka menemukan bahwa inovasi

adalah pendorong pertumbuhan, kualitas adalah pendorong keuntungan, dan keduanya adalah pendorong nilai pasar. Inovasi juga memengaruhi profitabilitas secara tidak langsung melalui kualitas (Cho dan Pucik, 2005).

Meskipun inovasi model bisnis sering diperlakukan sebagai sifat organisasi yang positif, inovasi mungkin datang dengan biaya (biaya Litbang yang lebih tinggi, kegagalan produk, pergantian karyawan, dll.) Dengan hasil bersih bahwa kadang-kadang lebih menarik untuk mengadopsi strategi pengikut (Aspara et al. 2010; Naranjo-Valencia et al. 2011; Simpson et al. 2006). Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, inovasi model bisnis dapat mengakibatkan kinerja keuangan yang lebih rendah (Aspara et al. 2010).

Penelitian yang menghubungkan model bisnis yang inovatif dan kinerja termasuk: model baru dibuat untuk *e-commerce* (Zott dan Amit, 2007), gangguan radikal dari suatu industri (Christensen dan Raynor, 2003), perluasan pasar (Markides, 1999), dan keunggulan kompetitif untuk inovasi (Hamel, 2000).

## Model bisnis perbankan syariah



## Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi berbagai literatur di sesi 2 di atas, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat kapabilitas dinamis, *customer knowledge management*, *religiosity*, inovasi model bisnis dan kinerja bisnis perbankan syariah di Indonesia.

2. Kapabilitas dinamis dan *customer knowledge management* melalui inovasi model bisnis, berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis perban-

kan syariah di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung.

3. *Customer knowledge management* dan *religiosity* melalui inovasi model bisnis, berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis perbankan syariah di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung

4. Kapabilitas dinamis dan *religiosity* melalui inovasi model bisnis, berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis perbankan syariah di Indonesia secara langsung maupun tidak langsung

5. Kapabilitas dinamis, *customer knowledge management*, dan *religiosity* melalui inovasi model bisnis, berpengaruh positif terhadap kinerja bisnis perbankan syariah di Indonesia secara simultan maupun parsial. [ ]

\*\* Bersangkutan dengan jumlah halaman, daftar pustaka tidak kami sertakan.



# Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Ekologis Indonesia di 2045



**Naufal Muttaqien Shidiq**

Abad 21 menjadi era kompetisi global yang disertai dengan hadirnya revolusi industri 4.0. Kecepatan perkembangan teknologi memengaruhi perkembangan peradaban umat manusia. Dapat dikatakan abad ini memasuki era yang penuh ketidakpastian, sehingga menjadi tantangan besar bagi perkembangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan menjadi elemen penting bagi keberlanjutan bangsa ini.

Indonesia akan menginjak umur 100 tahun pada tahun 2045 mendatang, tepat 100 tahun setelah kemerdekaannya. Untuk menyambut perayaan umurnya, terdapat istilah “Indonesia Emas”. Indonesia Emas mempunyai makna sebagai momen-

tum mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan tinggi di mata dunia dalam segala aspek pembangunan. Pada tahun 2045, Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk 70 persen dalam usia produktif (15-64 tahun) dan 30 persen dalam usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Tingginya angka pada usia produktif menjadi potensi harta karun yang dapat menjadi modal pembangunan bangsa ini.

## Apa itu pembangunan?

Sebagai konsep, istilah pembangunan senantiasa diperdebatkan, banyak makna, dan elusif. Setiap pihak yang terlibat atau yang dilibatkan mempunyai arti masing-masing tentang pembangunan.

Sebagai proses, pembangunan itu bersifat dinamis. Dalam arti mencakup perubahan dari satu keadaan ke yang lainnya, dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dalam suatu ruang beserta orang-orangnya dan dalam rentang masa tertentu. Secara ideal, perubahan tersebut dapat dipandang positif oleh semua pihak seperti dalam peningkatan kuantitas dan kualitas rata-rata dan hal-hal yang dianggap baik,

seperti tingkat kemajuan ekonomi, kemajuan infrastruktur, kemakmuran, dan tingkat kesehatan. Namun, realitas sosial di balik tingkat-tingkat tersebut tak selalu sama dengan yang terangkap oleh angka-angka. India dan Brasil dapat dikatakan memiliki tingkat pendapatan rata-rata nasional dalam tataran ekonomi global, tetapi tidak menghapus kenyataan bahwa ratusan juta orang masih hidup dalam kemiskinan yang brutal.

Sebagai praktik, pembangunan seringkali dipandang sebagai sesuatu yang diupayakan atau dikerjakan oleh sekelompok agen pembangunan dan pemerintah kepada kelompok yang lain, seperti petani. Artinya untuk mencapai pembangunan yang berorientasi kepada kemakmuran harus melibatkan banyak elemen. Namun, meski konsep partisipasi sudah menjadi bagian dari konsep pembangunan saat ini, tetapi faktanya tetap saja pembangunan adalah proses yang ditentukan oleh pengambil kebijakan dalam konteks negara. Dalam hal ini partisipasi berbagai elemen dalam pembangunan mutlak diperlukan.

Jika ditarik kesimpulan, maka pembangunan merupakan proses mengubah alam dan dunia sosial-ekonomi yang memungkinkan orang mencapai potensi-potensi

kemanusiaannya melalui sarana-sarana ekonomi-politik. Pembangunan mempunyai rentang arti yang cakupannya bergantung pada konteks tempat konsep itu dipakai dan dapat juga digunakan sebagai sarana untuk mengakomodasi kepentingan berbagai macam agenda yang dipegang oleh pihak-pihak yang terlibat.

Untuk mewujudkan Indonesia Emas harus dilakukan pembangunan merata pada semua aspek yang tentunya bermula dari pembangunan manusianya terlebih dahulu. Permasalahannya adalah ketika bangsa ini sedang berjuang untuk mencapai pembangunan, seringkali kita tidak sadar bahwa produk yang dihasilkan malah pembangunan degeneratif.

Pembangunan degeneratif mengacu pada kemajuan di satu sisi, namun terdapat kemunduruan atau kerugian di satu sisi yang lainnya.

Konferensi Stockholm (1972) oleh PBB tentang lingkungan hidup memaparkan fakta bahwa ekonomi adalah panglima tolak ukur keberhasilan pembangunan. Jika ditelaah kembali, isu pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan isu lingkungan. Di negara-negara industri maju, isu lingkungan turut terbawa ke negara-negara berkembang (ter-

masuk Indonesia) ketika model pembangunan yang dilakukan berwatak kapitalis dan sifatnya eksploitatif terhadap lingkungan. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi dapat dikatakan pembangunan degeneratif jika sifatnya eksploitatif terhadap lingkungan.

Di berbagai negara, sumber daya alam dan lingkungan dieksploitasi secara besar-besaran dengan kurang memperhatikan dampak sosial. Pada era sekarang tampaknya pembangunan hanya sekadar upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dengan bertumpu pada sumber daya alam dan sarana eksploitasinya yang memang dirancang untuk sebesar mungkin mengambil dari alam. Pada titik ini, manusia melakukan upaya-upaya pembangunan yang tidak mempertimbangkan Kenyataan bahwa alam tidak selamanya memberikan kita sumber daya. Pada akhirnya lingkungan alam hanya sekedar dijadikan bahan baku bagi pertumbuhan ekonomi tanpa menyadari batasnya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang hebat.

Akar dari kerusakan lingkungan saat ini terletak dalam cara pikir modern yang antroposentris, yaitu pandangan ekologis modern yang lebih didasarkan pada

superioritas manusia atas alam selebihnya dan memperlakukan alam sebagai sumber daya belaka yang ada hanya untuk dieksploitasi. Cara pandang semacam ini paling menonjol dalam praktik pembangunan ekonomi yang selalu mengejar pertumbuhan ekonomi semata. Dengan cara pandang seperti ini, kemakmuran ekonomi menjadi satu-satunya ukuran dan mengabaikan dampaknya terhadap kondisi sosial dan lingkungan tempat satu-satunya perekonomian bertopang secara material.

Di Indonesia sendiri, pembangunan ekonomi melalui infrastruktur sedang masif dilakukan pada rezim Presiden Jokowi saat ini. Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Ballroom Ritz Carlton Hotel, Jakarta, 2017 lalu meyakini bahwa pembangunan ekonomi Indonesia akan mencapai puncaknya tahun 2045. Sebagai pondasi, pemerintahnya akan membangun infrastruktur (pelabuhan, jalan tol, bandara udara), membangun industri pengolahan (sawit, karet, jagung, minyak goreng, kosmetik, dll), dan membangun industri jasa utamanya pariwisata (Mandalika, NTB; Pulau Komodo, NTT; Kepulauan Seribu, DKI Jakarta; Danau Toba, Sumatera Utara; dan sebagainya).

Pembangunan infrastruktur memang erat dengan rezim Presiden Jokowi, namun pembangunan tersebut perlu *social mapping* yang mendalam oleh tim ahli agar tepat sasaran. Tidak sedikit lingkungan alam— seperti bukit, dialihfungsikan menjadi sarana infrastruktur. Mirisnya, lahan tersebut malah berubah menjadi lahan kritis yang dapat menimbulkan banjir dan longsor. Dalam kasus ini, pemerintah perlu lebih arif dalam menentukan kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan.

Dari pandangan di atas dapat diartikan bahwa kualitas pemerintah atau kelembagaan dapat memengaruhi hubungan pembangunan dan lingkungan. Mustahil atau sulit sekali mengembangkan sistem yang efisien dan seimbang dalam pengelolaan barang publik seperti laut dan hutan, baik secara lokal maupun global, tanpa institusi-institusi demokratis yang berkualitas. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi Indonesia sebagai negara demokratis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

Indonesia memiliki ciri sistem perekonomian sebagai negara demokratis, yaitu sistem pasar bebas dan kuat. Dryzel (1987) menemukan bahwa di negara

demokrasi dengan ciri ekonomi pasar yang kuat, terdapat kelompok-kelompok pelobi bisnis yang kuat juga. Menurutnya, ada banyak negara yang para pemimpin politiknya amat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok pelobi perusahaan multinasional.

Kasus seperti itu di Indonesia sudah menjadi rahasia umum yang menjadi keresahan bersama. Dalam konteks ini, demokrasi dianggap tidak berdampak positif terhadap perlindungan kualitas lingkungan karena arah kebijakan pembangunan diutamakan untuk memuaskan kepentingan pasar dan kelompok pelobi yang tujuan utamanya ialah memaksimalkan keuntungan ekonomi ketimbang perlindungan lingkungan. Demokrasi terkait erat dengan hak-hak kepemilikan privat atau infrastruktur sosial yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepemilikan privat dalam konteks demokrasi memungkinkan pengelolaan dan eksploitasi berlebihan atas sumber daya lingkungan. Eksploitasi berlebihan ini dipercepat di negara demokrasi yang individu-individunya memiliki kebebasan bisnis dan ekonomi. Negara demokrasi dengan kebebasan berserikat dan pasar bebasnya memungkinkan pembentukan kelompok-kelompok pelobi yang tidak selalu bertujuan

menerapkan praktik pembangunan yang ramah lingkungan.

Pasar bebas dan kepemilikan privat dari konteks di atas memungkinkan adanya sistem kapitalisme yang dapat merugikan tatanan sosial maupun lingkungan. Sistem kapitalisme dapat teralisasi dari standar konsumsi kita yang mubazir, karena bagaimanapun besarnya sampah dan sumber daya yang terbuang percuma disebabkan pertama-tama oleh ekspansi konsumsi yang tidak terkendali atas barang-barang. Intensifikasi konsumsi dan nilai-nilai kultural yang menyokongnya telah memperdalam degradasi lingkungan.

Nilai-nilai kultural inilah yang perlu diubah. Persoalannya, konsumsi yang terus-menerus meningkat dalam segala hal merupakan salah satu ciri pokok atau watak asli perekonomian kapitalis, karena merupakan dorongan bagi akumulasi modal swasta yang menjadi tujuan aslinya.

Dalam struktur perekonomian kapitalis, konsumsi merupakan sarana yang menciptakan nilai selama produksi barang terwujud. Karena tujuan usaha kapitalis ialah mengakumulasi laba, sementara laba hanya dimungkinkan apabila barang-

barang produksi dipertukarkan dengan uang dan dikonsumsi.

Proses penciptaan nilai mustahil akan terus-menerus meningkat apabila tidak terdapat permintaan akan barang konsumsi yang terus-menerus meningkat juga.

Industrialisme maupun konsumerisme menjadi roh perekonomian kapitalis dengan janjinya untuk meningkatkan kemakmuran suatu bangsa melalui cara yang efisien, namun rupanya hanya berujung pada resesi ekonomi dunia yang berlarut-larut.

Pada kesimpulannya, pembangunan ekonomi di Indonesia menaruh harapan akan perubahan yang berlaku lama atau berkelanjutan hingga 2045 yang memerhatikan lingkungan alam ke dalam perhitungan keberhasilan pembangunan. Lingkungan hidup sebagai tempat bertopang haruslah dihargai, karena memiliki hak untuk hidup dan berkembang terlepas dari manfaat instrumentalnya bagi manusia.

Pembangunan ekonomi memang dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi dengan mengabaikan kondisi lingkungan hidup dan sosial akan berbalik menjadi bencana yang justru menghancurkan hasil-hasil pembangunan tersebut.

Pemanfaatan alam demi kepentingan manusia secara faktual dan eksistensial tidak dapat dihindari. Hal yang harus dilakukan bukannya menghindari semua upaya mengubah alam demi kepentingan manusia

tersebut, melainkan mengurangi dampak perubahan itu terhadap kelangsungan lingkungan hidup dengan bertindak secara efisien dan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi dalam memanfaatkannya. [ ]



Gambar diambil dari <https://www.cleanpng.com/png-islamic-calligraphy-quran-islamic-art-7213717/>

## Indonesia di 100 Tahun Kedua: Pandangan Generasi Muda



**Ana Nur Faizah**

Berbicara tentang masa depan seseorang, apalagi suatu bangsa, adalah juga berbicara tentang apa (usaha) yang telah dilakukan individu atau bangsa itu. Dengan demikian, menerka masa depan seseorang atau masa depan bangsa Indonesia, juga harus melihat apa yang telah dilewati, telah dilakukan di hari kemarin, serta apa yang terus diupayakan pada hari ini, serta terus akan dilakukan ke depan oleh warga masyarakat atau warga negara Indonesia. Benarlah apa yang dikatakan Benito Mussolini di masa lalu bahwa sejarah pada hakikatnya tak sekadar masa lalu, ia juga masa kini dan memengaruhi masa depan.

Artinya, untuk mencapai masa depan yang cerah, kita harus senantiasa belajar dari segala kesalahan di masa lalu. Belajar dari semua itu akan membuat kita mampu mempersiapkan dengan matang segala hal.

Lalu apa yang menjadi kunci utama yang harus dipersiapkan bangsa Indonesia agar memiliki masa depan yang cerah? Pemerintah yang diisi orang-orang cerdas? Infrastruktur? Menggenjot pendapatan negara, mengejar teknologi paling mutakhir agar tak lagi selalu ketinggalan di tengah kemajuan bangsa-bangsa lain? Ataukah senantiasa *up-date* dengan alat tempur canggih untuk melindungi negara?

Semua pertanyaan yang dilontarkan itu merupakan aspek yang harus dipersiapkan bangsa Indonesia. Tapi ada aspek kunci yang menggerakkan semua aspek tersebut agar berjalan optimal. Aspek tersebut kadang selalu terlupakan karena sebagian elit terlena menikmati masa kini, meski dari kacamata sempit sebatas mengenyangkan perutnya sendiri. Aspek apakah itu? Jawabannya adalah generasi muda, generasi yang menjadi sumber daya manusia yang kelak akan menggerakkan segala sesuatu di negara ini.

Berkaca pada masa lalu—saat kita dijajah bangsa lain, generasi mudalah yang memegang andil untuk berjuang secara fisik dan pemikiran, sehingga terciptalah kemerdekaan bangsa. Namun pasca diproklamirkannya kemerdekaan, nasib generasi muda ini tidak sepenuhnya merdeka. Banyak dari mereka masih terbelenggu minimnya akses pendidikan, kesehatan. Bahkan tak jarang sekadar rasa aman pun sulit mereka dapatkan. Sehingga ketika generasi muda ini menduduki usia emas kadang usahanya untuk membangun masa depan bangsa tidak dapat optimal.

Bila kurangnya pengembangan generasi muda itu terjadi di awal kemerdekaan—karena banyak prioritas lain yang harus lebih diutamakan, barangkali masih wajar. Namun jika pada usia tujuh puluh empat tahun setelah diproklamasikannya kemerdekaan pun aspek pembangunan generasi muda itu masih dikesampingkan, rasanya sangatlah miris.

Bila dibandingkan dengan Jepang yang sama-sama harus bangkit membangun bangsanya dari titik nol pada tahun 1945, bangsa kita sudah sangat jauh tertinggal. Di Jepang, yang dipikirkan para pemimpin mereka saat itu adalah menyelamatkan dan mengum-

pulkan guru, agar generasi muda tetap bisa berkembang guna kelak bisa membangun bangsanya kembali. Kini jawaban atas keputusan tersebut ditunjukkan pada dunia, dengan bukti berupa hasil pembangunan sumber daya manusia Jepang itu telah mengantarkan negara tersebut memiliki banyak inovasi dan penguasaan teknologi. Mereka mampu menciptakan banyak produk yang bukan hanya mendongkrak pendapatan negara dari sisi ekonomi, namun membuat negara tersebut kuat pula pada sisi politik dan banyak aspek lainnya.

Usia ke-74 tahun ini jika dilihat dari kaca mata manusia sudah barang tentu sangat tua. Namun bagaimana jika kita melihatnya dari kaca mata negara? Masihkah ada waktu untuk membangun kembali? Tentu ini adalah waktu yang tepat untuk bangun dari tidur panjang, di mana selama ini kita terlalu menikmati kekayaan alam yang dimiliki hingga pada akhirnya kekayaan itu kian habis.

Bukankah Negara Indonesia ini memiliki mimpi-mimpi indah untuk semua masyarakatnya? Namun jika negara belum juga mengutamakan pembangunan pada aspek manusia untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju lainnya, rasanya kita hanya akan terus hidup



dalam mimpi tanpa bisa merealisasikan mimpi tersebut.

Masa depan yang baik dapat diterka, bahkan ditentukan dari apa yang dilakukan masa kini. Maka lihatlah, apakah di masa kini pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan negara telah melakukan pembangunan pada aspek manusia? Jawabannya tidak bisa kita mengatakan mutlak sudah atau belum bila tidak berlandaskan data.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan adapun anggaran untuk pendidikan yang digelontorkan dari tahun 2016–2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 anggaran yang digelontorkan pemerintah Indonesia untuk sektor pendidikan adalah Rp 478,4 Triliun. Pada tahun 2020 sudah ditetapkan bahwa anggaran pendidikan yang digelontorkan akan senilai Rp 508,1 Triliun dengan tambahan proporsi baru yaitu dana abadi pendidikan Rp 25 Triliun. Dana itu akan digunakan untuk peningkatan riset dan peningkatan jumlah generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi lanjutan.

Bukan hanya dari sisi anggaran yang disusun Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Tenaga Kerja pun ikut mendu-

kung pembangunan sumber daya manusia tersebut. Kementerian Tenaga Kerja menegaskan, sumber daya manusia yang unggul merupakan suatu modalitas menuju manusia maju. Sumber daya manusia unggul ini bukan hanya yang menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan saja, namun perlu pula berjiwa Indonesia dan berideologi Pancasila. Pencapaian sumber daya manusia unggul ini menjadi fokus utama kementerian ketenagakerjaan lima tahun ke depan, sejak di dalam kandungan hingga mencapai usia emas.

Untuk mencapai fokus utama ini Kementerian Tenaga Kerja melakukan beberapa strategi, diantaranya pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas berupa pemberian sarana advokasi. Di antaranya ada yang diberikan kepada pesantren, yang pada 2018 lalu telah dibangun 75 BLK. Tahun 2019 ditargetkan 1000 pembangunan BLK. Tujuan dari pembangunan ini, diharapkan lulusan lembaga pendidikan tersebut memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan dunia kerja.

Selain itu Kementerian Tenaga Kerja melakukan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pelatihan vokasi bagi karyawan yang terkena PHK untuk diberi pela-

tihan kembali sehingga pekerja tersebut dapat melakukan alih profesi maupun berwirausaha.

Strategi yang ketiga adalah *super tax deduction* melalui PP No 94 Tahun 2010. Aturan tersebut menegaskan, bagi perusahaan yang melakukan pemagangan dan pelatihan bagi karyawannya akan dikenai pengurangan penghasilan bruto sebanyak 200 persen dari pengeluaran pajak perusahaan.

Presiden Jokowi dalam pidato HUT RI ke-74 juga mengambil topik "SDM Unggul Indonesia Maju". Topik itu didasari Kenyataan bahwa Indonesia tengah mengalami masa globalisasi dan revolusi industri 4.0. Kedua hal tersebut mengakibatkan ketatnya persaingan di dunia kerja dan perang dagang yang semakin gencar antarnegara. Presiden Jokowi dalam pidatonya mengatakan, sumber daya yang kompetitif itu adalah mereka yang "...memiliki karakter pekerja keras, jujur, kolaboratif, solutif dan entrepreneurship. Solutif mencakup pula penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang *menguasai the emerging skills* yang mampu mengisi *the emerging jobs* serta inovatif yang mampu membangun *the emerging business...*"

Dari sisi perencanaan pemerintah nampaknya sudah mulai adanya rencana nyata untuk mendukung pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas. Namun apakah pada realitasnya semua rencana pemerintah dalam bentuk anggaran yang direalisasikan di dalam program kerja itu bisa dirasakan seluruh generasi penerus bangsa di seluruh Indonesia?

Jawabannya, menurut saya, belum semua bisa merasakan ini. Bila kita berkunjung ke daerah-daerah di luar pulau Jawa akan sangat terasa perbedaan yang sangat mencolok terkait minimnya sarana prasarana pendidikan. Ketika para guru di Jawa jumlahnya telah melampaui kebutuhan sehingga mereka berbondong-bondong untuk menjadi guru honorer, di luar Jawa keadaan sungguh berbanding terbalik. Sering untuk satu Sekolah Dasar saja bisa jadi hanya ada dua orang guru. Guru tersebut pun tidak datang setiap hari karena jauhnya jarak sekolah dari rumah, ditambah tidak adanya akses jalan dan transportasi.

Berdasarkan pengalaman saya menjadi *teaching assistant* yang mengajar teman-teman yang berasal dari Papua yang datang dengan beasiswa dari pemerintah Papua, mereka banyak

mengeluhkan sulitnya memahami materi dan menguasai bahasa asing dalam proses belajar.

Jangankan belajar bahasa asing, bagi mereka untuk menggunakan Bahasa Indonesia pun sulit. Mereka mengeluhkan bahwa di daerahnya mereka merupakan juara kelas namun materi yang diajarkan di sini (di Unpad—di Jawa) sangatlah sulit. Hal itu membuat mereka minder melihat teman-teman mereka yang lain bisa mudah memahami soal, mengerjakan dengan menghitung sangat cepat. Sesuatu yang bagi mereka untuk memahami soal pun sudah alangkah terasa sangat sulit.

Hal itu membuat saya prihatin. Apa yang salah selama ini dalam penggunaan anggaran yang katanya sesuai amanat konstitusi, yakni tiap tahunnya 20 persen dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan.

Belum lagi bila kita lihat penilaian mutu pendidikan dengan menggunakan *Programme for International Student Assessment* (PISA). PISA merupakan pengujian yang diinisiasi oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) untuk mengevaluasi sistem pendidikan di 72 negara yang disurvei. Dalam survei ini, pelajar yang berusia 15 tahun dipilih secara

acak untuk mengikuti uji kompetensi dasar membaca, matematika, dan sains. Survei ini untuk mengukur apa yang dapat diaplikasikan siswa dari ilmu pengetahuan yang diperolehnya.

Indonesia menduduki peringkat ke-62, di bawah Vietnam yang memiliki PDB lebih rendah dari Indonesia dan proporsi anggaran pendidikan di bawah 20 persen.

Selain itu, bila disandingkan dengan negara Asia Tenggara pun kualitas pendidikan Indonesia masih kalah dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Berdasarkan indeks HDI (*Human Development Index*) 2018, Indonesia masih menempati urutan ke-6 di Asia Tenggara bersama Vietnam, dengan skor 0,694.

Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merupakan modal utama untuk tercapainya masa depan Indonesia yang lebih baik, perlu kita dukung bersama. Bukan hanya peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, anggaran dan program kerja. Yang lebih penting lagi adalah partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah, selain masyarakat pun perlu ikut meningkatkan kua-

litas sumber daya manusia pada generasi muda di sekitarnya.

Generasi muda cenderung ingin mempelajari hal-hal baru. Hal baru yang kita pelajari inilah yang akan membedakan output dari setiap pribadi masing masing. Hal baru di sini bukan hanya tentang yang kita pelajari karena adanya kemudahan internet masa kini, namun bisa juga mencakup hal-hal yang ditanamkan dalam didikan orang tua, budaya dan sosial masyarakat dari setiap generasi muda.

Seperti budaya yang masih berkembang di masyarakat pada daerah-daerah Indonesia bahwa perempuan harus pintar memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, merawat anak dan menjaga rumah.

Sedangkan laki laki harus kuat, tangguh dan pandai mencari uang. Hal ini memunculkan dasar stigma bahwa perempuan berada pada titik di mana dia harus *perfect* di segala aspek, dan laki-laki harus berani.

Sesuai dengan *Sustainable Development Goals* nomor lima, yakni *Gender Equality*, perempuan pun harus mendapatkan hak yang sama dalam perolehan akses pendidikan, pekerjaan dan mengemukakan pendapatan. Budaya memang merupakan identitas bangsa, namun bila budaya

itu perlu dievaluasi untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, apa salahnya?

Tuntutan *women must be perfect* dalam kebudayaan kita, dengan anggapan kelak perempuan akan menjadi istri dan ibu, membuatnya berfikir dalam segala hal—bahkan dalam hal kecil seperti bertanya pada suatu acara kuliah umum, perempuan cenderung akan merasa malu untuk menanyakan sesuatu. Mereka takut dianggap bodoh.

Lihatlah penelitian psikolog Carol Dweck yang disampaikan Reshma Saujani dalam acara Ted Talk yang berjudul *Teach Girls Bravery Not Perfection* Disebutkan, "...*bright girls were quick to give up, the higher the IQ the more likely they were to give up.*" Pada penelitian tersebut profesor memberikan tugas agar mahasiswi dan mahasiswa membuat suatu koding.

Setelah dua puluh menit lebih berlalu, Profesor menemukan bahwa saat mahasiswa menemukan kesulitan memecahkan masalah ia akan bertanya, "Profesor apa yang salah dari koding saya?"

Namun pada mahasiswi, umumnya mereka melihat persoalan yang diujikan itu begitu sulit. Ketika profesor itu melihat monitor, mahasiswi itu tidak

menuliskan satu huruf apa pun. Mahasiswa ini lebih memilih tidak memperlihatkan hasil kerjanya satu pun, karena berfikirannya semua haruslah sempurna.

Hal itu membuktikan, di samping pemenuhan fasilitas dan kebijakan, untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia diperlukan juga *mindset* yang tepat. Kita perlu menanamkan pada generasi muda bahwa baik perempuan maupun laki laki harus berani dalam hal apa pun. Karena dengan berani kita akan mampu mengambil risiko dan membuka banyak kesempatan dalam hidup ini.

Dengan berani bertanya membuat kita lebih kritis hingga pada saatnya memimpin mampu melihat akar permasalahan sedetil mungkin untuk membuat solusi solutif. Dengan berani memiliki mimpi yang besar membuat kita berani untuk mencari ilmu kemana pun.

Sesungguhnya, keberanianlah yang mengantarkan saya seperti saat ini. Dimulai dari satu keberanian sejak kelas 1 SMA. Saat itu saya ditempatkan di kelas IPA karena saya memasuki SMA melalui jalur rapor.

Namun dari awal saya merasa itu bukan tempat saya berkembang hingga saya memutuskan untuk mendatangi ruang konseling

untuk meminta pindah ke kelas IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial).

Namun guru saya menolaknya. Alasannya, nilai matematika, fisika, kimia dan biologi saya bagus sehingga lebih baik saya tetap di kelas IPA. Ibu saya pun melarang saya pindah dengan alasan di kelas IPA saya bisa lebih pintar dengan lebih banyaknya mata pelajaran hitungan.

Usai libur Lebaran, saya kembali memberanikan diri kembali ke ruang konseling untuk meminta pindah. Seolah kehabisan akal untuk mencegah, akhirnya guru saya memanggil kembali Ibu yang tetap melarang hingga saya menangis. Ibu pun menelepon ayah. Tidak disangka, ayah saya mengizinkan.

Meski demikian, di awal-awal Ibu sempat tidak memberi uang jajan satu minggu. Banyak pula teman yang bilang saya bodoh, tidak kuat di IPA. Saya pun tentu harus berjuang bersosialisasi kembali dengan teman teman baru di IPS.

Akhirnya saya menepati janji saya pada Ibu. Saya menjadi juara umum IPS tiga tahun berturut-turut. Karena saya mengambil kelas lintas minat, nilai Ujian Nasional matematika saya lebih tinggi daripada anak-anak IPA.

Pada angkatan saya, semua medali emas OSN Kabupaten didapatkan dari mata pelajaran IPS, yang membuat sekolah kami menjadi juara umum. Dari keberanian itu saya ada di Jurusan Akuntansi Unpad. Saya juga berani berkontribusi di BEM Kema FEB Unpad, hingga menjadi sekretaris umum saat yang lain memandang sebelah mata organisasi kami. Dari keberanian ini saya dan rekan-rekan bisa menunjukkan hasil kerja kami dan mengantarkan banyak prestasi.

Hingga yang membekas di tahun ini, yakni pengalaman mengikuti *research competition* pada acara *Asia Pacific Youth Exchange*.

Saya berani menunjukkan bahwa orang Indonesia memiliki kemampuan untuk bersaing, meski awalnya dianggap remeh. Menurut saya, banyak teman dari luar negeri justru kurang penge-

tahuan. Banyak di antara mereka tidak tahu tentang Indonesia, dan menyebut Indonesia hanya bagian dari Bali. Saya memiliki pengalaman, hanya dengan menunjukkan bahwa kami punya keahlian melakukan budgeting, perhitungan akuntansi dan perhitungan risiko, hal itu bisa mengubah perspektif orang asing terhadap kita.

Kesimpulannya, semua pihak memang harus berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 ini benar-benar nyata. Kemampuan dasar, penguasaan teknologi dan pola pikir generasi muda harus selalu dikembangkan. Jika tidak ikut berkembang, bisa-bisa kita terus menerima penjajahan baik dalam bidang teknologi, pemenuhan konsumsi hingga mungkin lebih parah lagi pada titik ideologi. [ ]



*wa rabbaka fa kabbir*: dan agungkanlah Tuhanmu  
(Surat Al-Muddassir: 3)  
Diambil dari <https://photos.com>

## Resensi Buku: Jejak Berliku Pemikiran Begawan Nasionalis



**IGG Maha Adi**

M Dawam Rahardjo, *Nasionalisme, Sosialisme, Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo*, Pustaka LP3ES, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 2017, lviii+246 halaman.

Buku ini melacak sejarah pemikiran (history of ideas) Profesor Soemitro Djojohadikusumo, sehingga lebih bersifat historis daripada filosofis. Bagaimana menjelaskan pemikiran Sumitro dalam sejarah perkembangan ekonomi Indonesia? Apakah ia seorang sosialis karena gagasan-gagasannya sejak muda dan orientasi politiknya, atau liberalis karena pilihan-pilihannya di belakang hari sebagai administrator

pemerintah, atau pragmatis karena pendekatannya pada era 1950an?

Ekonom UI Faisal Basri, salah satu



anak didik Sumitro dari generasi terakhir di FEUI, mencermati adanya perubahan arus pemikiran ekonomi dari gurunya itu. Ia setuju dengan pandangan yang mengkategorisasikan Prof Sumitro sebagai menganut paham sosialis-nasionalis atau sosialisme-negara, yang berbeda dengan pendiri PSI Sutan Sjahrir yang menganut paham atau varian sosialisme-liberal, bersifat pragmatis sehingga terkesan Neo-Keynesian (172).

Pandangan sosialis Prof Sumitro dapat dilacak jauh ke masa mudanya, terutama saat menjadi mahasiswa dan lulus sebagai doktor ekonomi dari Universitas Rotterdam pada usia 26 tahun. Ideologi itulah yang kelak dibawanya masuk ke dalam politik dan pemerintahan serta dalam pengajarannya di kampus UI. Pendekatan Sumitro atas masalah pembiayaan pembangunan pasca-kemerdekaan misalnya, terutama fokus pada struktur ekonomi warisan kolonial, pemilikan alat-alat produksi,

peranan pemerintah yang seharusnya, pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat, pembayaran kegiatan pembangunan, keharusan untuk memberantas kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Ini semua menjadi fokus ekonom yang berpikir ideologis yang cenderung radikal, dan berminat pada pembentukan sistem ekonomi. Dan Soemitro berlayar di antara keduanya. Tidak mengherankan bila pengamat Barat memandangnya bergerak ke Kiri, bersikap radikal, seorang sosialis sekaligus nasionalis, tetapi juga bisa pragmatis seperti ditunjukkannya saat menjadi pembantu Presiden Soeharto sebagai menteri.

Benjamin Higgins dalam buku *Indonesia's Economic Stabilization and Development* (1957) membaga dua golongan politikus dan teknokrat Indonesia pada dekade 1950-an. Golongan *history minded* yaitu mereka kaum nasionalis, komunis, dan konservatif yang antimodal asing, dan antibudaya asing. Menurut Higgins, kaum ini berpandangan bahwa tugas pemerintah sesudah kemerdekaan adalah melenyapkan sisa kolonialisme sebagai syarat pembangunan nasional. Golongan kedua adalah *economic minded*, yang berpandangan tugas pemerintah saat itu adalah

pembangunan ekonomi dan modernisasi. Mohammad Hatta disebut sebagai motor kaum yang kedua, dengan Prof. Sumitro di dalamnya. Tetapi Higgins melupakan konteks sejarah dalam kategorisasinya.

Hatta dan Soemitro pernah berdebat keras saat merumuskan kesepakatan Konferensi Meja Bundar 1949, terutama tentang utang piutang Belanda terhadap Indonesia, juga penyerahan Irian Barat kepada Indonesia. Prof Sumitro berhasil menunjukkan kepada tim pemerintah, dengan perhitungan ekonomi, bahwa justru Belanda yang harus membayar Indonesia bukan sebaliknya. Mohammad Roem dan Djuanda yang mewakili Pemerintah Indonesia, dibuat kagum oleh perhitungan Sumitro itu. Soal Irian Barat ia berpandangan harus diserahkan secepatnya dan tak bisa ditunda. Hatta memandang sebaliknya. Karena KMB diketuai Hatta, maka negosiasi dalam perundingan itu lebih akomodatif terhadap pandangannya. Dan sejarah mencatat, KMB dianggap merugikan bangsa Indonesia, sehingga dibatalkan Bung Karno pada Mei 1956, dan tak lama kemudian Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Jika pikiran Sumitro sosialis, maka "darahnya" adalah nasionalis. Walaupun lahir dalam keluarga priyayi



Jawa, tak menghalanginya untuk berkonfrontasi secara terbuka dengan siapapun terutama menyangkut kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menyerang pendapat George L. Gongrijp, promotornya sendiri di negeri Belanda, karena menyatakan Indonesia belum siap merdeka. Padahal berpolemik dengan promotor sendiri di Belanda saat itu ditabukan.

Pragmatisme Prof Sumitro terutama terbaca dalam periode kedua 1950-1967 ketika ia berperan dari kampus sebagai Dekan Ekonomi UI Indonesia sekaligus Menteri era Soekarno. Masa dimana Indonesia seharusnya membangun perekonomian nasional dalam sistem pemerintahan demokrasi konstitusional, yang berdasarkan hukum yang berlaku, dan aturan main berpolitik yang harus mulai ditegakkan karena kebijakan ekonomi membutuhkan keteraturan dan kepastian hukum. Pandangan ini antara lain didukung para administrator seperti Hatta, Masyumi dan PSI. Pada saat ini disusun kebijakan ekonomi pragmatis yang didasarkan pada prinsip rasionalitas ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi jangka pendek dan menengah. Namun perbedaan mulai timbul dan menajam dengan pandangan Soekarno dan simpatisannya

yang mengutamakan pada pilihan ideologis dalam pembangunan politik dan ekonomi. "Revolusi belum selesai," adalah kredo kelompok yang dimotori oleh PNI, PKI dan menurut buku ini, juga oleh NU.

Prof. Sumitro memiliki karakter yang langka sebagai ilmuwan, karena ia memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan analisis atau pendapatnya. Dalam polemiknya dengan Sjafruddin Prawiranegara tahun 1950-an, ia mengakui bahwa pemikiran lawannya itulah yang betul, bahwa untuk membangun perekonomian Indonesia, kita tidak bisa langsung melompat, melainkan harus dimulai dari desa dan pertanian dulu. Dalam polemik itu, Soemitro memang cenderung kepada gagasan untuk terutama menumbuhkan kelas menengah dan melakukan strategi industrialisasi, sementara Sjafruddin justru berpandangan bawah perekonomian harus dibangun dari desa (xxxix-xl). Kelak dalam era Orde Baru, sebagai anggota Kabinet Pembangunan I ia bersikap pragmatis dengan menerima strategi mengundang modal asing melalui UU No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Ia juga bisa menerima haluan ideologis baru Emil Salim, ketika anak didiknya itu merumuskan Sistem Ekonomi Pancasila di ketika

tahun 1979. Padahal tahun 1966, Emil Salim masih menulis di harian Kompas tentang Ekonomi Sosialis Pancasila. Prof. Sumitro menerima pendapat Emil walaupun punya pandangan sendiri tentang itu: Jika Emil Salim mengkombinasikan *Command Economy* dan *Privat Economy* atau *Market Economy*, maka Sumitro merumuskan Ekonomi Pancasila sebagai *moral economy* atau *value-based economy*, yaitu ekonomi yang didasarkan pada nilai moral dalam Pancasila.

Pandangan liberal Prof Sumitro, tampaknya tak bisa dilepaskan dari peranan sentralnya dalam apa yang populer disebut "Mafia Berkeley." Jarang yang tahu, bahwa keputusan memilih menyekolahkan murid-muridnya di FEUI ke Amerika, semata karena British Council yang diincarnya tak mampu membiayai program untuk membe-  
rangkatkan mereka belajar ekonomi di London School of Economics (LSE). Corak sosialisme yang cukup kental di LSE adalah idaman Prof. Sumitro, tambahan pula ia tertarik pada pe-mikiran Harold Lasky yang menjadi guru besar di LSE. Sekolah inilah yang kelak berhasil membuat Inggris menjadi penganut *welfare state* yang terbukti memakmurkan negara itu. Secara terus terang dalam

buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, Prof. Seomitro mengakui tak terlalu menyukai pengajaran ekonomi di Amerika yang *liberalistic*. Tapi tawaran Ford Foundation itu harus ia terima karena FEUI kekurangan pengajar akibat hengkanya para dosen ekonomi berkebangsaan Belanda karena pemutusan hubungan diplomatik tahun 1956. Alasan lainnya, bedol desa para dosen FEUI ke Universitas Berkeley "setengah direstui" Prof Sumitro karena Ketua Departemen Ekonomi Berkeley saat itu Andreas Papandreou adalah kawan dekatnya. Sama-sama sosialis. Namun, rupanya jalan sejarah itu menikung cukup tajam. Papandreou tak tahan dengan iklim mengajar di Amerika dan ia kembali ke Yunani untuk aktif dalam politik dan kelak menjadi Perdana Menteri Yunani paling dihormati. Implikasinya untuk para dosen FEUI, mereka lulus dari Berkeley dengan paham ekonomi libera-  
listik. Kesempatan itu datang ketika Soekarno tumbang, dan periodisasi perkembangan ekonomi Indonesia memasuki fase keempat Orde Baru 1967-1998, yang sesungguhnya menciptakan situasi yang memungkinkan untuk melaksanakan ide pemba-  
ngunan ekonomi rasional. Prof. Sumitro kembali ke Indonesia setelah pengasingan sejak 1958

dan diangkat menjadi Menteri Perindustrian. Murid-muridnya di Universitas Indonesia kini duduk dalam kabinet yang dibentuk Presiden Soeharto. Sebuah kabinet para teknokrat. Sebagian besar kebijakan ini dalam era ini adalah kebijakan ekonomi sebagai kelanjutan gagasan Prof Sumitro pada dekade 1950an, yang mengalami keterputusan karena pelaksanaan Ekonomi Terpimpin. Namun, Soeharto memberinya jabatan Menteri Riset dan Teknologi yang menjauhkannya dari dialektika

dan pergolakan diskursus ekonomi terutama bersama pada muridnya, sekaligus berjarak dari desain ekonomi Orde Baru. Sejak saat itu, sosialisme yang diyakini Sang Begawan terpinggirkan berganti corak liberalistik dan belakangan neoliberal. Setelah istirahat dari pemerintahan di tahun 1978, Prof Sumitro tetap kritis terhadap perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia yang rupanya juga mengambil jalan berliku dan penuh gejolak. [ ]



*Zoomorphic Swan Calligraphy*, merupakan mode skrip yang bermetamorfosis menjadi bentuk hidup yang juga merupakan huruf yang dapat dibaca. Praktek ini berkembang relatif lambat dalam seni Islam dan berkembang di Turki Utsmani, India, dan Qajar Iran sekitar tahun 1458. Diambil dari [pinterest.com/Arabic-islam-calligraphy](https://www.pinterest.com/Arabic-islam-calligraphy)

## Tentang Para Penulis

### Radhar Panca Dahana

Radhar Panca Dahana yang lahir di Jakarta, 26 Maret 1965, adalah sastrawan dan budayawan. Namanya dikenal melalui karya-karyanya dalam bentuk esei sastra, cerita pendek, dan puisi yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar Indonesia.

Menyelesaikan Program S1 Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Indonesia (1993) dan studi Sosiologi di École des Hautes Études en Science Sociales, Paris, Prancis (2001), Radhar merupakan pendiri dari Perhimpunan Pengarang Indonesia dan presiden Federasi Teater Indonesia yang masih dijabatnya sampai saat ini.

Minat Radhar dalam bidang menulis terlihat sejak umur 5 tahun, saat dirinya sering tidak pulang ke rumah dan ditemukan di kawasan Bulungan sedang melihat teater. Radhar memulai debut sebagai Sastrawan sejak usia 10 tahun, lewat cerpennya di Harian Kompas, "*Tamu Tak Diundang*". Bertahun mengasah ketajaman pikir dan tulisan, pada saat duduk di kelas 2 SMP Radhar sudah bekerja sebagai wartawan lepas di Majalah Hai.

Yang harus dikagumi dari Radhar adalah bahwa faktor kesehatan yang sangat mengganggu kegiatannya, tak mampu mem-

bendung semangatnya untuk terus berkarya. Beberapa buku yang menjadi penyimpan pikiran-pikiran cerdas Radhar di antaranya: '*Menjadi Manusia Indonesia*' (esai humaniora, 2002), '*Lalu Aku*' (kumpulan sajak, 2003), '*Jejak Posmodernisme*' (2004), '*Cerita-cerita dari Negeri Asap*' (kumpulan cerpen, 2005), '*Inikah Kita: Mozaik Manusia Indonesia*' (esai humaniora, 2006), '*Dalam Sebotol Cokelat Cair*' (esai sastra, 2007), '*Metamorfosa Kosong*' (kumpulan drama, 2007), '*Manusia Istana*' (kumpulan puisi), '*Homo Theatricus*', serta '*Ekonomi Cukup*' (2017).

### Adian Husaini, Ph.D

Adian Husaini lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, 17 Desember 1965. Tamat Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Bogor, Adian melanjutkan pendidikan dan meraih master Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Sementara gelar Ph.D dalam *Islamic Civilization* diraihnya di International Institute of Islamic Thought and Civilization-Internasional Islamic University Malaysia (ISTAC-IIUM).

Sebelum memilih jalan hidup sebagai pendidik, Adian Husaini adalah seorang Jurnalis. Sempat menjadi wartawan koran pertama

di Indonesia yang seluruh halamannya berwarna, *Harian Berita Buana*, berlanjut sebagai wartawan *Harian Republika* (1990-1998).

Aktivitas Adian terbilang banyak. Selain menjadi Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun, Bogor, beliau juga menjadi Direktur At-Taqwa College di Depok, serta Peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization (INSISTS). Adian sempat menjadi Pengurus Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Pusat (2000-2010), Pengurus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah 2005-2010, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (2005-2010), dan hingga saat ini masih merupakan Anggota Badan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia.

Pemikiran Adian Husaini bisa diterlusrui melalui buku-buku yang lahir dari tangannya, antara lain: *'Wajah Peradaban Barat'* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005, buku terbaik pertama non-fiksi dalam Islamic Book Fair di Jakarta, 2006;) *'Pancasila Bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam'* (Jkt: GIP, 2009), *'Filsafat Ilmu: Tinjauan Barat dan Islam'* (Gema Insani Press, 2014), *'10 Kuliah Agama Islam'* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2015), *'Pendidikan Islam, Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045'* (YPI Attaqwa Depok, 2018), serta

*'Perguruan Tinggi Ideal di Era Disrupsi'* (YPI at-Taqwa Depok, 2019).

### **Yudi Latif, Ph.D**

Yudi Latif lahir di Sukabumi, 26 Agustus 1964. Menamatkan studi S1 pada Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (1990), S2 dalam Sosiologi Politik dari Australian National University (1999), dan S3 dalam Sosiologi Politik dan Komunikasi juga dari Australian National University (2004).

Pernah menjabat berbagai posisi penting antara lain Deputy Rektor Universitas Paramadina, Direktur Reform Institute, Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia), Anggota Dewan Pendiri Nurcho-lish Madjid Society (NCMS), Ketua Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, Anggota Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Dewan Pakar Yayasan Nabil (Nation Building). Sejak 2015, diangkat sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

Sepanjang karirnya, Yudi meraih berbagai penghargaan antara lain: IFI Award untuk kategori Intelektual Muda Paling Berpengaruh, dari Islamic Fair of Indonesia I (IFI-I), 2011; Ikon Politik Indonesia tahun 2011, Versi Majalah Gatra; Australian Alumni Award, dari Pemerintahan

Australia, 2009; dan beragam prestasi akademik dari sekolah dasar hingga studi S3. Di masa-masa kuliah, bersama beberapa aktivis muda Islam, pengalaman dan pencarian jati diri Yudi dibukukan dalam *'Mencari Islam'* oleh penerbit Mizan.

Pemikirannya dalam bidang keagamaan dan kenegaraan tersebar di berbagai media. Karya-karya yang telah diterbitkan antara lain: *'Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan'* (Mizan: 2014), *'Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila'* (Gramedia: 2011), *'Akuntabilitas Sosial, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi'* ([KID]: 2011), *'Menyemai Karakter Bangsa: Budaya Kebangkitan Berbasis Kesasteraan'* (Kompas: 2009), *'Indonesian Muslim Intelligentsia and Power'* (Institute of Southeast Asian Studies [ISEAS]: 2008), *'Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia'* (Jalasutra: 2007), dan *'Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20'* (Mizan: 2005). Hingga kini masih aktif menulis dan menjadi dosen tamu di sejumlah pendidikan tinggi.

### **DR Fachry Ali, M.A**

Fachry Ali dilahirkan di Susoh, Blang Pidie, Aceh Selatan, 23 November 1954. Pada 1960-

1965 ia belajar di Sekolah Rakyat Islam (SRI) Banda Aceh sampai dengan kelas IV, kemudian dia hijrah ke kota Jakarta. Tak tamat, ia melanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada 1966-1968. Tamat dari Madrasah Ibtidaiyah Fachry bersekolah di Madrasah Tsanawiyah, Rawa Bambu, Pasar Minggu (tamat 1971) dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ke Sekolah Persiapan IAIN (SPIAIN), yang ditamatkannya pada 1973.

Pada 1974-1977 ia melanjutkan studi ke Fakultas Tarbiyah, urusan Bahasa Inggris, IAIN Jakarta dan memperoleh gelar sarjana muda pada 1977. Sempat tidak melanjutkan pendidikan lebih dan memilih bekerja di LP3ES sebagai tenaga pembina lapangan (TPL) di Jepara, Jawa Tengah, pada 1977-1978.

Sekembalinya dari Jepara, pada 1981-1985 Fachry melanjutkan *study* di universitas yang sama, namun ia mengambil jurusan berbeda yaitu Sejarah dan Kebudayaan Islam di Fakultas Adab. Pada 1991, dibantu Prof. M. C. Ricklefs, ketua jurusan sejarah di Universitas Monash, Australia, Fachri melanjutkan studi S2 dalam bidang sejarah di Monash University, Melbourne, Australia. Dari universitas inilah, pada tahun 1994, ia meraih gelar Master of Arts (MA) dengan tesis berjudul

*"The Revolts of the Nations-State Builders: A Comparative Study on the Acehnese Darul Islam and the West Sumatran PRRI Rebellions, 1953-1964"*. Gelar doktornya juga didapatnya dari universitas tersebut.

Fachry yang dikenal sebagai salah seorang pembaru pemikiran politik Islam, pada masa muda aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ciputat. Pemikiran Fachry yang kini Presiden Komisaris PT. Timah tersebut bisa ditelusuri melalui buku-bukunya, antara lain, *'Islam Pancasila dan Pergulatan Politik'* (Jakarta: Pustaka Antara, 1984); *'Islam, Ideologi Dunia dan Dominasi Struktural'* (Bandung: Mizan, 1985); *'Mahasiswa, Negara dan sistem politik Indonesia'* (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985); *'Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru'* (Bandung: Mizan, 1986); *'Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern'* (Jakarta: Gramedia, 1987); *'Golongan Agama dan etika Kekuasaan: Keharusan Demokratisasi dalam Islam Indonesia'* (Surabaya: Risa-lah Gusti, 1996), dan banyak lagi yang lain.

## **Prof. DR. Didin S. Damanhuri, SE, MS. DEA**

Didin S. Damanhuri lahir di Majalengka, Jawa Barat, 8 April 1952. Saat ini Guru Besar dan Pengajar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, selain mengajar tak tetap di Universitas Indonesia, Unpad, PPM, Binus, dan Universitas Nasional.

Usai mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Unpad 1979, Didin memperoleh gelar master ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, 1983. Gelar master juga diperoleh Didin dari Development Economics, Institute de Research Economique du Development, Prancis, pada 1989. Empat tahun berikutnya dari Lembaga yang sama ia memperoleh gelar doktoralnya.

Sempat menjadi Komisaris PT. Jamsostek (2001-2007), Kepala Badan Litbang dan Informasi Depnakertrans (2001-2004), Staf ahli Menteri Nakertrans (2004-2006), Staf Ahli Menteri Transmigrasi dan Kependudukan (2000-2001), Didin saat ini lebih fokus di kampus. Beberapa karya tulis Didin di antaranya *'Ekonomi Politik dan Pembangunan'* (IPB Press, Cetakan ke-3 Tahun 2014), *'Ekonomi-Politik Indonesia dan Antara Bangsa'* (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014) dan sebagainya.

## **DR Arif Budimanta**

Arif Budimanta adalah Direktur Megawati Institute, sebuah lembaga *think tank* di bawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sangat peduli dengan pemikiran ekonomi dan fenomena pembangunan. Saat ini Arif juga merupakan Penasihat Presiden di bawah perannya sebagai wakil ketua Komite untuk Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN).

Arif menyelesaikan gelar doktoralnya di Universitas Indonesia dan melanjutkan studi di bidang keuangan di University of Chicago. Selama di Amerika Serikat Arif menghadiri Program Eksekutif Senior di Harvard Business School (HBS) dan Program Pemimpin Opini Generasi Selanjutnya ASEAN-Republik Korea yang diorganisasi The Korea Foundation pada 2015 lalu.

Selain aktif sebagai dosen di Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Arif juga pendiri dan Penasihat Senior Pusat Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (ICSD). Tak hanya mengantongi level-5 sertifikat Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, Arif pun memiliki pengetahuan dan keahlian luas di sektor pertambangan dan energi dalam posisinya sebagai Staf Ahli Direktur PT. Tambang Timah.

Dari 2009 hingga 2014 Arif terpilih sebagai anggota Komisi XI DPR yang bertanggung jawab

atas perencanaan pembangunan, keuangan dan perbankan. Saat ini, selain menjabat anggota Forum Energi Bersih Indonesia, Arif juga memberikan kontribusi kepada Asosiasi Ekonom Indonesia sebagai anggota Dewan Direktur. Arif yang sebelumnya menjabat anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah, saat ini terdaftar sebagai anggota Royal Economic Society (RES) London.

## **Ir Marwan Batubara, MSc**

Marwan Batubara lahir di Deli Tua, Deli Serdang, Sumatra Utara, 6 Juli 1955. Sebelum menjadi anggota DPR 2014-2019 Marwan adalah General Manager (GM) PT. Indosat dan pernah meraih kursi legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD).

Marwan menyelesaikan pendidikan dasar tahun 1967 dan SMP tahun 1970 di Deli tua, Sumatra Utara. Ia melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 3 Medan Dengan dibantu seorang pamannya, Marwan berhasil menamatkan SMA tahun 1973.

Pernah setahun bekerja di sebuah radio swasta, Alnora, Medan, sebagai operator. Pada tahun 1975 Marwan berkesempatan memperoleh beasiswa sekolah kedinasan di PT Telkom, Bandung, selama 2 tahun dan ditempatkan di Surabaya tahun 1977. Beberapa tahun kemudian



Marwan diterima sebagai mahasiswa baru di Jurusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI, tamat pada 1984. Marwan kembali menempuh pendidikan tinggi S-2 bidang studi *computing* di Monash University, Melbourne, Australia pada tahun 1990-1992 hingga memberinya gelar master of science (M.Sc).

Pada tahun 2004 Marwan mulai terlibat dalam bidang politik. Ia kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pusat asal Sumatra Utara periode 2009 -2014.

### **DR Firman Jatnika, SE**

Menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Ekonomi Unpad tahun 1995. Firman kemudian melanjutkan studi magister ekonomi di Universitas Indonesia, dan memperoleh gelar doktor dalam manajemen bisnis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad tahun 2019.

Firman adalah praktisi perbankan Islam sejak 1995 dan saat ini menjabat sebagai Senior Vice President di Bank Syariah Mandiri.

### **Erie Febrian, SE, M.Comm, Ph.D**

Saat ini Erie berprofesi Associate Professor in Islamic Banking & Finance di FEB UNPAD. Erie menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi Unpad, lulus tahun 1996. Pada 2001 meraih Master of Commerce (M.Comm) dari School of Banking & Finance, The University of New South Wales, Sydney, Australia. Sementara studi doktoral diselesaikan Erie di International Islamic University Malaysia dengan topik disertasi '*Depositor Sensitivity to Risk of Islamic Banks: Evidence from Indonesia*' pada 2010.

Erie menghasilkan banyak penelitian di bidang ekonomi, bisnis dan perbankan Islam. Mulai berkarir sejak 2002, saat ini Erie menjabat anggota komite audit salah satu bank nasional.

### **IGG Maha S. Adi**

Bekerja sebagai jurnalis dan editor selama 20 tahun di beberapa media seperti Majalah TEMPO dan National Geographic, turut mendirikan beberapa media online dan sampai saat ini tetap menulis opini di berbagai media dengan minat terutama pada isu ekologi, hukum, antropologi, dan politik ekonomi. Ia juga rekan

pendiri The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dan the Forest Watch Indonesia (FWI). Saat ini bekerja di LSM Conservation International (CI) Indonesia, dan mengisi waktu dengan mengasuh grup Komunitas Buku di Facebook.

### **Ana Nur Faizah**

Ana lahir di Majalengka, 15 Mei 1998. Menamatkan sekolah menengah di SMA Negeri 1 Majalengka pada 2016, tahun itu pula Ana diterima di Jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran.

Ana yang saat ini menjabat Sek-

retaris umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UNPAD 2019-2020, tengah mengerjakan tugas akhir ini pernah menjadi delegasi Asia Pacific Youth Exchange pada 2017 dan 2019.

### **Naufal Muttaqien Shidiq**

Naufal dilahirkan di Bandung pada 11 Desember 1997. Menamatkan SMAN 5 Bandung pada 2015, Naufal melanjutkan studi ke Jurusan Antropologi FISIP Universitas Padjadjaran tahun 2016. Selain aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Naufal merupakan Anggota Tim Survey Ko/mpas tahun 2017-2019. [ ]



kendaraan berkah

# punya mobil baru lebih mudah & ringan

didukung lebih dari 8.000 authorized dealer

#LebihBerkah



mandiri syariah call 14040

Bank Syariah Mandiri terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

